

SEJARAH SOSIAL JAMBI

Jambi Sebagai Kota Dagang

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1984

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL JAMBI

Jambi Sebagai Kota Dagang

Tim Penyusun :
Hartono Margono
Mujilan
J.R. Chaniago

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1984

Penyunting

1. Suwadi Sjafei
2. Sutrisno Kutoyo
3. M. Soenjata Kartadarmadja

**Gambar kulit oleh
M.S. Karta**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang di-

perluan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penerbitan ini.

Jakarta, Januari 1984
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial yang dimaksud ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena adanya proses sosialisasi yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia maka diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi

pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, pemenuhan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Januari 1984

Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
Bab II Jambi Selayang Pandang	5
2.1 Keadaan alam dan lingkungan	5
2.2 Perkembangan Demografi	12
2.3 Keragaman Penduduk	16
Bab III Jambi Dalam Lintasan Sejarah	28
3.1 Bandar Niaga Melayu	28
3.2 Zaman Kesultanan Jambi	31
3.3 Struktur Pemerintahan	38
3.4 Kekuasaan Hukum Adat	45

3.5	Sistem Kekerabatan orang Melayu Jambi	52
3.6	Daerah Kalbu yang ke-12	55
Bab IV	Sosial Budaya	65
4.1	Organisasi Sosial	65
4.2	Organisasi Pendidikan	68
4.3	Pendidikan Agama.	69
4.4	Pendidikan Umum.	73
4.5	Kebudayaan	80
4.6	Seni Tari Daerah	82
Bab V	Jaringan Perekonomian Rakyat.	85
5.1	Sejarah Ringkas Perekonomian Rakyat.	85
5.2	Jenis-jenis Usaha Rakyat	89
5.3	Sistem Mekanisme Ekonomi	97
5.4	Jaringan Komunikasi Ekonomi	99
5.5	Hubungan Dagang.	101
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	105
	LAMPIRAN	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Rumusan Masalah*

Pembangunan suatu bangsa mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah. Berbagai aspek kehidupan itu mempunyai hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi sehingga tiap-tiap aspek menunjang aspek yang lain atau bahkan mungkin menentukannya.

Proses pembangunan yang telah meningkat ke taraf *self propelling growth* yang relevansi dengan setiap usaha pembangunan haruslah berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan selanjutnya. Maka masalah sosial tidak lagi terlalu jelas kelihatannya. Di saat sekarang ini masalah yang sangat strategis bagi pembangunan yang telah meningkat itu yang tidak sekedar rehabilitasi ataupun penyediaan sarana, haruslah dicari dengan seksama. Tanpa adanya usaha pencarian dengan seksama, maka seperti pengalaman dari berbagai negara berkembang menunjukkan realitas sosial yang diciptakan oleh pembangunan bahkan dapat menimbulkan situasi yang meniadakan arti semua yang telah dicapai.

Kemajuan yang meningkat akibat dari pembangunan itu sendiri menimbulkan berbagai masalah, terutama apabila di-

kaitkan dengan masalah sosial ekonomi yang bersifat global. Penyempitan dunia akibat kemajuan teknologi bukan saja menyebabkan keharusan makin terbukanya kehidupan kultural, tetapi lebih penting lagi makin tak mungkin kita terpisah dari peristiwa sosial politik dan ekonomi yang terjadi di luar batas negara. Sementara itu peledakan penduduk, energi dan lain-lainnya juga menghantui masa depan yang bersifat global itu. Oleh karena itu kita harus mempunyai wawasan jauh ke depan, sehingga kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat inventarisasi saja ataupun yang bercorak untuk keperluan seketika, tetapi kita harus juga mengadakan inventarisasi yang bersifat pasif, yang digali dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang berujung sejarah sosial.

1.2 *Tujuan*

Penelitian ini berusaha menangkap dan mengungkapkan secermat mungkin berbagai peristiwa sosial dan kaitan-kaitannya satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini akan diperhatikan benar hubungan timbal balik antara berbagai aspek kehidupan dan kemungkinan hubungan kausalitas sebagai akibat dari dinamika aspek-aspek tersebut.

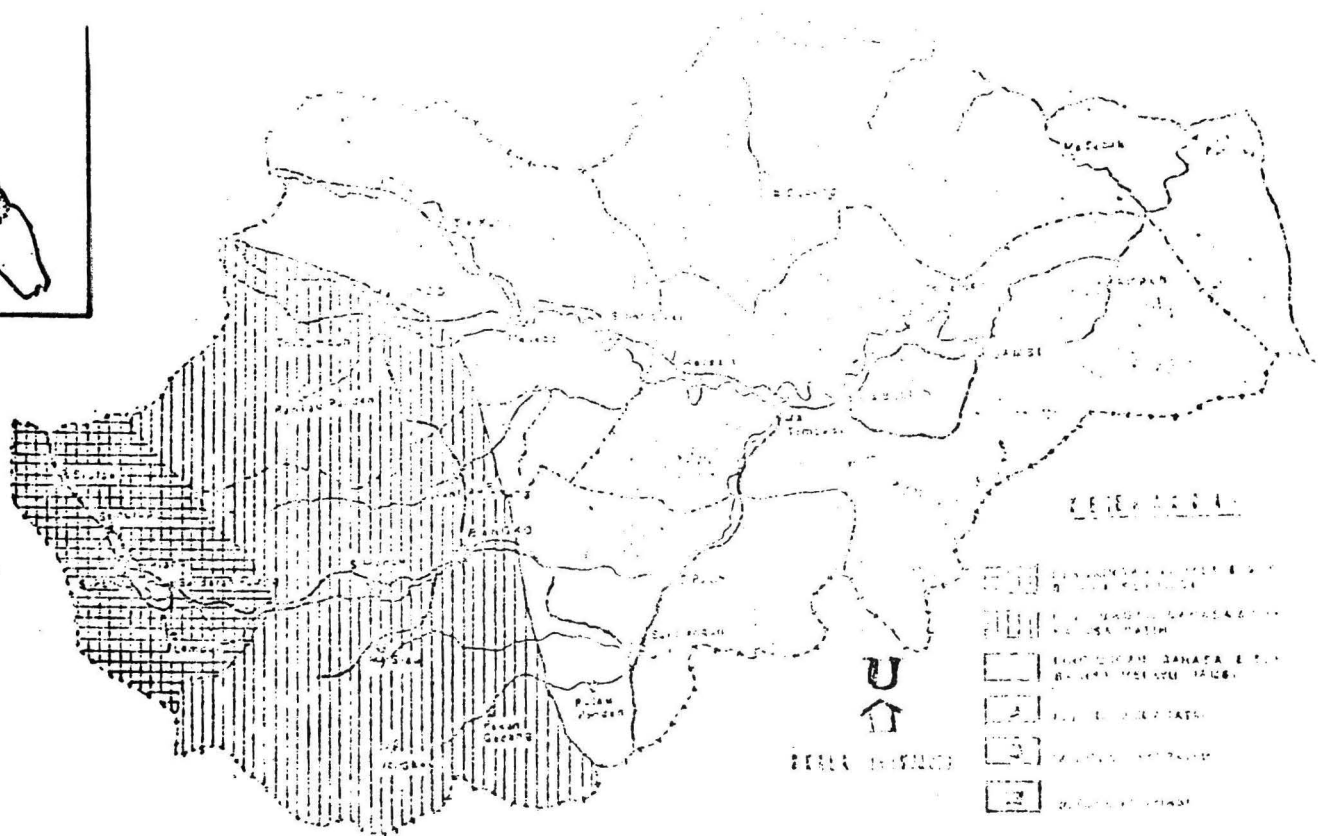
Kota Jambi termasuk kota yang tua. Dalam dinamika perkembangannya hingga sekarang mengalami berbagai proses dan variasi karena berbagai faktor yang sifatnya intern, juga faktor-faktor ekstern yang mempengaruhinya. Tiap-tiap kota/daerah di samping terdapat faktor-faktor persamaan yang sifatnya umum, terdapat pula faktor perbedaan sebagai corak spesifikasi kota/daerah tersebut terutama dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dalam hal ini perlu adanya usaha penelusuran kondisi potensial daerah dan kaitan-kaitannya dengan daerah-daerah lain yang mewujudkan corak tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain.

1.3 *Ruang Lingkup*

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada daerah Kota Jambi yang dahulu dikenal dengan istilah *hoofplat* dan seka-

rang menjadi kotamadya sebagai kota pusat pemerintahan. Karena suatu kota tidak dapat terlepas dari daerah lain dalam artian geografis terutama peranannya, apalagi Kota Jambi sebagai ibukota propinsi, maka diungkapkanlah keadaan daerah Jambi secara keseluruhan walaupun secara garis besar, baik dalam geografisnya, sosial budayanya, jaringan pemerintahannya, agama dan lain-lain terutama dalam arus ekonomi, namun kesemuanya itu hanya untuk menempatkan Kota Jambi dalam konteks permasalahannya.

Penekanan penelitian ini diletakkan pada Kota Jambi sebagai kota dagang. Oleh karena itu masalahnya banyak berorientasikan pada masalah ekonomi. Timbulnya variabel yang mencerminkan corak tertentu dilandasi oleh indikasi tertentu pula. Variabel-variabel dan indikasi-indikasi tersebut yang menjadi sasaran dalam penelitian ini sehingga terungkap fakta sejarah Kota Jambi yang sesungguhnya. Contoh konkrit dalam masalah ini seperti peranan Sungai Batang Hari dalam bidang transportasi di mana sarana perhubungan melalui sungai pada mulanya merupakan satu-satunya sarana perhubungan vital antara Jambi dengan daerah-daerah lain, bahkan antara Kota Jambi dengan kota-kota lain dalam wilayah Jambi sendiri. Melihat potensi Sungai Batang Hari setiap permasalahan tentang Jambi tentu diungkapkan, sebab tiada Jambi tanpa Sungai Batang Hari. Dinamika perkembangan Kota Jambi di samping berkaitan erat dengan daerah-daerah luar, banyak ditentukan pula oleh kedudukan kota tersebut dalam struktur pemerintahan, sejak dari kerajaan, kesultanan, keresidenan sampai menjadi ibukota propinsi sebagai daerah otonom.



**PETA : LINGKUNGAN BAHASA & SUKU BANGSA
DI PROPINSI JAMBI**

BAB II JAMBI SELAYANG PANDANG

2.1 *Keadaan Alam dan Lingkungan*

2.1.1 *Keadaan Geografis*

Daerah Propinsi Jambi luasnya $\pm 54.008 \text{ Km}^2$ atau lebih kurang 5.400.800 hektar, membentang dari $0^\circ 45'$ sampai dengan $2^\circ 45'$ Lintang Selatan dan $101^\circ 10'$ sampai dengan 104° Bujur Timur.¹⁾

Batas-batas daerah Jambi dapat dilihat dari catatan-catatan tambo adat atau catatan sejarah klasik²⁾). Adapun menurut keadaan geografi batas-batas daerah ini adalah sebagai berikut: (1) sebelah utara dibatasi oleh Propinsi Riau dan Propinsi Sumatra Barat; (2) sebelah selatan dibatasi oleh Propinsi Sumatra Selatan; (3) sebelah barat dibatasi oleh Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatra Barat; dan (4) sebelah timur dibatasi oleh Selat Berhala.

Sebelum tahun 1957 daerah Jambi dikenal sebagai suatu daerah keresidenan dalam wilayah Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi daerah kekuasaannya ialah Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari dan Kotamadya Jambi. Sedangkan Kabupaten Kerinci (yang sekarang masih tergabung di dalam Kewedanaan Pesisir Selatan Kerinci.

Terbentuknya Jambi menjadi Daerah Otonom Tingkat I adalah berdasarkan Undang-undang No. 58 tahun 1958 yang merupakan gabungan dari undang-undang darurat yang mendahuluinya yaitu Undang-undang Darurat Nomor 10/1957 dan No. 21/1957. Dengan demikian ditetapkan pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Jambi dengan daerah-daerahnya meliputi bekas daerah Keresidenan Jambi³) kemudian diikuti pula dengan pengembangan daerah dalam wilayah Propinsi Jambi, yang masing-masingnya adalah: Kabupaten Bungo Tebo meliputi luas sekitar 14.290 km², dan Kabupaten Sarolangun Bangko 14.200 km², Kabupaten Batang Hari meliputi luas 11.200 km², Ketiga daerah tingkat dua ini merupakan daerah yang terluas dalam wilayah Propinsi Jambi, yang meliputi sekitar 73.05% dari keseluruhan daerah Propinsi Jambi.

Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung 10.287 km². Kabupaten Kerinci 3.847 km² dan yang tersempit adalah daerah kotamadya yang hanya meliputi 144 km².⁴) Enampuluh persen dari daerah Jambi terletak pada daerah dataran yang berawa rawa, sedangkan 40% dari luas daerah terdiri atas daerah pegunungan dengan ketinggian antara 500 sampai dengan 1600 meter dari permukaan laut.⁵) Pada umumnya daerah Propinsi Jambi beriklim tropis lembab dengan beberapa variasi kecil yang bergantung pada kelembaban nisbi dari masing-masing daerah lokasi.

Dari *Indonesia Island Waterways Flasiability Study* menunjukkan bahwa temperatur yang tertinggi di daeran Jambi adalah 31,5°C dan terendah 23,8°C dengan temperatur rata-rata 16,3°C.⁶) Pada musim kemarau yakni bulan Mei s.d. Oktober angin berembus dari timur ke barat. Pada saat ini hujan turun sangat sedikit. Sedang pada musim penghujan yang jatuh pada bulan Nopember s.d. Aapril angin berembus dari barat ke timur dan pada saat ini hujan turun cukup banyak, terutama di daerah bagian selatan pegunungan, yaitu bagian selatan Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Bungo Tebo dengan curah hujan

berkisar antara 2.500 – 4.000 mm per tahun. Sedangkan pada dataran rendah lainnya yang meliputi Kabupaten Batang Hari dan Tanjung Jabung adalah 2.000 – 3.000 mm per tahun.

2.1.2 *Tata Fisik*

Dilihat dari segi topografi, maka daerah Jambi pada umumnya dapat dikelompokkan kepada tiga bentuk wilayah, yaitu daerah rawa-rawa, dataran rendah kering dan daerah pegunungan. Daerah dataran rendah terbentang dari garis pantai di sebelah timur sampai jauh ke pedalaman, menuju ke arah barat dan selatan propinsi Jambi.

Daerah rawa-rawa terdapat hampir di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung dan sebagian Kabupaten Batang Hari. Daerah ini diliputi oleh nipah dan hutan bakau yang disela oleh hutan karet. Keadaan alam daerah ini dahulunya sangat menguntungkan bagi kegiatan penyelundup-penyelundup dan bajak laut dari luar negeri, terutama Singapura. Kini daerah ini sudah mulai dikembangkan menjadi daerah persawahan pasang surut yang menghasilkan padi dan perkebunan kelapa (kopra) yang diusahakan oleh rakyat.⁷⁾

Dataran rendah kering sebagian besar meliputi Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, dan sebagian Kabupaten Batang Hari. Daerah ini merupakan penghasil berbagai macam jenis kayu, rotan dan merupakan monokultur karet, yang merupakan hasil utama masyarakat dan juga merupakan sumber devisa daerah Jambi. Di beberapa tempat di dataran rendah kering ini terdapat puncak-puncak dengan ketinggian berkisar 50 s.d. 100 meter dari permukaan laut. Di sini banyak pula ditemui perkebunan karet rakyat atau yang lebih dikenal disebut hutan karet dan pertambangan minyak bumi. Di daerah dataran rendah ini pula mengalir sungai-sungai yang dapat dilayari kapal-kapal sampai jauh ke pedalaman. Sungai Batang Hari merupakan induk sungai-sungai yang mengalir di daerah Jambi, dan merupakan sungai terpanjang di Pulau

Sumatra. Sungai ini merupakan salah satu sarana yang penting dalam hidup perekonomian daerah Jambi, terutama buat lalu lintas, karena kebanyakan kota dan desa-desa dalam daerah ini berada di sepanjang aliran sungai.

Daerah dataran tinggi atau pegunungan meliputi daerah Kabupaten Kerinci sebagian daerah Kabupaten Bungo Tebo dan sebagian daerah Kabupaten Sarolangun Bangko. Hasil terutama dari daerah ini adalah teh, kopi, casiacera, tembakau, padi, sayur-mayur dan buah-buahan.

Walaupun dari beberapa daerah mempunyai spesifikasi hasil-hasilnya yang didasarkan kepada alam dan lingkungannya, namun dari keseluruhan alam dan lingkungan daerah Jambi, masih terlihat kebanyakan dari daerahnya belum tergarap sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara daerah hutan dan daerah tanah yang sudah digarap. Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dari keseluruhan daerahnya maka sekitar 86% masih berbentuk hutan dan baru sekitar 13,3% tanah yang telah diusahakan. Kabupaten Bungo Tebo tanah yang telah digarap sekitar 13,5% dan 56,28% daerah hutan, sedang selebihnya adalah daerah transmigrasi. Begitu pula dengan Kabupaten Batang Hari 85,67% tanahnya masih berbentuk hutan dan baru sekitar 14.13% tanahnya yang telah diusahakan.

Perbedaan hasil dari masing-masing daerah, di samping disebabkan oleh bentuk alam dan lingkungannya, maka faktor jenis tanah juga merupakan faktor utama yang membuat adanya perbedaan penghasilan dan kultur masyarakatnya.

Secara garis besar di Propinsi Jambi terdapat jenis-jenis tanah sebagai berikut:

- 1) Tanah alluvial, bahan induknya terdiri bahan alluvial dan fisiografinya alluvial dataran. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang aliran Sungai Batang Hari, dari Kabupaten Bungo Tebo sampai Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten

Sarolangun Bangko terdapat di sepanjang aliran Sungai Merangin dan Sungai Tembesi.

- 2) Tanah histosol, bahan induknya terdiri dari bahan alluvial dengan fisiografinya dataran. Jenis ini terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun Bangko.
- 3) Tanah latosol, bahan induknya batuan beku dan fisiografinya dataran vulkan. Jenis tanah semacam ini terbesar di Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko.
- 4) Tanah pedsolik merah kuning, bahan induknya batuan endapan dan fisiografinya dataran, jenis ini banyak terdapat di Kabupaten Batang Hari, sedikit di Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko.
- 5) Tanah andosol, bahan induknya batuan beku, dengan fisiografinya vulkan, jenis ini terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun Bangko dan sedikit di Kabupaten Bungo Tebo.
- 6) Tanah regosol, bahan induknya dari batuan beku dan fisiografinya vulkan. Jenis ini terutama menyebar di Kabupaten Kerinci dan sedikit di Kabupaten Sarolangun Bangko.

2.1.3 *Gunung-gunung*

Empatpuluh persen dari daerah Jambi terdiri atas dataran tinggi yang merupakan bagian dari Dataran Tinggi Bukit Barisan, yang terdapat di sebelah barat Propinsi Jambi meliputi semua wilayah Kabupaten Kerinci, sebagian Kabupaten Bungo Tebo dan sebagian Kabupaten Sarolangun Bangko.

Daerah Dataran Tinggi Kerinci merupakan daerah paling subur di Propinsi Jambi, sedang dataran tinggi lainnya masih merupakan daerah hutan. Pada daerah dataran tinggi tersebut terdapat puncak-puncak gunung yang terkenal antara lain:

- a. Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 m.
- b. Gunung Masuri dengan ketinggian 2.993 m.
- c. Gunung Tujuh dengan ketinggian 2.605 m.
- d. Gunung Raya dengan ketinggian 2.550 m.
- e. Gunung Alas dengan ketinggian 2.050 m.⁸⁾

2.1.4 *Sungai-sungai*

Jalur perhubungan air di Jambi merupakan perhubungan yang vital karena di tepi-tepi sungai banyak terdapat perkampungan penduduk dan sebagian besar penghasilan penduduk dari pedalaman pun di bawa melalui sungai ke pasar di Jambi. Di samping itu sungai tersebut merupakan pula sumber alam yang kaya akan hasil ikannya yang banyak dan sumber pengairan abadi daerah dataran rendah pasang surut yang sangat subur untuk pertanian. Di antara sungai-sungai itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sungai Batang Hari; panjang \pm 450 km, lebar di muara \pm 500 m, dan di Kota Jambi \pm 300 m, dengan kedalaman 5–15 m pada musim kering dan 10–30 meter pada musim penghujan. Sungai ini merupakan induk dari sebagian besar sungai-sungai yang mengalir dalam daerah Propinsi Jambi. Sungai Batang Hari dapat dilayari kapal-kapal besar sampai jauh ke pedalaman dengan tenaga minimal 400 ton. dan maximal 1.000 ton.
- 2) Sungai Batang Tembesi; panjangnya \pm 210 km, lebar di muara yaitu di kota Tembesi 250 m, dan di hulu \pm 30 m, dapat dilayari oleh kapal motor gandengan dengan tenaga 40 s.d. 80 ton, sejauh 80 km ke daerah hulu. Damnya pada musim kering 2–5 m sedangkan pada musim penghujan 5–10 m. Sungai ini bermuara di Batang Hari.
- 3) Sungai Batang Merangin; panjangnya \pm 250 km, lebar di muara 120 m di hulu 10–20 m, dengan kedalaman 5–7 m, yang dapat dilayari sampai ke Kota Bangko dengan kapal motor gandengan, dengan tenaga 30–70 ton. Sungai ini bermuara di Sungai Tembesi dan berhulu di Danau Kerinci.

- 4) Sungai Batang Tebo; sungai ini bermuara di Kota Muara Tebo, masuk ke Batang Hari, panjangnya \pm 100 km, lebar di muara 100 m dan dalamnya 5–7 m, dapat dilayari sejauh 50 km ke hulu.
- 5) Sungai Barang Bungo; sungai ini bersambung dengan Sungai Batang Tebo panjangnya \pm 90 km, lebar di muara yaitu di Kota Muara Bungo 75 m dan dalamnya 1–3 m.

Selain sungai-sungai tersebut masih banyak anak-anak sungai lainnya seperti: Batang Tabir, Batang Pelepat, Batang Masumai, Batang Asal. Semua sungai-sungai beserta anak-anak sungai lainnya, alirannya bersatu menuju ke sungai Batang Hari yang salah satu hulunya berada di salah satu danau, dalam wilayah Sumatra Barat.⁹⁾

Di samping itu masih terdapat beberapa sungai yang bermuara langsung ke Selat Berhala yaitu:

- 6) Sungai Tungkal; bermuara di Teluk Tungkal, tepatnya di Kota Kuala Tungkal, sungai ini berhulu di Pegunungan Tiga Puluh.
- 7) Sungai Mendahara; sungai ini mengalir diantara Sungai Batang Hari dengan Sungai Tungkal dan bermuara di Selat Berhala.¹⁰⁾

2.1.5 *Hutan*

Lebih kurang 82,3% dari luas Propinsi Jambi terdiri dari daerah hutan, hutan-hutan itu terbagi atas :

- 1) Areal hutan lindung dan suaka alam;
- 2) Areal hutan cadangan, hutan ini disediakan untuk produksi atau pembukaan daerah pertanian; dan
- 3) Areal hutan sekunder dan padang alang-alang.

Di daerah ini juga terdapat hutan suaka alam, yaitu Hutan Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung dan Hutan Kerinci di Indrapura. Kedua hutan tersebut terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Sumatra Barat, di lereng Gunung Kerinci

sebelah barat. Mengenai perincian dan letak ketinggian hutan dari permukaan laut, beserta perkiraan luas masing-masing sebagai berikut:

- 1) 0 s.d. 500 meter dari permukaan laut seluas 3.458.430 hektar.
- 2) 500 s.d. 1000 meter dari permukaan laut seluas 36.000 hektar.
- 3) 1000 s.d. 1500 meter dari permukaan laut seluas 178.070 hektar.
- 4) 1500 s.d. keatas dari permukaan laut seluas 25.000 hektar.

Dari hutan seluas itu terdapat bermacam-macam sumber kekayaan alam antara lain kayu, rotan, damar, bambu dan berbagai macam binatang.

Dari hasil perakyaan telah menarik pengusaha-pengusaha kayu asing dan nasional untuk melakukan kegiatannya di daerah ini, kemudian kayu tersebut di samping untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam daerah juga diekspor ke luar negeri. Adapun jenis kayu-kayu tersebut di samping kayu meranti, juga terdapat jenis kayu bulian dan kayu balam sejenis kayu besi dan lain-lain.¹¹⁾

2.2 *Perkembangan Demografi*

Dari beberapa catatan sejarah Jambi, perkembangan kependudukan di daerah ini maka terlihat bahwa daerah Jambi telah lama dijamah dan didiami baik oleh penduduk asli Jambi maupun para pendatang. Baik itu pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia asli, ataupun mereka yang datang dari beberapa Negara yang berstatus sebagai warga negara asing.

Menurut catatan penduduk di Jambi yang pertama dijumpai pada tahun 1920, di mana pada tahun tersebut daerah Jambi sudah didiami sejumlah 164.618 orang penduduk dengan berbagai suku bangsa, dan sebagian terbesar di antaranya adalah

penduduk asli Jambi yaitu sebanyak 161.050 orang, selanjutnya orang asing terdiri dari Cina sebanyak 2.782 orang, orang Eropa atau yang dipersamakan dengan mereka berjumlah 197 orang dan orang-orang asing Asia lainnya berjumlah 589 orang, yang kebanyakan di antara mereka adalah orang Arab dan orang India.

Berikutnya menurut catatan tahun 1930, jumlah penduduk Jambi meningkat menjadi 245.272 orang, hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk selama 10 tahun sekitar 3,5% dan daerah terpadat penduduknya adalah Jambi, yang sekarang dikenal dengan Kotamadya Jambi, yaitu sekitar 85.801 orang, sedangkan pada tempat-tempat lainnya hampir merata, yaitu sekitar 31.894 orang lebih lanjut mengenai perkembangan penduduk antara tahun 1920 dengan tahun 1930 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1

**JUMLAH PENDUDUK DAERAH JAMBI MENURUT
ASAL SUKU BANGSA DAN KELAMIN
TAHUN 1920 DAN 1930**

No.	Suku Bangsa	1920		1930	
		laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan
1.	Pribumi	79.939	81.111	120.386	114.147
2.	Eropa/yang dipersamakan	127	70	290	205
3.	C i n a	2.089	693	5.959	2.884
4.	Orang asing Asia lainnya	308	281	793	608
J u m l a h		82.463	82.155	127.428	117.884

Sumber: Sensus penduduk tahun 1930.

Jika dilihat dari segi pendapatan penduduk, secara keseluruhan pada Keresidenan Jambi tahun 1930 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2

**DISTRIBUSI DAN KEPADATAN PENDUDUK
KERESIDENAN JAMBI TAHUN 1930**

No.	Onderrafddling	Penduduk	Luas daerah (km ²)	Kepadatan
1.	Jambi	85.804	17.412,2	4,93
2.	Ma. Tembesi	29.048	5.900,6	4,92
3.	Ma. Tebo	26.782	6.837,2	3,92
4.	Bangko	34.645	7.196,3	4,81
5.	Ma. Bungo	36.366	4.263,8	8,53
6.	Sarolangun	32.627	3.313,8	9,85
J u m l a h		245.272	48.923,9	36.96

Sumber: Sensus penduduk tahun 1930

Sedangkan distribusi penduduk dari suatu periode ke periode berikutnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3

**DISTRIBUSI PENDUDUK DAN PERKEMBANGANNYA
TAHUN 1961 – 1978**

No.	Kabupaten/ Kotamadya	1961	1961	1975	1976	1977	1978
1.	Tanjung Jabung	117.340	215.496	234.907	273.034	196.986	201.530
2.	Batang Hari	134.110	160.076	180.632	183.723	187.081	192.519
3.	Sarko	111.667	143.357	167.700	172.745	185.941	286.036
4.	Bungo Tebo	111.443	141.981	161.201	167.329	179.112	189.605
5.	Kerinci	155.874	186.615	210.527	216.760	222.101	231.633
6.	Kodya Jambi	111.080	158.559	182.411	193.568	173.248	174.322
J u m l a h		742.514	1.006.084	146.378	1.207.159	1.245.045	1.275.645

Sumber :

Data-data kependudukan di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk daerah Jambi cukup cepat, dengan pertumbuhan rata-rata 3,33%. Akan tetapi dari tabel-tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk itu tidaklah merata pada semua daerah dari lima kabupaten dan satu ko-

tamadya di daerah Jambi maka terlihat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk paling cepat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4

**JUMLAH LUAS DAERAH, PENDUDUK DAN RATA-RATA
PENDUDUK/KM2 DI SETIAP KABUPATEN DAN KOTAMADYA
TAHUN 1976**

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Luas Daerah (KM2)	Jumlah Penduduk	Rata-rata (KM2)
1.	Tanjung Jabung	10.200	273.034	27
2.	Batang Hari	11.200	183.723	16
3.	Sarko	14.200	172.745	12
4.	Bungo Tebo	13.330	167.329	13
5.	Kerinci	4.200	216.760	52
6.	Kotamadya Jambi	136	193.568	1.426
Jumlah		53.266	1.207.159	

Sumber:

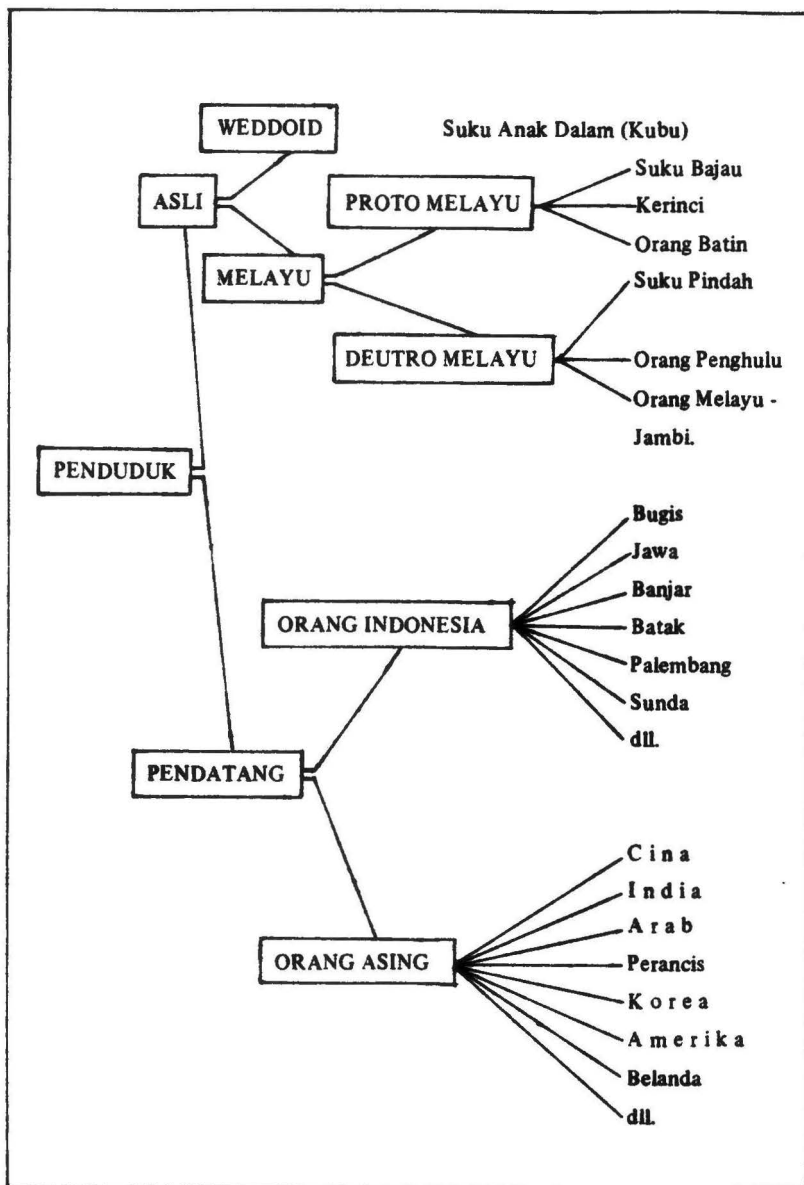
Tabel ini juga memperlihatkan bahwa jumlah rata-rata penduduk per km² tidak sama, hal ini dikarenakan bahwa ada tiga daerah yang mempunyai penduduk lebih rapat dari yang lainnya, yaitu Kotamadya Jambi 1.426, Kerinci 52 dan Tanjung Jabung 27, hal ini dapat diartikan bahwa arus urbanisasi di daerah Jambi masih sangat kuat. Sedang daerah Kerinci dan Tanjung Jabung yang merupakan daerah subur, memperlihatkan bahwa penduduknya relatif dapat bertahan, hal ini dikarenakan faktor alam yang dimilikinya. Di samping itu Kotamadya Jambi yang mempunyai kepadatan penduduk melebihi jauh dengan daerah-daerah lain, disebabkan karena daerah Kotamadya Jambi adalah ibu kota propinsi, sehingga di samping sebagai pusat aktivitas perdagangan dan kemasyarakatan, Kotamadya Jambi adalah merupakan pusat pemerintahan yang kesemuanya itu akan mengundang pertumbuhan penduduk pendatang dari luar daerah yang cukup tinggi.

2.3 *Keragaman Penduduk*

Seperti halnya asal-usul beberapa suku bangsa di Indonesia bahwa Ras Melayu dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia anggapan yang demikian juga dianut oleh para ahli, yang menyatakan bahwa orang Jambi pada umumnya berasal dari Ras Melayu. Dalam keterangannya, H. Idris Ja'afar, SH. menjelaskan bahwa Ras Melayu ini dapat dibedakan atas Melayu Tua atau Proto Melayu, dan Melayu Muda atau Deutro Melayu.^{1 2}) Kedua-duanya merupakan asal usul orang Jambi. Tentang sejak kapan kedua suku bangsa ini mulai menetap di Jambi belum ada yang dapat memastikan, sebagian besar pendapat baru bersipat perkiraan belaka, lebih lanjut H. Idris Ja'far menyebutkan bahwa orang-orang Melayu Tua (Proto Melayu) datang ke daerah Jambi sekitar tahun 3500 SM dan orang Melayu Muda (Deutro Melayu) diperkirakan sampai di daerah Jambi sekitar tahun 350 SM.

Skema.....

SKEMA DEMOGRAFI PENDUDUK DAERAH JAMBI



Mengenai perbedaan kedua ras ini, Mr. Ali Basya Lubis menyebutkan bahwa yang termasuk Melayu Tua ialah suku-suku bangsa yang kebudayaannya sangat sedikit bercampur dengan kebudayaan asing, sedangkan Melayu Muda ialah suku-suku bangsa yang kebudayaannya sudah agak banyak bercampur dengan kebudayaan Hindu, Islam dan sebagainya.¹³) Kemudian kedua suku bangsa ini dianggap sebagai penduduk asli daerah Jambi, sedangkan semua suku bangsa yang datang kemudian baik mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia maupun yang datang dari negara-negara lain dianggap sebagai penduduk pendatang.

Di dasarkan kepada pluralisasi masyarakatnya, maka keragaman penduduk daerah Jambi dapat dilihat dari kelompok-kelompok yang didasarkan kepada ikatan geneologis dan ada pula yang didasarkan kepada teritorial, bahkan ada pula yang menganut keduanya. Kenyataan yang demikian akan lebih nyata bila dilihat lebih dalam pada kenyataan-kenyataan sosial yang berkembang dan berlaku di daerah-daerah khususnya di Kota Jambi. Masyarakat kota pada dasarnya dapat digolongkan kepada dua kelompok besar yaitu kelompok penetap atau penduduk asli dan kelompok pendatang.

1) Penduduk Asli

Dari suku bangsa-suku bangsa yang merupakan penduduk asli daerah Jambi terdiri atas: suku bangsa Kubu, suku bangsa Bajau, Batin, Kerinci, Penghulu, suku bangsa Pindah dan suku bangsa Melayu.¹⁴)

a) Suku bangsa Kubu

Suku bangsa Kubu atau dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam, yang secara antropologi berasal dari suku bangsa Weida. Mereka hidup masih dalam keadaan terasing, sehingga tingkat kebudayaannya pun masih sangat sederhana sekali, mereka hidup dalam suatu kelompoknya sendiri dan tidak banyak mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya, kalau pun terdapat hubungan dengan masyarakat lain itu pun dengan

melalui seorang perantara yang disebut jenang. Namun dalam perkembangan selanjutnya suku kubu atau suku anak dalam hal ini dapat dikelompokkan pada:

- (1) Suku bangsa Kubu yang masih mengembara, kelompok ini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan masyarakat lain, mereka masih hidup mengembara dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Suku anak dalam golongan ini terdapat empat kabupaten yaitu:
 - Kabupaten Batang Hari, tempat di sekitar Sungai Ulu Bahar, Burung Hantu, Jangga, Markanding, Bulian, Sekamis, Jebak, Panerokan, dan Sungai Lisak.
 - Kabupaten Sarolangun Bangko, terdapat di sekitar Sungai Makalele Air Hitam, Tabir, Limbur, Tembesi, Batang Asai, Sakalodo Jernang, Tanjakan, Merak dan Pemenang.
 - Kabupaten Bungo Tebo, terdapat di sekitar Sungai Bengkal, Tanah Garo, Tambun Arang, Talentang, dan Pengambiran.
 - Kabupaten Tanjung Jabung, terdapat di sekitar Lubuk Kambing dan Tungkal Ulu.
- (2) Suku Kubu setengah mengembara, yaitu suatu kelompok suku anak dalam yang pada dasarnya sudah mempunyai kontak kebudayaan dengan kebudayaan masyarakat lainnya dan mereka ini sebagian telah memasuki perkampungan yang disediakan oleh Departemen Sosial, namun mereka masih enggan untuk menetap di dalamnya. Mereka memasuki perkampungan tersebut hanya sekedar untuk mencari bahan kebutuhan mereka dan setelah itu mereka keluar dari perkampungan tersebut.
- (3) Suku bangsa Kubu yang menetap, yaitu orang-orang Kubu yang telah menetap dalam perkampungan yang disediakan oleh Departemen Sosial atau di kampung-kampung lainnya dan mereka ini telah mempunyai kontak kebudayaan dengan masyarakat lain.

Mengenai pemukiman suku Kubu setenah mengembara dan menetap pada tiga daerah kabupaten, yaitu:

- Kabupaten Batang Hari, terdapat di Bungku, Bukit Tembesi, Ladang Parisi, Palembang, Nyogan, Jantung menggaris, dan Panerokan.
- Kabupaten Sarolangun Bangko, terdapat di Tanjung dan Kembang Bungo.
- Kabupaten Bungo Tebo, terdapat di Gurun dan Ulu Talenta.^{1 5)}

Berbagai bentuk adat suku Bajau ini sangat menarik untuk dikembangkan dalam penelitian lainnya, seperti bentuk-bentuk upacara keagamaan, penerimaan anggota baru, tentang upacara kelahiran, kematian dan lain-lain. Mengenai mata pencaharian utama suku Bajau ini adalah mencari ikan.

- b) Orang Batin, suku bangsa ini tinggal dalam wilayah Kabupaten Bungo Tebo dan Sarolangun Bangko. Menurut berbagai anggapan bahwa orang Batin ini didasarkan kepada adat istiadat, bentuk-bentuk kekerabatan dan pembagian harta peninggalan mempunyai kesamaan-kesamaan dengan orang Kerinci. Diperkirakan orang Batin ini berasal dari daerah Kerinci yang berpindah kedataran rendah di sebelah timur Bukit Barisan pada yang terjadi pada sekitar abad pertama tahun masehi.
- c) Orang Kerinci, penduduk Kerinci adalah merupakan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Kerinci. Mereka hidup pada suatu daerah yang subur sehingga dapat menambah kemudahan dalam mengolah tanahnya, hal ini juga menjadikan orang Kerinci rajin dalam bertani. Maka tidak mengherankan jika hasil padi/berasnya setiap tahun selalu berlebih dari kebutuhan rakyatnya. Hasil-hasil pertanian yang lain di samping hasil buah-buahan dan sayur mayur, di sana terkenal pula dengan hasil tanaman eksportnya seperti teh, kopi, cengkih, karet, kayu manis (*cassia-*

vera) dan lain-lain. Di dalam kehidupan masyarakat Kerinci, mereka mempunyai dialek tersendiri yang berlainan dengan daerah-daerah lain, begitu juga masalah adat resamnya juga mempunyai perbedaan-perbedaan dengan daerah-daerah lain dalam Propinsi Jambi.

- d) Orang Penghulu, orang ini berasal dari Minangkabau dan mereka tinggal di sekitar daerah orang Batin. Mereka datang ke Jambi karena tertarik oleh pencaharian mas yang banyak terdapat di hulu Sungai Batang Hari, yang akhirnya kebanyakan dari mereka banyak mendiami daerah-daerah seperti Batang Asai, Pangkalan Jambu, Limun, Ulu Tabir, Tinting, Nibung dan beberapa tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko.
- e) Suku Pondah, sesuai dengan namanya suku ini adalah merupakan pindahan dari daerah Sumatra Selatan yang berbatasan dengan Jambi, yaitu daerah Rawas dan Rupit I. Mengenai sebab-sebab yang mendorong kepindahan mereka dari tempat asalnya ke daerah Jambi tidak banyak diketahui dengan pasti. Kebanyakan dari mereka bertempat tinggal di daerah Pauh dan Mandiangin dalam wilayah Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun Bangko.
- f) Orang Melayu, Jambi orang Melayu di daerah ini tinggal di sekitar Sungai Batang Hari, yang meliputi daerah Kabupaten Tanjung Jabung, Kotamadya Jambi, Kabupaten Batang Hari dan sebagian di daerah Kabupaten Bungo Tebo; mereka ini merupakan penduduk inti dari Kesultanan Jambi di masa Jambi hidup dalam zaman kerajaan. Orang Melayu Jambi ini terdiri atas 12 suku atau juga dikenal dengan sebutan Kalbu yang 12. Pembagian masyarakat Jambi dalam 12 suku itu dimulai sejak pemerintahan orang Kayu Hitam, yang memerintah sekitar tahun 1500.¹⁶⁾

Orang-orang Melayu Jambi ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang nyata dari suku-suku lainnya, hal ini dise-

babkan karena orang Melayu Jambi hidup di sekitar Sungai Batang Hari yang dapat dilayari hingga jauh ke pedalaman, maka daerah itu juga merupakan daerah bandar perdagangan yang memungkinkan daerah ini sebagai pusat pengembangan agama Islam di Jambi.

2) Penduduk Pendatang

Yang dimaksud adalah orang-orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti orang Jawa, Palembang, Minangkabau, Tapanuli, Banjar, Bugis, dan daerah-daerah lainnya. Kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota besar, kecuali orang Minangkabau yang hampir merata mendiami seluruh daerah dalam Propinsi Jambi. Mereka kebanyakan hidup sebagai pedagang dan ada juga yang berkebun karet.

Orang Jawa kebanyakan mendiami daerah-daerah transmigrasi dan daerah perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, karet dan ada juga yang di daerah pertambangan minyak. Sedang orang-orang Bugis dan Banjar, terutama mendiami daerah Kabupaten Tanjung Jabung, dan Batang Hari. Mereka kebanyakan hidup sebagai petani dan persawahan pasang surut dan perkebunan kelapa.

Yang tergolong penduduk pendatang lain ialah orang-orang asing yang datang dan bertempat tinggal di beberapa daerah dalam Propinsi Jambi. Mereka terdiri atas orang Cina, orang Arab, orang India, dan berbagai orang-orang asing lainnya dalam jumlah yang sedikit. Mereka ini terdiri atas orang Belanda, Perancis, Korea, Jepang, dan Amerika yang bekerja pada perusahaan-perusahaan asing di daerah Jambi.

Di antara orang-orang asing ini ada beberapa orang yang telah berasimilasi dengan penduduk setempat, seperti orang Arab dan India. Hal ini dikarenakan adanya persamaan agama yang dianut oleh orang-orang tersebut dengan penduduk asli Jambi. Sedangkan orang Cina merupakan orang asing yang terbanyak di daerah ini dan memegang peranan dalam masalah ekonomi,

bahkan hampir semua sektor perekonomian dipegang oleh orang-orang Cina. Karena adanya perbedaan agama dan kepercayaan serta tingkat perekonomian, maka mereka belum dapat berasimilasi dengan penduduk setempat.

CATATAN

1. *Monografi Daerah Jambi*, Jilid II, Departemen P dan K RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, t.t, hal. 30, bandingkan dengan, Djamaluddin Yambunan, *Jambi yang menanti jamahan*, 1979. Bandingkan pula dengan, *Menyeluk daerah Propinsi Jambi*, hasil survey Proyek Rehabilitasi dan perluasan Museum Jambi, 1977/1978.
2. Letak daerah Jambi dapat pula dilihat, sesuai dalam catatan tambo adat dengan perjalanan Datuk Ketemenggungan dan Datuk Peperpatih Nan Sebatang.
 - a. *Perjalanan Datuk Ketemenggungan*, dari Lubuk Sekubung Muara Jambi, terus ke Bukit si-Guntang-guntang antara Jambi Palembang, ke-Serintik hujan Paneh, terus ke-Gedung Terbakar batu Lentik elang menari, meniti Bukit Barisan sampai ke Pauh manis masam sebelah, terus ke Muara Sawo, ke Ibu Buih, laju ke batu bergombak sarang keteki terus ke Tengku Raden Indrapura sampai ke Muara Labuh.
 - b. *Perjalanan Datuk Perpatih Nan Sebatang*, mulai mendekati gunung merapi meniti pematang Mandiangin, terus ke Lurah Ulu beno, bertampuk ke bukit Gombakbetangkai kebukit Lipo berbadi batang hari bebetok buluh

sekasok mudik rantau Semabu, hilir kerantau Limau Kapeh mudik kerantau Limau Purut, sampai kedurian bertakuk Rajobelah Muara Labuh batas Jambi dengan Minangkabau (Tanjung Samalidu) terus ke Sialang Belantak besi sampai Serentak Air Hitam, sekalian air bugis terus ke Selat Berhala kembali ke ujung Jabung bertemu Lubuk Sekubung Muara Jambi.

3. Perjuangan untuk merobah Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I sebenarnya sudah tercermin semenjak revolusi physiik, hal ini dapat kita lihat dari perjuangan rakyat antara lain:
 - a. Sidang-sidang Komite Nasional Indonesia Jambi tahun 1946.
 - b. Sidang DPRD Keresidenan Jambi tahun 1947–1948–1951–1952 dan tahun 1953.
 - c. Resolusi-resolusi rakyat Jambi dan pengiriman Delegasi-delegasi ke Jakarta yaitu tahun 1950–1951–1952 dan 1953.
4. Lihat hasil kerja, *Team Pendataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekwilda Kabupaten/Kotamadya*, Daerah tingkat II dalam Propinsi Dati I Jambi 1983, Bandingkan dengan luas daerah dalam monografi, *Loc cit*, lihat peta Propinsi Jambi.
5. Lihat Monografi, mengenai tinggi beberapa daerah dalam Propinsi Jambi diukur dari permukaan laut sebagai berikut:

Tempat pengukuran	Tinggi dari permukaan laut
Muara Sabak	4 Meter
Kota Jambi	10 Meter
Lubuk Ruso	11 Meter
Sungai Tiga	28 Meter
Paal Merah	85 Meter

Muara Tebo	26 Meter
Pulau Temiang	26 Meter
Muara Bungo	80 Meter
Rejo Sari	82 Meter
Sarolangun	37 Meter
Sungai Penuh (Kerinci)	800 Meter
Anggara Agung	790 Meter

6. Jamaluddin Tambunan, *Op cit*, 19.
7. Sejak dibukanya lokasi Transmigrasi oleh Pemerintah maka daerah Tanjung Jabung merupakan penghasil padi di daerah Jambi.
8. Selain dari gunung-gunung tersebut, masih terdapat pula sebanyak \pm 30 pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 300 s/d 700 Meter, diantaranya Gunung Gajah, Gunung Patah Sembilan, Gunung Kunyit dan Gunung Talang. (Monografi Daerah Jambi), hal. 34).
9. Lihat Martinus Nijhof, *Emcychopaeditvan Nederlandsch*, Jilid I, Gkovenhage, 197 hal. 608.
10. *I b i d*.
11. Lihat tabel usaha perkayuan di daerah Jambi.
12. H. Idris Ja'far, SH, Dosen Fakultas Hukum UNJA, *wawancara*, 16-9-1983.
13. Menyeluk, *Op cit*, hal. 15.
14. Lihat Monografi daerah Jambi, tentang kelompok Etnis dan Logat, bandingkan pula dengan Pembinaan bersama kehidupan pada masyarakat suku anak dalam di Jambi, team penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1980.
15. Data diperoleh dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jambi, tahun 1977.

16. Syamsir Salam, *Dari Cerita rakyat hingga timbulnya bentuk-bentuk kekerabatan di Pesisir Daerah Jambi dalam kaitannya dengan Penelitian Sejarah*, kertas-kertas kerja, tahun 1980, hal. 24. Bandingkan dengan *Monografi daerah Jambi*, Jilid I, Departemen P & K RI 1976, hal. 8, bandingkan pula dengan *Pembagian Persukuan, Jambi dalam zaman raja beraja-raja*, Kementerian Penerangan, Republik Indonesia tentang Sumatra Tengah, tahun 1954, hal. 1017.

BAB III JAMBI DALAM LINTASAN SEJARAH

3.1 *Bandar Niaga Melayu*

Kota Jambi yang dikenal dengan Kerajaan Melayu Jambi, keadaan alamnya yang dialiri oleh Sungai Batang Hari sangat menguntungkan bagi sarana lalu lintas sungai.

Pada zaman keemasan Kerajaan Melayu abad ke-14, Jambi terkenal sebagai bandar niaga Melayu Jambi yang merupakan pelabuhan pengekspor hasil rempah-rempah, lada, cengkih karet dan hasil bumi lainnya. Letak Pelabuhan Melayu secara geografis sangat ideal dan memegang posisi kunci dalam perhubungan Laut Cina dan India yakni sebagai mata rantai dari jalan laut perniagaan Asia pada masa itu. Hal ini dikarenakan letak Jambi di depan ujung selatan Jazirah Malaka dan merupakan jarak terpendek dalam perhubungan dari Cina ke Selat Malaka yang harus melalui Pelabuhan Jambi. Di samping itu pelabuhan ini memiliki kondisi ideal untuk pelabuhan samudra, hal ini karena letaknya pada pintu gerbang keluar masuk Selat Malaka.

Suatu catatan sejarah membuktikan, dari karya-karya I Tsing berasal dari Negeri Cina yang mengadakan perlawatannya ke India, pernah menetap di Melayu selama dua bulan dan kembalinya dari India tahun 685 juga singgah di Melayu, dengan

jelas ditunjukkan rute utama pelayaran Cina – India yang mau tak mau melalui Kerajaan Melayu. Pelabuhan Melayu merupakan tempat berlabuh kapal-kapal dari Selat Malaka yang akan menuju Cina sambil menunggu datangnya angin barat daya. Sebaliknya kapal-kapal dari laut Cina yang akan berlayar menuju India, Persia, Arab dan negeri-negeri di sebelah barat, singgah dan berlabuh di Pelabuhan Melayu sambil menunggu tibanya angin timur laut (angin musim). Sebagai tempat singgah dan berlabuhnya kapal-kapal yang melakukan perniagaan, dengan mudahnya Pelabuhan Melayu menjadi bandar pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai pusat pertukaran barang-barang dari seluruh Nusantara, Persia, Arab, India dan Cina. Kerajaan Melayu sendiri terkenal dengan hasil-hasilnya seperti emas dan lada. ¹⁾

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa Pelabuhan Melayu memegang kunci dalam perhubungan laut antara Cina ke India dan sebaliknya. Ia merupakan pintu gerbang ke luar masuk Selat Malaka, tempat berlabuhnya perahu-perahu dari Selat Malaka menuju Negeri Cina sambil menunggu datangnya angin barat daya. Begitu juga perahu-perahu dari Negeri Cina yang akan melalui Selat Malaka menuju India, dan negeri barat lainnya, singgah di Melayu sambil menunggu datangnya angin timur laut. Dilihat dari kesibukan lalu lintas dan ditinjau dari segi perdagangan, letak Pelabuhan Melayu Jambi sangat menguntungkan. Karena memiliki posisi penting sebagai pelabuhan internasional, yang dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan di Nusantara khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya, baik dalam bidang perekonomian kebudayaan maupun politik.

Dalam bidang perekonomian/perdagangan, Pelabuhan Melayu Jambi berfungsi sebagai pelabuhan transito yang sangat ramai, ia merupakan pusat pertukaran barang-barang dari dalam negeri dengan barang-barang dagangan dari luar seperti dari Cina, India, Arab, Persia dan lain-lain. Dalam bidang kebudayaan, pernah disebut-sebut dalam pemberitaan Arab dan Cina bahwa ketrampilan dan tehnologi pelayaran suku Melayu sudah

terkenal sejak dahulu, sehingga dengan ketrampilan dalam bidang pelayaran ini telah membawa bangsa Melayu mengenal negeri-negeri lain. Dan kota-kota disepanjang sungai Batang Hari tumbuh sebagai kota-kota yang ramai dan kaya di Asia Tenggara. Bahkan dikenal oleh negara-negara lain seperti Cina dan Arab, sebagai negara terkenal dan terkaya di perairan Asia Selatan.

Sungai Batang Hari yang bermuara ke Selat Berhala, merupakan sarana yang menghubungkan daerah pedalaman Jambi dengan pusat-pusat ekonomi politik dan kebudayaan di Asia bahkan Afrika. Lada, cengkik, karet dan jenis barang niaga lainnya adalah daya penarik bagi pedagang-pedagang dari negara tetangga untuk betah bermukim di daerah ini. Karena itu hubungan sosial budaya mereka dengan penduduk asli menjadi intim. Pedagang dari India yang umumnya menganut agama dan kebudayaan Budha, sambil berdagang mereka juga berperan sebagai juru penyebar agama dan kebudayaan Budha bahkan besar kemungkinan di antara mereka banyak yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat.

Dari berita-berita Negeri Arab lama pernah juga menyebut tentang Kota Sabak (Muara Sabak) sebagai bandar lada di perairan Selat Sumatra yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang Arab sambil membina masyarakat Islam.

Sebagaimana disebutkan di atas, sebagai bandar penghubung dengan dunia luar Melayu Jambi sudah dikenal sebagai pelabuhan yang teramai di Asia Tenggara. Karena itu tidaklah terlalu janggal bila banyak dilihat pada penduduk barang-barang peninggalan keramik Cina yang tampaknya sudah sangat tua. Nama sebuah kampung yang oleh penduduk disebut Pacinan yang terletak di seberang Kotamadya Jambi dan juga dengan beberapa buah patung terbuat dari batu yang oleh penduduk disebut patung babi. Sedang di daerah pantai sebelah timur, beberapa bentuk khusus dari bagian-bagian rumah, yang mengarah kepada bentuk bagian dari klenteng Cina, ini

semua dapat pula menjadi petunjuk betapa eratnya hubungan kebudayaan antara daerah Jambi dengan Cina.

3.2 *Zaman Kesultanan Jambi*

Sejak pemerintahan orang Kayo Hitam (1500–1515), agama Islam berkembang dengan pesat dan secara resmi orang Kayo Hitam mengumumkan agama Islam menjadi agama dalam Kerajaan Jambi dan mengharuskan penduduk menganut agama Islam. Sejak masa ini struktur pemerintahan, adat dan tata kehidupan masyarakat bersendi kepada agama Islam.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila gelar yang dipakai raja-raja Jambi sesudah masa ini adalah "panembahan", dan kemudian "sultan". Undang-undang pemerintahan yang disebut "Pucuk Undang Nan Delapan" juga didasarkan atas agama Islam. Dalam hal adat kiranya pepatah adat: "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah", menunjukkan betapa kuatnya hubungan atau jalinan adat dan agama Islam. Di dalam tata kehidupan masyarakat sejak masa ini mulai tampil peranan golongan baru, para alim ulama.²)

Interaksi Kerajaan Jambi dengan Belanda terjadi sejak masa pemerintahan Pangeran Kedak gelar Sultan Abdul Kahar (1615 – 1643). Pangeran Kedak merupakan raja pertama kerajaan Jambi yang memakai gelar "sultan", dan ia pula yang menetapkan secara resmi Kerajaan Jambi disebut Kesultanan Jambi. Pada tahun pertama pemerintahannya yakni tahun 1615, datang rombongan Belanda yang pertama ke Jambi dipimpin oleh Abraham Streck dengan dua kapal, Wapen Amsterdam dan de Middelburg. Setahun kemudian Abraham Streck telah mendapat izin dari Sultan Abdul Kahar untuk mendirikan kantor dagang VOC di Muara Kumpeh, namun karena sulitnya memperoleh hasil hutan dan lada dari penduduk terpaksa ditutup pada tahun 1625. Belanda kembali lagi membuka kantor dagang di Jambi pada tahun 1636, karena mengetahui adanya perselisihan antara sultan Jambi dan sultan Johor yang menuntut penyerahan Negeri Tungkal, dan ingin menarik keuntungan dari perselisihan

itu. Kantor dagang VOC tahun 1636 ini dipimpin oleh Hendrik Van Gont, yang pada tahun 1642 menuduh sultan Jambi memihak Sultan Agung dari Mataram, musuh besar VOC. Tuduhan ini disangkal keras oleh Pangeran Depati Anom dan menyatakan bahwa Jambi tidak mempunyai hubungan dengan Mataram. Sehubungan dengan ini Gubernur Jenderal Antonie van Diemen memberi surat peringatan kepada sultan Jambi bahwa Belanda akan mengangkat senjata terhadap Jambi apabila turut serta sebagai musuh Belanda.³)

Tidaklah mengherankan ketika Depati Anom naik tahta tahun 1643 dengan gelar Sultan Abdul Jalil biasa disebut Sultan Agung yang sedang menghadapi perselisihan dengan sultan Johor dan adanya tekanan dari Belanda terpaksa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Belanda dalam bidang perdagangan dan pemerintahan. Dengan demikian Anries Dogart Ploeg, kepala kantor dagang VOC di Jambi mulai turut mencampuri urusan ekonomi dan pemerintahan di Jambi.⁴)

Politik adu domba dilakukan Belanda pada masa pemerintahan Raden Penulis gelar Sultan Abdul Mahji biasa disebut Sultan Sri Ingalogo (1665 – 1690). Perang antara Johor dengan Jambi terjadi pada tahun 1667, Belanda (VOC) membantu sultan Jambi dalam menangkis serangan Johor. Setelah perang selesai, Belanda menuntut imbalan yang ingin diperolehnya dari Sultan Sri Ingalogo atas bantuan yang diberikannya kepada sultan Jambi tersebut. Tuntutan ini menimbulkan peperangan yang memuncak dengan terbunuhnya kepala kantor VOC di Jambi Sybrand Swart. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menangkap Sultan Sri Ingalogo dan mengasingkannya ke Pulau Banda pada tahun 1690. Raden Tyulip (Raden Julat) menurut wasiat ayahnya berhak naik tahta, tetapi oleh Belanda diangkat Pangeran Depati Raden Cakra Negara menjadi sultan dengan sebutan Kiai Gedeh. Hal ini menyebabkan saudara-saudara dari Sultan Kiai Gedeh yakni Raden Tyulip (Raden Julat) dan Kiai Singa Patih terusir keuluan sampai di Muara Tebo, dan kemudian dengan bantuan raja Pagar Ruyung, Raden

Tyulip dan adiknya Kiai Singa Patih secara bersama-sama mendirikan pemerintahan dalam pelarian. Raden Syulip berkedudukan di Mangunjayo dengan gelar Sunan Sri Maharaja Batu, biasa disebut Sunan Suto Ingalogo, dan Kiai Singa Patih berkedudukan di Bukit Serpeh, Marga Sumai, dengan gelar Sunan Abdurrahman. Ketika pemerintahan Sultan Muhammad Syah 1696–1740 masalah pemerintahan dalam pelarian dapat diselesaikan yakni dengan kembalinya Sunan Sri Maharajo Batu biasa disebut Sunan Suto Ingalogo ke Jambi untuk berdamai dengan Sultan Mohammad Syah, dengan ketetapan bahwa Sunan Sri Maharajo Batu diakui sebagai sultan Jambi, namun tak lama kemudian Sultan Sri Maharajo Batu ditangkap oleh Belanda serta diasingkan ke Batavia. Sultan Mohammad Syah bertahta kembali sampai dengan wafatnya tahun 1740.⁵)

Sultan Sri Ingalogo (isteri Ingalogo) menggantikan Sultan Mohammad Syah pada tahun 1740. Sebagai putra dari Sultan Sri Maharajo Batu biasa disebut Sultan Suto Ingalogo yang ditangkap dan diasingkan oleh Belanda di Batavia, ia berusaha untuk mengusir Belanda dari Jambi. Dua tahun setelah naik tahta Sultan Sri Ingalogo berhasil menutup kantor serta VOC di Jambi.⁶)

Dalam pada itu VOC dibubarkan pada tahun 1799, dan satu-satunya kedudukan VOC di Sumatra yang jatuh ke tangan Pemerintah Belanda ialah Palembang. Palembang kemudian melakukan perlawanan dan akhirnya Belanda pada tahun 1825 menghapuskan Kesultanan Palembang. Karena sultan Jambi selalu membantu sultan Palembang di dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, lebih-lebih pada masa pemerintahan Raden Denting gelar Sultan Agung Sri Ingalogo biasa disebut Sultan Mahmud Mahiddin (1812–1833), maka Belanda mencari kesempatan untuk menguasai Jambi. Kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Jambi terbuka ketika Raden Mohammad (Pangeran Ratu) naik tahta dengan gelar Sultan Mohammad Fachruddin biasa disebut Sultan Keramat pada tahun 1833 membantu para bangsawan Palembang menyerang kedudukan tentara

Belanda di Rawas, dengan segera tentara Belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Mechiels memasuki Sarolangun Jambi dan memblokir jalan sungai dan memaksa pasukan Sultan Keramat kembali ke daerah Jambi. Pasukan Sultan Keramat ini terus menerus didesak oleh tentara Belanda sampai ke dusun Sungai Baung, Limbur Tembesi. Di dusun Sungai Baung ini Sultan Keramat terpaksa mengadakan perjanjian dengan Letnan Kolonel Michiels pada tanggal 14 Nopember 1833 yang isinya: Negeri Jambi dikuasai dan dilindungi oleh negeri Belanda, serta negeri Belanda mempunyai hak untuk mendirikan kekuatan dalam daerah Jambi dimana perlu.⁷⁾

Perjanjian Sungai Baung ini oleh Residen Palembang Practorius dianggap belum sempurna dan belum menjamin kekuasaan Belanda di daerah Jambi, untuk itu Sultan Keramat, Pangeran Ratu Kertaningrad, dan beberapa bangsawan Jambi pada tanggal 15 Desember 1834 dipaksa untuk menandatangani tambahan surat perjanjian 14 Nopember 1833 yang isinya:

1. Pemerintah Belanda memungut cukai dari segala pemasukan dan pengeluaran barang.
2. Pemerintah Belanda berhak monopoli dalam penjualan garam.
3. Pemerintah Belanda tidak memungut lain cukai.
4. Pemerintah Belanda tidak akan turut campur dalam urusan tatanegara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri, kecuali dalam hal penggelapan cukai yang berhak dipungut oleh Pemerintah Belanda.
5. Kepada sultan dan Pangeran Ratu diberikan uang tahunan sebesar Rp. 8.000,—⁸⁾

Perjanjian ini oleh Sultan Taha Syaifuddin yang naik tahta pada tahun 1855 tidak ditepati lagi. Sultan Taha tidak mau mengakui kekuasaan Belanda di Negeri Jambi. Oleh karena sikap Sultan Taha ini tentara Belanda di bawah pimpinan Mayor Van

Langen pada tahun 1858 merebut dan menduduki Kraton Jambi.⁹)

Sultan Taha menyingkir dari Kraton ke daerah uluan Jambi, sementara itu Belanda secara resmi memakzulkan Sultan Taha, dari tahta Kesultanan Jambi dan menobatkan Raden Ahmad (Prabumanja) sebagai sultan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin pada tanggal 2 Nopember 1858.¹⁰)

Di mata rakyat Jambi Sultan Ahmad Nazaruddin dan Sultan-sultan berikutnya yang diangkat oleh Belanda disebut Sultan Bayang yakni sultan yang secara resmi diangkat oleh gubernemen Belanda, ada derajat kesultanan, tetapi tidak penuh berkuasa, atau dapat disamakan keadaannya dengan sultan boneka. Sebaliknya Sultan Taha Saifuddin dianggap oleh seluruh rakyat Jambi sebagai Sultan yang sah, antara lain karena Sultan Taha memiliki perlengkapan kesultanan (*rijksierenden*) yang cukup diantaranya keris pusaka "siginjei" sebagai suatu tanda kekuasaan dan kebesaran Sultan.¹¹)

Dengan demikian pada dasarnya daerah kekuasaan Sultan Ahmad Nazaruddin hanya di sekitar Kota Jambi, sedangkan rakyat dan daerah uluan Jambi serta Tunggal berada di bawah Sultan Taha Saifuddin.

Kepada Sultan Ahmad Nazaruddin Belanda memaksakan perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian Desember 1858 yang isinya antara lain :

- a. Mengingat isi surat-surat perjanjian yang dulu dan karena alasan kemenangan yang didapat oleh Belanda terhadap sultan Negeri Jambi, maka Jambi adalah sebagian dari pada jajahan Belanda di Hindia Timur dan dengan ini Negeri Jambi berada di bawah kekuasaan Negeri Belanda.
- b. Negeri Jambi hanya dipinjamkan kepada sultan Jambi yang harus bersikap menurut dan setia serta menghormati terhadap Pemerintah Belanda.
- c. Pemerintah Belanda berhak memungut cukai pengangkutan barang masuk dan ke luar Negeri Jambi.

- d. Kepada sultan dan Pangeran Ratu diberikan uang tahunan sejumlah Rp. 10.000,— jumlah mana mungkin diperbesar jika penghasilan cukai pengangkutan barang bertambah.
- e. Segala perjanjian tersebut dalam surat perjanjian 15 Desember 1834 tetap berlaku, jika tidak digugurkan atau berlawanan dengan isi surat perjanjian ini.
- f. Sultan dan Pangeran Ratu harus mengirim utusan untuk menghormati gubernur jenderal di Betawi, jika dianggap perlu oleh Pemerintah Belanda.
- g. Batas-batas negeri Jambi akan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dalam perjanjian lain.

Beberapa perjanjian baru yang merupakan tambahan dan melengkapi perjanjian Desember 1858 antara lain ialah :

- 1. Perjanjian 13 Juli 1880 antara Sultan Ahmad Nazaruddin dan Belanda, isinya antara lain, sultan Jambi memberikan hak monopoli candu dan untuk itu sultan menerima uang tebusan Rp. 4.000,— setahun.¹²⁾
- 2. Perjanjian 22 Mei 1882 antara Sultan Ratu Muhammad Mahilludin atau biasa juga disebut Sultan Mahmud Mahiddin (1881—1885) berisi antara lain:
 - a. Bangsa Timur Asing harus memperoleh izin dari Gubernur Jenderal lebih dahulu untuk tinggal di negeri Jambi.
 - b. Semua Bangsa Timur Asing dilindungi Pengadilan dari Pemerintah Belanda.
 - c. Kepada mereka tidak diizinkan menjual atau menyewakan tanah jika tidak setahu pemerintah Belanda.
 - d. Pemerintah Belanda berhak untuk menguasai hasil pertambangan.
 - e. Uang tahunan pengganti pemungutan cukai sebesar Rp. 10.000,— dinaikkan menjadi Rp. 12.000,—¹³⁾

Sultan Muhammad Mahilludin biasa disebut Sultan Mahmud Mahiddin wafat pada tanggal 10 April 1885. Pada bulan Juli 1885 Pangeran Ratu Cakranegara dinobatkan oleh Belanda menjadi sultan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Zainuddin. Segera setelah menjadi sultan Jambi, oleh Sultan Ahmad Zainuddin diangkat putra ketiga dari Sultan Taha Saifuddin yang masih berumur 4 tahun menjadi Pangeran Ratu dengan gelar Pangeran Anom Kesumoyuda. Sebagai kuasa Pangeran Anom Kesumoyuda diangkat Raden Abdur Rahman putra Sultan Mahmud Mahiddin dan Pangeran Aria Jayakusumah putra Sultan Ahmad Nazaruddin. Kemudian Pangeran Aria Jayakusumah digantikan oleh Pangeran Marta Jayakusumah putra Sultan Abdur Rahman Nazaruddin. Sehubungan dengan itu pula maka keris "siginjai yang dipegang oleh Sultan Taha kemudian diterimakan kepada Sultan Ahmad Zainuddin. Hal ini meyakinkan Belanda bahwa Sultan Taha mengakui Sultan Ahmad Zainuddin dan dengan sendirinya rakyat Jambi pun mengakui Sultan Ahmad Zainuddin sebagai satu-satunya sultan Jambi. Oleh sebab itu Belanda kemudian memaksakan perjanjian kepada Sultan Ahmad Zainuddin yang dikenal sebagai perjanjian 28 Mei 1888, yang isinya antara lain :

- a. Penetapan tanah-tanah kepunyaan Pemerintah Belanda disekitar Kota Jambi, Muara Sabak, Muara Kumpeh, Simping dan Kuala Tungkal.
- b. Pemerintah Belanda akan membayar uang tahunan kepada sultan dan tidak akan mengganggu urusan kesultanan, selama sultan menepati perjanjian-perjanjian.
- c. Menetapkan perhubungan antara Pemerintah Belanda dengan Kesultanan Jambi.
- d. Menetapkan bagian Negeri Jambi di mana Kerinci tertuang sebagai sebagian Negeri Jambi.
- e. Sultan harus sering mengunjungi Kota Jambi. ⁴⁾

Setelah perjanjian tanggal 28 Mei 1888 tersebut timbul perbedaan pendapat di antara para bangsawan tinggi Jambi. Per-

bedaan pendapat ini mengakibatkan dipecahnya Pangeran Marta Jayakusumah dari jabatannya dan digantikan oleh Pangeran Natamenggala pada tanggal 1 Nopember 1890. Di daerah uluan Pangeran Diponegoro dan Pangeran Husin memungut cukai pengangkutan barang masuk serta mendirikan penjualan garam di Muara Tembesi. Ancaman dan tegoran Belanda kepada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Husin tidak berarti apa-apa karena pemungutan cukai dan penjualan garam tidak dihentikan tetapi hanya memudahkan tempatnya antara lain ke Muara Tabir dan Muara Sekamis. Di samping itu perlawanan Sultan Taha Saifuddin dan pengikut-pengikutnya terus meningkat dengan terbunuhnya Kontrolir Van Laar, 1891 dan pada tahun 1895 terbunuh pula komandan militer yang merangkap politik agen Belanda di Jambi. Perlawanan Sultan Taha dan pengikut-pengikutnya ini mengakibatkan Belanda melakukan pula tekanan politik kepada Sultan Ahmad Zainuddin yang berakibat Sultan Zainuddin pada bulan Desember 1899 memakzulkan diri dengan mendapat bantuan Rp. 4.000,— setahun.¹⁵⁾

Tidak adanya kesepakatan antara para bangsawan Jambi tentang pengganti Sultan Ahmad Zainuddin yang dapat diangkat Belanda, maka akhirnya pemerintahan Kesultanan Jambi diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 27 Pebruari 1901. Residen Palembang I.A. Van Rynvan Alkemade menerima penyerahan ini, dan dengan demikian berakhir Kesultanan Jambi.¹⁶⁾

3.3 *Struktur Pemerintahan*

Keragaman suku-suku bangsa di daerah Jambi ini didasarkan pula kepada adanya perbedaan latar belakang asal usul, adat istiadat atau dapat dilihat dari kadar pengaruh ajaran Islam dari beberapa daerah. Seperti pada masyarakat Melayu yang sering juga disebut sebagai masyarakat Kalbu yang 12 atau suku yang 12. Pada suku ini pengaruh ajaran Islam lebih jelas, karena memang daerah-daerah yang dihuni oleh suku ini adalah merupakan pusat kekuasaan dari Kesultanan Jambi.

Gambaran struktur masyarakat Jambi adalah juga merupakan gambaran sosial budaya masyarakatnya.¹⁷⁾ Masyarakat yang tersusun dari kelompok-kelompok dan dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga, yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Selanjutnya rumah, yang terdiri dari kumpulan beberapa rumah, di atasnya adalah kampung yang terdiri dari sejumlah rumah, selanjutnya negeri atau marga yang merupakan kumpulan dari beberapa kampung. Dan dari masing-masing unit, sejak dari unit terkecil hingga kepada unit yang terbesar mempunyai pimpinannya masing-masing. Kenyataan ini dapat dilihat dari seloko adat mengatakan

Rumah sekato tengganai.
 Kampung sekato tuo.
 Negeri sekato batin.
 Rantau sekato jenang dan
 Alam sekato rajo.¹⁸⁾

Seloko adat demikian memperlihatkan struktur masyarakat Jambi umumnya dan daerah batin khususnya tersusun dari keluarga, rumah tangga, kampung, negeri, dan alam atau Kerajaan Jambi. Seloko itu juga menunjukkan bahwa hirarki kekuasaan yang berlaku di daerah Jambi bukan didasarkan kepada hubungan darah (geneologis), tetapi lebih banyak didasarkan kepada hubungan tempat atau teritorial. Walaupun demikian ciri pokok yang tergambar dalam pola hubungan kekerabatan di daerah Jambi dapat dilihat adanya perbedaan pokok, terutama antara daerah lingkungan Batin dan Kerinci. Jenis kekerabatan yang patrilineal lebih nyata pada daerah Melayu, sedangkan dua daerah lainnya lebih dekat kepada bentuk materilineal. Namun dalam pengangkatan pimpinan daerah, sejak dari kampung, dusun dan negeri lebih didasarkan kepada primus inter pares. Di daerah Batin dan Kerinci tidak ada kaitan struktural antara suatu negeri dengan negeri lainnya, atau antara suatu dusun dengan dusun lainnya.¹⁹⁾

Para ketua adat seperti pasirah, penghulu, rio, depati, tumenggung, tuo batin, batin dan lain sebagainya berkuasa

pada daerah-daerah kekuasaannya bukanlah mewakili sultan Jambi, melainkan dia adalah wakil rakyat, suku, marga itu sendiri.²⁰) Peranan suatu kekuasaan yang lebih nyata, pada pemerintahan tradisional di daerah Jambi umumnya terletak pada para tengganai, atau tuo-tuo tengganai dalam mengatur tata hubungan dan tata laksana pemerintahan klan kecilnya.

Para tengganai adalah pimpinan rumah, karena di dalam suatu rumah berdiam beberapa keluarga dan mereka adalah saudara laki-laki dari ibu, sedangkan para tuo-tuo tengganai adalah pilihan dari beberapa tengganai yang diperuntukkan bagi kepentingan desa, atau teritorial. Para tuo-tuo tengganai merupakan perangkat desa. Mereka terkadang juga berperan sebagai para cerdik pandai, alim ulama, pimpinan adat,²¹) yang bertugas memberikan pertimbangan bagi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh para kepala desa, pasirah, penghulu, depati, rio depati dan lain sebagainya. Di samping itu para tuo-tuo tengganai itu juga merupakan pelaksana dari keputusan yang telah diambil. kenyataan seperti di atas akan lebih memperjelas seloko adat yang mengatakan bahwa "rumah sekato tengganai, kampung sekato tuo dan negeri sekato batin".

Sedangkan di daerah Melayu atau lebih dikenal dengan daerah Kalbu 12 atau disebut juga dengan tanah Raja (daerah Kesultanan), pemerintahan pada dasarnya dipegang oleh para bangsawan. Sedangkan para bangsawan itu juga berbeda-beda tingkatnya yaitu:

1. Raden keturunan keraton dan yang perempuan disebut ratumas.
2. Raden keturunan purban (perban), yang perempuan disebut tumas.
3. Raden keturunan anak rajo 40. yang perempuan disebut tumas.
4. Raden keturunan kedipan, yang perempuan disebut dengan nyimas.

5. Kemas keturunan dari temenggung, gelar ini merupakan gelar perseorangan dan yang perempuan disebut dengan nyimas.^{2 2})

Di dalam pemerintahan, para bangsawan ini biasanya disebut dengan kademang ngabehi dan lain sebagainya.

Struktur masyarakat Jambi, sekaligus telah memperlihatkan struktur pemerintahan yang berlaku di kalangan masyarakat, baik pada masyarakat batin dan penghulu, maupun pada masyarakat Melayu, atau daerah kalbu yang 12. Dan secara keseluruhan dapat dilihat, bahwa bentuk pemerintahan yang berlaku adalah berbentuk gabungan antara pemerintahan geneologis dan pemerintahan yang didasarkan kepada teritorial. Bentuk pemerintahan yang demikian dianggap oleh Belanda sebagai pemerintahan adat, yang tetap dapat berlaku, namun untuk penertiban administrasi pemerintahan maka Belanda menciptakan *administratieve controle van een inlandsch gouvernement bestuut sambtenaar, cenassisten-demag.*^{2 3})

Untuk menjaga beberapa kepentingannya di daerah Jambi, maka Pemerintah Belanda telah melakukan berbagai perubahan di mana perubahan-perubahan tersebut, meliputi bermacam-macam kepentingan masyarakat secara keseluruhan di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Perubahan status dan sistem pemerintahan di Jambi. Kenyataan ini telah dikemukakan, bahwa adanya kecenderungan Pemerintah Belanda untuk menciptakan dua bentuk kekuasaan, yaitu tetap menghormati sistem pemerintahan tradisional, baik dalam batas kekuasaan yang berdasarkan kepada teritorial. Seperti kekuasaan para tengganai, tuo-tuo tengganai, rio depati, depati dan lain sebagainya. Di samping itu Belanda menempatkan pula pada demang, asisten demang dan ambtenar sebagai suatu pemerintahan formal, bahkan kedudukan para bangsawan Jambi juga tidak jauh berbeda dengan keadaan seperti para depati, rio, mangku dan lain sebagainya, kekuasaan mereka juga sudah sangat terbatas. Dengan demikian terlihat bahwa

sistim pemerintahan yang dikembangkan atau dijalankan Belanda telah menjuruskan kepada merubah nilai-nilai dan norma dianut masyarakat, sehingga timbul rasa ketidak puasan di kalangan penduduk pribumi, terhadap Belanda. Rasa tidak puas ini bukan saja karena berubahnya nilai-nilai dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat Jambi, tetapi perubahan ini juga dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Apalagi bila dilihat bahwa kebanyakan para demang, asisten demang, ambtenar dan kontrolir, bukanlah terdiri atas penduduk daerah Jambi, tetapi berasal dari daerah-daerah lain seperti Minangkabau dan Palembang, Misalnya dasar pengangkatan demang, asisten demang ataupun para ambtenar oleh pihak Belanda adalah didasarkan kepara tingkat kecerdasan dan pendidikan yang telah dialaminya. Sedangkan orang Jambi pada waktu itu belum banyak yang mendapat kesempatan menempuh pendidikan. Hal ini juga didasarkan atas batasan-batasan kesempatan para pribumi untuk menempuh pendidikan Belanda. Pada bagian ini juga terlihat bahwa perubahan dibidang pemerintahan ini adalah menuju kepada perubahan pemerintahan tradisional, kepada pemerintahan yang modern. Namun perubahan yang demikian dirasakan tidak adil oleh masyarakat Jambi. Karena baik orang Palembang, orang Minangkabau maupun orang Jawa dipandang oleh masyarakat Jambi, tidak berbeda dengan mereka memandang orang Belanda atau orang Cina. Mereka datang untuk bekerja, ataupun berdagang. Sedangkan mereka tidak tinggal menetap di daerah Jambi, mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, sosial, politik dan sosial budaya yang terjadi di daerah Jambi tidak sebagaimana orang Jambi sendiri memandangnya.

Bila ditilik dari beberapa keterangan di atas, maka terlihatlah bahwa peristiwa pergolakan yang terjadi di beberapa daerah pedesaan Jambi mengandung unsur-unsur gerakan anti swapraja,^{2 4}) beberapa sipat dari gerakan ini terkandung di dalamnya :

- 1) Anti golongan priyayi atau pamong praja
- 2) Anti unsur-unsur asing

3) Adanya konflik sosial yang mendalam (*latent social conflict*).

Walaupun kadar gerakan ini tidaklah merupakan peristiwa yang lebih bersifat lokal, namun sifat lolalitasnya tidak terlepas sama sekali dari perkembangan politik secara nasional. Malahan dapat dikatakan bahwa pergolakan-pergolakan ini timbul sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam skala nasional. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa suatu gerakan akan muncul, karena adanya rasa tidak puas baik terhadap keadaan ekonomi, kedudukan sosial yang kurang memadai ataupun aspirasi yang tidak tercapai, perlakuan yang tidak adil, serta kekuasaan politik yang dijalankan tidak dengan norma atau nilai-nilai yang dianut, bahkan dapat juga disebabkan oleh perasaan frustrasi yang dihadapi oleh seseorang ataupun sekelompok orang.^{2 5})

Di daerah Jambi antara agama dan adat sudah membaaur dan sulit untuk dicarikan garis pemisahnya yang jelas, sehingga pergeseran atau perubahan adat istiadat, akan mempunyai hubungan dengan pergeseran agama.^{2 6}) Demikian pula halnya dengan kerelaan dan kepasrahan untuk mengorbankan jiwa raganya (mati syahid),^{2 7}) dalam suatu perjuangan, bahkan perjuangan ini dinamakan dengan perang di jalan Allah (perang sabil).^{2 8})

Konsep perang sabil inilah yang telah digunakan oleh para ulama Jambi dalam menentang segala bentuk perubahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena dianggap bahwa setiap bentuk perubahan itu, menyangkut perubahan tata nilai dan sistem nilai masyarakat Jambi. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa perubahan sistem kekuasaan dan kelembagaan pemerintahan dianggap sebagai bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku selama ini, yaitu dengan meletakkan status pemerintahan adat sebagai pemerintahan informal. Sedangkan para demang, asisten demang dan lain sebagainya yang diangkat dan diakui oleh Pemerintah Belanda se-

bagai pemerintahan formal. Sedangkan kekuasaan sesungguhnya terletak pada pemerintahan formal.

Bagi para ulama rasa ketidakpuasan ini terlihat dengan hilangnya kekuasaan mereka yang selama ini dianggap sebagai pimpinan ummat atau pimpinan masyarakat. Ulama dalam sistem pemerintahan adalah salah satu unsur dari tiga unsur pemerintahan, yaitu unsur pimpinan adat, ulama dan cerdik pandai dan ketiga unsur ini dinamakan juga dengan "tiga tungku sejarah".²⁹⁾

Di samping itu dalam sistem demokrasi kolonial para pamong praja muncul sebagai suatu kelompok baru dalam masyarakat Jambi, mereka adalah orang-orang yang telah mendapat pendidikan Belanda, bekerja sebagai alat Pemerintah Belanda, dengan demikian mereka adalah pembantu Pemerintah Belanda, Selain dari pada itu mereka juga mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan pribumi lainnya, bahkan mereka juga memakai beberapa lambang-lambang kekuasaan sebagai elite birokrat. Di samping itu mereka juga telah melaksanakan pola kehidupan kebelanda-belandaan, serta kurang memperhatikan dan mempraktekkan hidup keagamaan dan tidak jarang pula mereka memandang agama sebagai alat pembeda antara mereka dengan pribumi lainnya. Golongan inilah yang diartikan Geertz dengan kelompok priyayi di Jawa.³⁰⁾ sedangkan sistem pemerintahannya berorientasi secara vertikal, karena sistem pemerintahannya lebih bersifat vertikal, maka mereka mengabaikan para pimpinan adat, ulama dan cerdik pandai yang ada di lingkungannya.

Karena rasa tidak puas dan rasa ketidakadilan yang menyelimuti para ulama dan pimpinan masyarakat lainnya, maka timbullah sikap anti pati atau ketidakrelaan mereka untuk menerima segala perubahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Walaupun sikap feodalistis ini juga dalam beberapa bagian terdapat di daerah Melayu atau Kalbu yang 12, karena yang memerintah di daerah ini kebanyakan para bangsawan keturunan

an raja, namun pengaruh ajaran Islam terlihat sangat berpengaruh, seperti halnya di daerah Batin, yang memfungsikan mesjid sebagai tempat bermusyawarah, mencari kesepakatan ataupun merancang suatu pekerjaan, maka hal yang demikian juga berlaku di daerah Kalbu yang 12, sehingga kedudukan para ulama adalah sangat berarti dan berpengaruh dikalangan pemerintahan.

Oleh karena itu dapatlah dipahami apabila para ulama, pimpinan adat dan para bangsawan Jambi merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan sosial budaya masyarakat Jambi. Bahkan mereka menuduh para demang, asisten demang, dan sebagainya. Walaupun mereka juga terdiri atas orang-orang pribumi, namun mereka telah mirip dengan orang-orang Belanda yang kafir, yang sepenuhnya bekerja untuk kepentingan Belanda. Begitu pula halnya dengan beberapa pembantunya. Walaupun masyarakat tetap mematuhi segala perintahnya, namun kepatuhan itu hanyalah sebagai kepatuhan yang dipaksakan.

3.4 *Kekuasaan Hukum Adat*

Penduduk Indonesia asli (orang bumiputra) hidup dalam bermacam-macam corak ragam persekutuan hukum adat di mana setiap persekutuan hukum adat masing-masing berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena setiap persekutuan hukum adat itu mempunyai anasir-anasir khusus dan tidak terdapat dalam adat istiadat persekutuan hukum lain.

Berdasarkan suatu klasifikasi tertentu, Van Vollenhaven membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam 19 wilayah hukum adat yang diberi nama lingkungan hukum atau *rechskring*.^{3 1}) Di antara 19 lingkungan-lingkungan hukum adat tersebut adalah Sumatra Selatan yang terdiri atas 4 sub wilayah hukum adat. Salah satu di antaranya adalah Jambi.

"Pada zaman raja beraja sampai kira-kira tahun 1904 daerah Jambi telah mempunyai undang-undang adat yang diumumkan untuk kelancaran roda pemerintahan."^{3 2})

Berlakunya adat di daerah Jambi dapat dilihat dalam pepatah adat "Pasko di atas tumbuh, lembago di atas tuang", maksudnya adalah hidup di kandang pakso, mati di kandang tanah. Pepatah adat yang demikian melambangkan bahwa adat telah menyatakan sewaktu hidup itu kita telah dilingkari oleh pasko yaitu suatu lembaga hukum maksudnya manusia dalam hidup bermasyarakat diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan hukum yang melingkarinya ini akan berakhir apabila manusia telah meninggal dunia.

Kesatuan adat istiadat yang berlaku di Daerah Jambi dilambangkan dalam suatu istilah "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah". Secara garis besar Sepucuk Jambi Sembilan Lurah mempunyai 5 pembagian undang-undang adat yaitu :

1. Induk Undang
2. Pucuk Undang Nan Delapan
3. Anak Undang Nan Dua Belas
4. Sendi Undang yang Disebut Teliti
5. Undang-undang Hukum^{3 3})

Dari 5 pembagian undang-undang adat Jambi ini, dapat diperinci lagi seperti berikut:

ad 1. Induk Undang terbagi dalam 5 bagian yaitu:

- a. Titian teras bertangga batu, artinya titian teras undang-undang yang datang dari nabi bertangga batu undang-undang dari Al-Qur'anul Karim.
- b. Cermin nan tiada kabur.
Maksudnya, berteladanlah kepada yang telah sudah, jalan yang telah dirambah yang akan diturut, baju yang telah dijahit yang akan dipakai, bersesap berjerami, bertunggul berpemasaran, berpandan berpekuburan, lihatlah alam yang telah terbentang ini.
- c. Lantak nan tiada guyah.
Maksudnya kata benar yang tidak boleh diubah-ubah, beruk dirimba disusunkan, anak dipangku diletakkan, yang benar itu jangan dirubah.

- d. Nan tiada lapuk karena hujan, tiada lekang karena panas. Maksudnya kata yang hak.
 - e. Kata seiyo. Maksudnya, pembicaraan yang telah dimusyawarahkan. Bulat boleh digilingkan, pipih boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terendam sama basah berat sama dipikul beban ringan sama dijinjing, jika dapat sama berlabu, jika hilang sama merugi.
- ad 2. Pucuk Undang nan delapan (8 unsur kejahatan)

- a. Dago-dagi
Maksudnya ialah segala macam bentuk kejahatan yang bersalah kepada Pemerintah yang syah (Dago), sedangkan Dago ialah sebagai akibat perbuatan salahnya itu, maka timbullah kekacauan dalam negeri. Dengan demikian bentuk kejahatan ini adalah melawan kepada pemerintah yang syah, dan menimbulkan kekacauan dalam negeri, seperti mengadakan pemberontakan, makar, mengadakan instimisasi dan sebagainya, sehingga merendahkan wibawa pemerintah.
- b. Sumbang salah
Yaitu suatu bentuk kejahatan yang tidak wajar, yang menyangkut masalah pemerintahan, dengan demikian setiap bentuk perzinahan dilarang menurut hukum adat dalam segala bentuknya, misalnya perzinahan antara seseorang dewasa dengan anak, atau antara orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga, dan lain sebagainya.
- c. Samun Sakar
Yaitu setiap bentuk kejahatan perampokan baik yang dilakukan di darat (samun) maupun yang dilakukan di laut (sakar). Dengan demikian maksud dari bentuk kejahatan ini adalah melambangkan bentuk usaha seseorang ataupun sekelompok orang untuk menguasai hak atau harta benda orang lain dengan mempergunakan kekerasan atau paksaan.

d. Upas Racun

Yaitu bentuk kejahatan yang dapat mencelakakan seseorang dengan jalan memberikan sesuatu racun di dalam makanan atau minuman kepada orang lain, dengan maksud untuk membunuh dengan segera atau untuk menganiaya orang tersebut agar merana dan sengsara (sakit lama) yang akhirnya akan sampai juga kepada kematian.

e. Siyur bakar

Maksudnya dari bentuk kejahatan ini mengadakan pembakaran apakah membakar sebuah rumah ataupun sekelompok rumah, ini disebut bakar, sedangkan siyur berarti membakar sebuah kampung atau dusun.

f. Tipu tepok

Merupakan kejahatan yang berbentuk penipuan dengan tujuan untuk merugikan orang lain, dengan berpura-pura mengemukakan kebenaran atau kebaikan orang lain, tetapi yang dimaksud adalah sebaliknya (tipu), sedangkan yang dijelaskan dengan bujuk dan rayuan dinamakan tepok.

g. Maling curi

Maksudnya adalah segala bentuk kejahatan pencurian yang mengambil hak orang lain, tanpa sepengetahuan orang itu, yang dilakukan pada waktu malam hari ini disebut maling, dan jika dilakukan siang hari dinamakan curi.

h. Tikam bunuh

Yaitu kejahatan yang berbentuk ingin membunuh orang lain dengan mempergunakan senjata tajam ataupun runcing, kalau hanya sampai melukai saja disebut tikam, jika sampai mati terbunuh disebut bunuh.

ad 3 Anak Undang nan Dua Belas

Menjadi pokok untuk menyalurkan pembagian undang-undang, yang dikatakan didalam adat: "Hidup dikandung Un-

dang, jo pusako, mati dikandung tanah”. Anak Undang ini terbagi dalam 12 bagian, yaitu:

- 1) Undang-undang yang takluk dengan hak Kullah
- 2) Undang-undang yang takluk dengan hak anak Adam, dan hak-haknya
- 3) Undang-undang yang takluk dengan hak rumah nan bertenganai, kampung nan bertuah
- 4) Undang-undang yang takluk dengan hak luhak nan berpenghulu
- 5) Undang-undang yang takluk dengan negeri nan berbatin, rantau nan berjenang
- 6) Undang-undang nan takluk dengan alam nan Beraja.
- 7) Undang-undang hukum
Luka di pampas, mati dibangun, salah berhutang, nitip, pinjam mengembalikar
- 8) Undang-undang yang takluk dengan hak perkawinan semenda menyemenda
- 9) Undang-undang yang takluk dengan hak penghidupan, pencaharian, kepandaian dan pekerjaan anak Adam
- 10) Undang-undang yang takluk dengan hak harta benda, berat dan ringan
- 11) Undang-undang yang takluk dengan hak permainan-permainan
- 12) Undang-undang yang takluk dengan kekayaan alam, laut, darat, sawah, ladang, tasik, tambang, bukit, hutan, tanah, lupak, lebung, paya, rawa, tanjung, teluk, danau, rimba, dan rembang

Di dalam pelaksanaan sangsi hukum, menurut adat telah ditentukan melalui Undang-undang yang 12, di mana undang-undang yang 12 ini pun dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Enam bagian yang pertama adalah berbentuk kejahatan yang sudah nyata kesalahannya seperti yang digambarkan dalam adat, terikat, terkurung, terpijak kaki, terpentang

tangan, dari kata yang demikian jelas tergambar bahwa perbuatan yang dilakukan sudah tidak diragukan lagi kesalahannya, atau sudah tertangkap basah yang tidak dapat diingkari lagi, misalnya seseorang itu telah nyata-nyata melakukan pembrontakan kepada raja, atau dia telah tertangkap basah sewaktu melakukan perzinahan, jelas-jelas dia telah meletakkan racun ke dalam makanan tidak diragukan lagi bahwa dialah yang telah melakukan penipuan dan sebagainya, maka bentuk-bentuk kejahatan ini tergolong kepada enam yang pertama.

2. Enam yang kedua adalah berbentuk kejahatan yang baru dalam taraf anggapan belum dapat dipastikan

Seperti dalam pepatah adat mengatakan "Enggang lalu ranting patah" suatu contoh, persis sewaktu dia berada di tempat terjadinya suatu pembunuhan, hal ini akan dapat mengundang pendapat orang bahwa dialah yang melakukan pembunuhan, walaupun hal ini belum pasti atau sewaktu seseorang berada di tempat terjadinya pencurian, maka dengan sendirinya dia dapat dianggap sebagai orang yang mencuri oleh karena anggapan ini suatu hal yang belum pasti maka diperlukan penyelidikan terlebih dahulu dan dia belum dapat dijatuhi hukuman.^{3 4})

Untuk membuktikan sampai di mana fakta-fakta kejahatan itu terbukti pepatah adat mengatakan "telah terserak jalo berkandul, terbentang pukot berjerat, maju bedil batino, mundur ranjau menanti (menunggu). Bundar tapak (tidak bisa lari lagi) dari ketentuan hukum."

Adapun bukti-bukti yang dimaksud terdapat dalam teliti yang 12 yaitu jika ke air ada riak gelombangnya, jika ke atas ada londonya (rebah). Jika ke darat ada runutnya (bekas) kelihatan garis-garisnya. Kelihatan lambang bulunya, kelihatan takik tikalnya, (bekas kapak). Ada puntung suluhnya (untuk membakar), ada tabung sayaknya (alat-alat bekas racun), nyata daging tekuak (luka), nyata tulang yang rencong (patah taklis), nyata tanda buktinya. Ada buah yang bertampuk bungo yang

bertangkai, (misalnya dalam suatu perzinahan telah terjadi kehamilan).

ad 4 Sendi undang yang disebut teliti

Artinya ialah undang-undang yang diperkuat lagi dan telah ditambah dengan peraturan-peraturan khusus. Dalam undang-undang adat Jambi tersebut istilah undang nan teliti maksudnya undang datang dari Minangkabau, dan teliti mudik dari Jambi. Dari pengertian ini, tampaklah bahwa adanya integrasi antara adat Jambi dengan adat Minangkabau.

Menurut cerita-cerita rakyat yang berkembang pada masyarakat Jambi, proses terjadinya integrasi itu ialah adanya pertemuan pemuka adat daerah Jambi dengan Datuk Perpatih nan Sebatang pencipta adat Minangkabau untuk mengadakan suatu perundingan, maka berlangsunglah perundingan di suatu tempat yang disebut Beringin Sekah dahan, di hulu Tanjung Samalidu (sekarang batas antara Minangkabau dengan Jambi).

Selesai pertemuan yang pertama ini lalu dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua di Bukit Siguntang-guntang Sitinjau Laut yang termasuk ke daerah alam Kerinci. Sebagai hasil permusyawaratan pada waktu itu disepakatilah bahwa segala sesuatu yang bertentangan syarak harus dihilangkan, maka sejak itu terciptalah suatu semboyan adat yang berbunyi: "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah".

ad 5 Undang-undang Hukum

Yang dimaksud dengan undang-undang hukum ialah undang-undang yang menentukan berat ringannya hukuman dan pembahagian-pembahagian yang termasuk kepada hukuman berat atau ringan.

Undang-undang ini disebut juga hukuman di atas dan hukuman di bawah.

3.5 *Sistem Kekerabatan Orang Melayu Jambi*

Yang dimaksud dengan orang Melayu Jambi, adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sepanjang Sungai Batang Hari, yaitu daerah yang merupakan pusat kekuasaan Kesultanan Jambi. Daerah ini juga dikenal dengan istilah daerah kerajaan yang 12, karena pada waktu pemerintahan Kesultanan Jambi daerah kekuasaannya terdiri dari 12 daerah kekuasaan, yang masing-masingnya diperintah oleh seorang temenggung, sebagai wakil raja (sultan), selanjutnya daerah-daerah kekuasaan yang 12 ini, dinamakan pula menjadi kalbu yang 12.

Pembagian daerah kekuasaan Jambi kepada beberapa kalbu itu, dimulai sejak pemerintah orang Kayo Hitam yang memerintah sekitar tahun 1500.^{3 5)} Masing-masing kalbu tersebut diperintah oleh salah seorang keluarga raja, dalam perkembangan selanjutnya kalbu-kalbu ini telah menjadi suku-suku yang terletak di daerah kalbu yang 12.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa suku di daerah Kalbu yang 12 ini terbentuk dari suatu kesatuan daerah (teritorial), bukan dari suatu kesatuan geneologis atau pertalian darah.

Karena daerah Kalbu yang 12 ini merupakan pusat pemerintahan dari Kesultanan Jambi, maka daerah ini pengaruh pemerintah Islam lebih nyata, bila dibanding dengan daerah-daerah lainnya, seperti sistem kekerabatan yang berlaku dan sistem pembagian harta peninggalan.

Hubungan kekerabatan yang berlaku di daerah ini berbentuk parental atau bilateral yang lebih condong ke arah patrilineal atau garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah), atau disebut juga dengan bentuk kekeluargaan yang bersipat kekeluargaan batih. Dengan demikian di daerah ini tidak ada yang lebih tinggi hubungan kekeluargaannya dari pada keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.^{3 6)} Walaupun dalam susunan masyarakat di daerah ini juga dikenal dengan adanya mangku dan tengganai, namun jabatan-jabatan tersebut diperolehnya bukanlah karena adanya pertalian darah antara sesama anggota

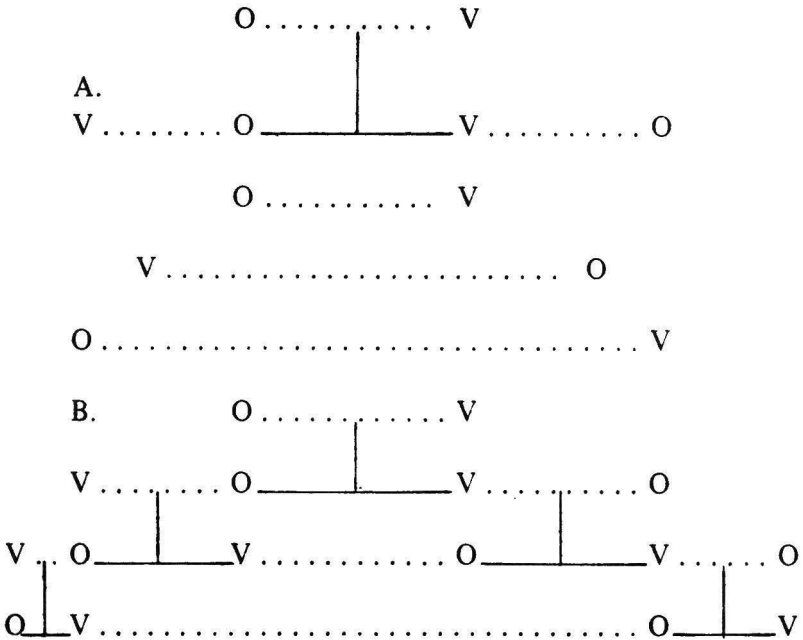
masyarakat, tetapi semata-mata didasarkan kepada kecakapan seseorang untuk memangku jabatan tersebut. Dengan demikian masyarakat di daerah Kalbu yang 12 ini tersusun dari dusun-dusun, kampung-kampung dan negeri-negeri yang dibagi-bagi menurut suku-suku yang 12 itu. Sedangkan dusun-dusun itu terbentuk dari kelompok rumah-rumah dan rumah-rumah tersebut adalah merupakan tempat menetapkan keluarga atau beberapa keluarga yang ada di dalamnya.

Seperti lazimnya bahwa keluarga itu tercipta dari hasil perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, di daerah Kalbu yang 12 ini terlihat bahwa adanya pembatasan-pembatasan yang nyata di dalam menentukan istri/suami atau pembatasan-pembatasan dalam menentukan jodoh seseorang. Di daerah ini seseorang tidak diperkenankan mengawini sesama anggota keluarga Batih atau saudara sekandung, saudara ayah, mertua anak tiri yang ibunya masih terikat perkawinan dengan ayah tirinya itu. demikian pula dilarang mengawini saudara istri, bila perkawinan tersebut masih berlangsung. Bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka dia akan mendapat sanksi sosial, yaitu dipencilkan dari pergaulan masyarakat, di samping itu juga karena adanya anggapan bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan terkutuk dan dimurkai oleh Allah. Dari keterangan di atas terlihat bahwa di dalam ketentuan-ketentuan perjodohan di daerah Kalbu yang 12 ini, terlihat adanya pengaruh-pengaruh ajaran Islam, hal ini tergambar dalam seloka adat yang mengatakan "Adat menurun, syarak Mendaki, Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.^{3 7)}

Seloko adat yang demikian menggambarkan bahwa segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang dalam pergaulan bermasyarakat, berasal dari nenek moyang dan bersumber dari ajaran Islam yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Di samping pengaruh Islam yang telah dijadikan pedoman dalam masalah perjodohan ini, maka pengaruh adat pun tidak dapat dihindari, misalnya dalam menentukan jodoh tersebut,

maka hubungan kekerabatan itupun merupakan unsur yang menjadi titik perhatian, dimana perkawinan itu dianggap terbaik ialah bila hubungan itu terjadi diantara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat misalnya perkawinan antara saudara sepupu pada tingkat yang terdekat. Dengan demikian makin dekatnya hubungan kekerabatan diantara mereka, maka makin baik perkawinan itu dalam penilaian masyarakat, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

A = Perkawinan sepupu pada krat pertama.

B = Perkawinan sepupu pada krat pertama dan kedua.

C = Laki-laki.

V = Perempuan.

! = Garis keturunan ke bawah

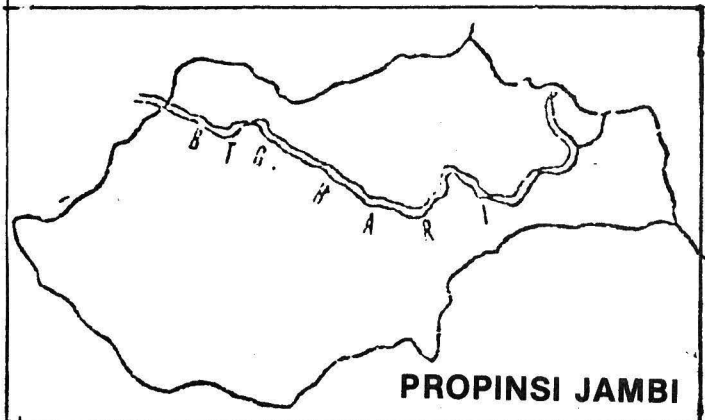
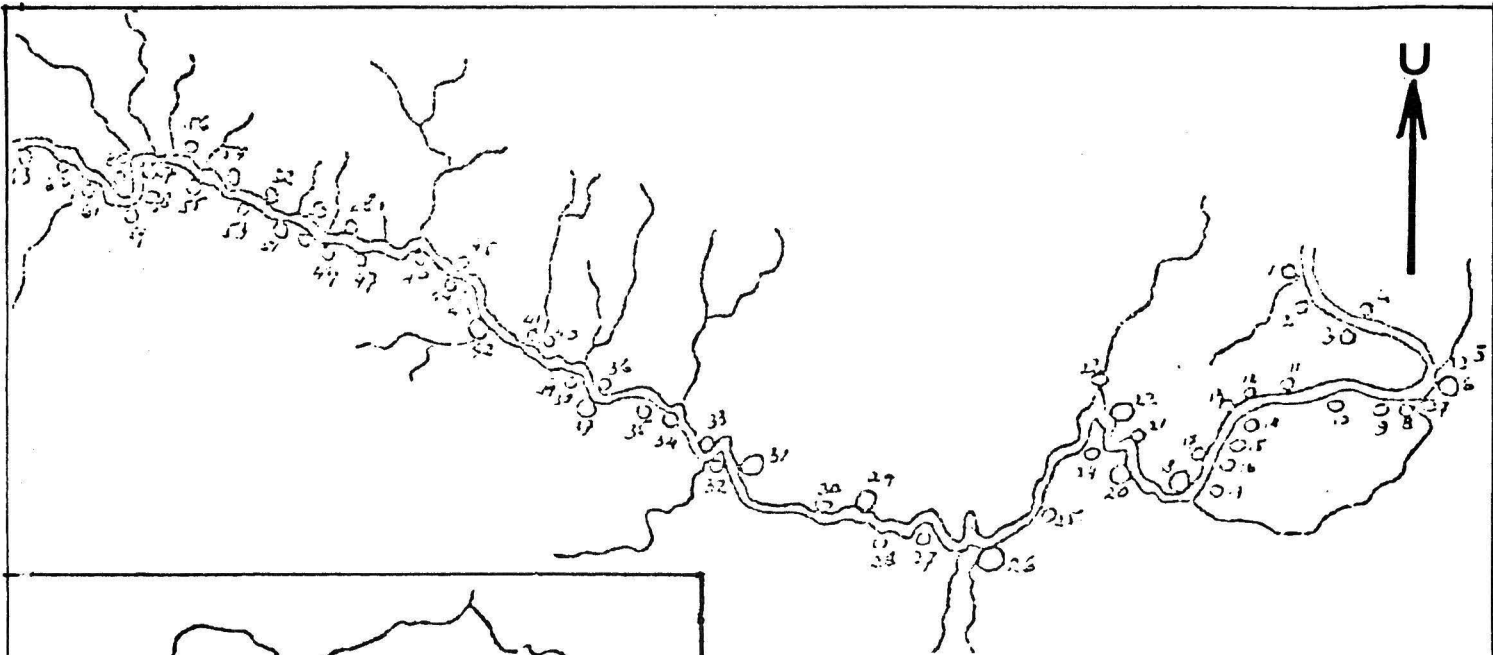
— = Garis keluarga batih (Saudara sekandung)

.. = Garis perkawinan

Karena hubungan kekerabatan yang berlaku di daerah Jambi pada umumnya berbentuk bilateral, maka di dalam perkawinan ini juga terlihat adanya pengaruh garis keturunan kebapaan maupun garis keturunan keibuan, sedangkan di daerah Kalbu yang 12 ini terlihat adanya pengaruh agama Islam seperti yang telah diuraikan di atas, namun pengaruh matrilineal juga terlihat dalam kenyataan kehidupan masyarakat, terutama dalam masalah perkawinan misalnya, di dalam perkawinan, maka suamilah yang datang ke rumah istri dan tinggal bersama-sama dengan keluarga istrinya, bila terjadi perceraian maka suamilah yang keluar dari rumah, karena mereka tinggal di rumah keluarga istrinya, begitu pula dengan kedudukan anak yang biasanya tetap tinggal bersama ibu dan bila ibunya tidak ada maka anak-anak tersebut diasuh oleh keluarga ibunya.

3.6 .*Daerah Kalbu Yang Ke-12*

Lokasi daerah kukuban hukum adat Kalbu yang 12, meliputi sepanjang Sungai Batang Hari mulai dari Tanjung Simalidu, termasuk sebagiandaerah Kabupaten Tanjung Jabung, sebahagian daerah Kotamadya Jambi, sebahagian Kabupaten Batang Hari dan sebahagian daerah Kabupaten Bungo Tebo (lihat peta).



LOKASI PENDUDUK MELAYU JAMBI

Adapun nama-nama dusun yang menjadi tempat kediaman orang-orang di daerah kukuban adat Kalbu yang 12 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Kampung Laut | 11. Rukam |
| 2. Teluk Majelis | 12. Sekubung |
| 3. Kampung Singkep | 13. Muara Jambi |
| 4. Muara Sabak | 14. Dusun Mudo |
| 5. Teluk Ketapang | 15. Tebat Patah |
| 6. Jebus | 16. Teluk Jambu |
| 7. Kebun Terbakar | 17. Bakung |
| 8. Suak Kandis | 18. Tanjung Johor |
| 9. Tanjung | 19. Kunangan |
| 10. Manis Mato | 20. Sungai Duren |
| 21. Senaung | 43. Bendaro Rempak |
| 22. Berembang | 44. Tambon Arang |
| 23. Sengeti | 45. Teluk Lengkap |
| 24. Rantau Majo | 46. Teluk Sengkawang |
| 25. Ture | 47. Sungai Rambai |
| 26. Lubuk Ruso | 48. Pagar Puding |
| 27. Sungai Baung | 49. Jambu |
| 28. Muarah Bulian | 50. Rantau Lengkap |
| 29. Napal Sisik | 51. Pulau Temiang |
| 30. Terusan | 52. Teluk Kual |
| 31. Dusun Empat | 53. Suko Rami |
| 32. Rantau Kapas | 54. Suko Berajo |
| 33. Rambutan Masam | 55. Dusun Tua Ulu |
| 34. Mersam | 56. Teluk Cempako |
| 35. Sengkati Gedang | 57. Pulau Musang |
| 36. Rantau Gedang | 58. Muaro Tabun |
| 37. Sungai Puar | 59. Aur Cino |
| 38. Sungai Ruan | 60. Sungai Abang |
| 39. Tebing Tinggi | 61. Teluk Kayu Putih |
| 40. Sungai Rengas | 62. Kuamang |
| 41. Sungai Bengkal | 63. Tanjung Samalidu |
| 42. Muara Tebo | |

Di masa Keskuthanan Jambi, keseluruhan dari daerah ini disebut Kerayaan yang 12 yaitu: VII Koto, IX Koto yang terdiri atas Awın, Pinokawan, Maji, Kebalen, Penagan, Petajın, Aur Hitam, Pemayung, Maro Sebo, Mestong, Jebus dan daerah Tungkal lainnya.^{3 8})

Mengenai jumlah penduduk orang Kalbu yang 12 secara terperinci jumlah penduduk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kalbu 12 Menurut Lokasinya Tahun 1976

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk seluruhnya 100%	Jumlah penduduk asli (84%)
	Kotamadya Jambi		
1.	Danau Teluk	9.917	7.490
2.	Pelayangan	10.297	8.627
3.	Pasar Jambi	11.597	9.741
	Batang Hari		
4.	Sekernan	25.592	21.497
5.	Muara Bulian	40.775	34.251
6.	Muara Tembesi	19.680	16.531
7.	Jambi Luar Kota	64.672	54.324
	Bungo Tebo		
8.	Tebo Ulu	29.137	24.475
9.	Tebo Tengah	23.927	20.099
10.	Tebo Ilir	15.390	12.928
11.	Tanah Tumbuh	45.292	38.045
	Tanjung Jabung		
12.	Nipah Panjang	80.883	67.942
13.	Muara Sabak	90.030	75.625
	J u m l a h	466.189	391.575

Sumber: Hasil pengolahan data yang berasal dari Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Jambi 1979.

Seperti dikemukakan di atas, oahwa orang Kalbu yang 12 hidup di sepanjang Sungai Batang Hari yang dapat dilayari sampai jauh ke daerah pedalaman. Di samping itu daerah ini juga merupakan daerah Bandar perdagangan dan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang yang beragama Islam.

Hal ini mengakibatkan pula daerah Kalbu yang 12 sebagai pusat pengembangan agama Islam di daerah Kalbu yang 12 nampak lebih mendalam apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

CATATAN

1. Karya I Tsing tersebut ialah, *Nan-hai-chi-kuei-nai-fa-chuan*, diterjemahkan oleh Sarjana Jepang, Takakusu ke dalam bahasa Inggris: a Record of the Budist Relegion as Practised in India and the Malay Archipelago, dan *Ta-t'ang-si-yu-ku-fa-kaoseng=chuan* yang diterjemahkan oleh Prof. Chavannes kedalam bahasa Perancis: Memoire compose 'a l'epoque de la grande dynastie T'ang sur lesreligieuk eminents que allrerent chercher la loi dans les pays d'occident. Lihat Prof. Slametmulyono, *Sriwijaya*, hal. 14, 45, 52, 57. Lihat pula Prof.Dr. D.H. Burger dan Prof.Dr.Mr. Prajudi Atmosudirjo, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, hal. 25-26.
2. Yushar Mahmud, *Perkembangan Islam di Jambi*, Sripsi IKIP (STKIP), Jambi, hal. 23, 24; Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Sumatra Tengah, hal. 58.
3. Raden Syahabuddin, *Sejarah Perjuangan Jambi dari abad ke abad*, Palembang, 1954, hal. 37.
4. Raden Syahabuddin, *Ibid*, hal. 29; Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 62.
5. Raden Syahabuddin, *Ibid*, hal. 37; Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 62, 63.

6. Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 63, 64.
7. Tim Pembina Pahlawan Daerah Propinsi Jambi, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Sultan Taha Saifuddin Jambi*, hal. 1.
8. Kementerian Penerangan, *Op cit*, hal. 65.
9. Kraton Sultan Taha ini setelah diduduki Belanda kemudian dijadikan benteng dan tempat kediaman tentara Belanda, sekarang ditempat ini telah berdiri Masjid Agung Al-Falah, Periksa: Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 67.
10. Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 67, 68.
11. R. Syahabuddin, *Op cit*, hal. 31, 32.
12. Kementerian Penerangan, *Op cit*, hal. 69.
13. Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 69, 70.
14. Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 70, 71.
15. Kementerian Penerangan, *Ibid*, hal. 71, 72.
16. R. Syahabuddin, *Op cit*, hal. 32.
17. Istilah Jambi, menunjukkan pada Wilayah Administratif ia yang berlaku sekarang, sedangkan zaman Kolonial Belanda daerah Jambi berbentuk Resident yang terdiri dari beberapa daerah Onderafdeeling, yaitu onderafdeeling Djambi, Muara Tembesi, Muara Tebo, Bangko, Sarolangun dan Onderafdeeling Muara Bungo. Pembagian daerah demikian dinyatakan dalam surat keputusan atau Resident sbelsuit Nopens Margas en Batin Schappen in Djambi, No. 143 tgl. 24 October 1931. Lihat Zuid-Sumatra, Serie I, dalam Adatrecht bundels, XXXV, 1932 322-324.
18. Sloko adat demikian, di samping menggambarkan, tentang struktur masyarakat Jambi, hal ini juga memperlihatkan struktur pemerintahan, yaitu sejak dari unit pemerintahan terkecil yaitu keluarga dengan pimpinan ayah rumah tangga tengganai, kampung dipimpin oleh para tuo-tuo tengganai, negeri dipimpin oleh Batin (pemuka adat), rantau dikendalikan oleh jenang yaitu orang yang menjadi peng-

hubung antara rakyat dan raja dan alam atau kerajaan dipimpin oleh seorang Raja. Lihat Adat rechtbundel XXXII, p.274. Lihat juga Team penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, *Op cit*, 49, yang menyatakan bahwa struktur masyarakat yang demikian adalah di samping berdasarkan geneologis, juga didasarkan kepada teritorial.

19. Lihat, *Ibid*, dan lihat juga Bestuur, Net gowest is administratief werdeeld stb, No: 24, 1913:214.
20. Secara konsepsional, maka untuk memahami bentuk kekuasaan dan pemerintahan yang demikian akan dapat dikaitkan dengan konsep "negara kota" pada masa pemerintahan Yunani Kuno, dimana setiap polis bertindak sebagai negara-negara kecil dan satu sama lainnya tidak terikat oleh hubungan kekuasaan federasi dan untuk memahami konsepsi tentang kekuasaan federal, telah dilukiskan oleh Taufik Abdullah sebagai suatu "*Lembaga Sekral*" yang bertugas untuk menjada "*Ekwilibrimum*" dari berbagai perbedaan yang mungkin timbul antara suatu daerah dengan daerah lainnya.
21. Fungsi yang demikian disebut dengan istilah *empat jenis*, suatu perangkat desa, yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pembuat Undang-undang dan sekaligus sebagai pelaksana undang-undang itu sendiri.
22. Untuk mencari pengertian lebih lanjut lihat serie I dari, *Zuid-Sumatera*, No: 142, 1923: 305-306.
23. Lihat dalam Bestuur, pada *Ibid*; 312.
24. Untuk memahami arti dan bentuk dari gerakan ini, dapat dilihat pada B.R.O. Anderson, *Pemuda Revolusi Indonesia Polities 1945-1946*, Cornell University, 1967. Yang dikutip juga oleh Djoko Suryo, dalam pergolakan daerah di awal Revolusi; Kasus di daerah Pekalongan, *Prisma*, No: 11, Desember, 1978. Dan konsep-konsep yang dikembangkan dalam tulisan itu mempunyai sangkutan erat tulisan ini.

25. Lihat TB. Simatupang dan A.B. Lopian, Pemberontakan di Indonesia: Mengapa dan untuk apa, dalam *Prisma*, No: 7 Agustus 1978 : 3.
26. Untuk melihat kuatnya hubungan antara adat dan agama ini, IAIN STS Jambi telah mengadakan penelitian khusus tentang ini. lihat Integrasi Hukum Islam, dan *Hukum Islam dan Hukum Adat, mengenai pembagian Harta waris dan Harta Pusaka dalam kehidupan sosial masyarakat Jambi*, yang dilambangkan dalam suatu pepatah adat "Adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah" atau Syara' mengato adat memakai.
27. Istilah mati syahid, yaitu suatu kematian suci dalam mem-bela Agama Allah atau suatu mati yang sangat agung di-kalangan umat Islam, karena dengan mati syahir maka segala dosa-dosa yang pernah diperbuatnya akan diampuni oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke surga, sebagai ba-lasan Tuhan terhadap mati syahid. maka dia tidak perlu dimandikan ataupun disembahyangkan, karena darah yang melekat dibadannya akan menjadi saksi tentang keperka-saannya.
28. Pengertian ini mempunyai kaitan yang erat dengan mati syahid, Karena arti perang Sabil adalah perang sabilillah, yaitu perang di jalan Allah dan didalam ajaran Islam terkandung suatu perintah bagi setiap muslimin untuk melak-sanakan jihad fi sabilillah. bila saja dia menghadapi setiap bentuk kezaliman, ketidakadilan ataupun penindasan dari orang kafir kepada kaum Muslimin.
29. Tiga tungku sejarangan, adalah suatu bentuk pemerintahan adat daerah Jambi juga beberapa daerah lainnya, seperti Sumatera Barat, walaupun mereka memberikan istilah de-ngan pemerintahan empat janih, atau basa ampek balai. Dari tiga unsur pemerintahan ini, maka ulama adalah unsur terpenting diantaranya, karena dia tempat bertanya, orang yang berhak memberikan keputusan setiap masalah

- yang timbul, orang terhormat, mempunyai kepribadian yang luhur dan mempunyai pengikut yang massal.
30. Lihat, Clifford Geertz, abangan, santri, priayi, dalam masyarakat Jawa pustaka jaya, Jakarta, 1981.
 31. Dr. Koentjaraningrat, *Metode Antropologi dalam penyelidikan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia*, penerbit Universitas, PT. Jakarta, 1958, hal. 334.
 32. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Tentang Sumatra Tengah*, tahun 1954, hal. 1027.
 33. Ismail Hadi, Pengurus Lembaga Adat Daerah Jambi, wawancara, di Telanaipura Jambi, tanggal, 21 September 1983.
 34. Kementerian Penerangan RI, *Op cit*, hal. 1013.
 35. Ismail Hadi, *Loc cit*, lihat pula catatan R. Syahabuddin, *Sejarah Perjuangan Jambi dari abad ke abad*, 1954.
 36. Syamsir Salam, *Dari cerita Rakyat Hingga timbulnya bentuk-bentuk Kekerabatan di pesisir Daerah Jambi dalam kaitannya dengan penelitian Sejarah*, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jambi, kertas kerja tahun 1980, hal. 24.
 37. Lihat, *Adat dan upacara perkawinan Daerah Jambi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian Sejarah dan Budaya, tahun 1978/1979, hal. 46.
 38. Baca, buku, *Sistem gotong-royong dalam masyarakat Pedesaan Daerah Jambi*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, tahun 1979/1980, hal. 37.
 39. Lihat Zuid Sumatra, *Adat Rechbundels*, XXXV, tahun 1932, hal. 322-324.

BAB IV SOSIAL BUDAYA

4.1 *Organisasi Sosial*

Lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan awal dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Gerakan ini segera diikuti oleh beberapa organisasi lainnya yang berjuang untuk menyusun persatuan, meninggikan derajat bangsa di segala lapangan dan untuk mencapai kemerdekaan di tanah air.

Budi Utomo dapat menghimpun pemuda-pemuda mahasiswa Stovia, golongan-golongan bangsawan, dan orang-orang yang berpendidikan barat lainnya, maka pada tahun 1911 lahirlah Serikat Dagang Islam (SDI) yang pada mulanya hanya terdiri atas pedagang-pedagang batik, karena mereka selalu mendapat kesukaran dalam usaha dagangnya dengan pedagang asing. Pada bulan Nopember 1912 dengan dipimpin oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam (SI). Raden Mastirto Disuryo di Bogor, Haji Saman Hoedi di Solo dan HOS. Tjokroaminoto di Surabaya, dengan melalui berbagai macam proses maka ketiga tokoh tersebut membentuk Serikat Islam pada tiga cabang wilayah kekuasaan yaitu: Jawa Barat yang meliputi Sumatra dan sekitar pulau-pulau Sumatra, Jawa Tengah yang meliputi Kalimantan dan Jawa Timur yang meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau

lain di Indonesia. Ketiga wilayah serta cabang-cabang Serikat Islam ini berada di bawah pengawasan pengurus pusat di Surakarta yang diketuai oleh Haji Samanhoedi.

Selanjutnya pada pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Pebruari 1914 diputuskan bentuk pengurus pusat Serikat Islam. Sebagai ketua kehormatan ditunjuk Haji Samanhoedi, ketua HOS. Tjokroaminoto dan wakil ketua Raden Gunawan.

Ketiga tokoh diberi tanggung jawab untuk memerintah kekuasaan yang telah ditetapkan bersama yaitu Haji Samanhoe-di untuk wilayah Jawa Tengah, HOS. Tjokroaminoto wilayah Jawa Timur dan Gunawan Daerah Jawa Barat.¹⁾

Raden Gunawan adalah salah seorang kawan karib Samanhoedi di Jawa Barat yang giat mempropagandakan Serikat Islam di daerah Sumatra Selatan. Dia dilahirkan tanggal 12 Pebruari 1880 di Jawa Timur, dari anak seorang pegawai pemerintah, pada tahun 1880 ayahnya menjabat sebagai juru tulis pada seorang wedana kemudian menjadi asisten wedana. Ia memperoleh pendidikan agama secara tradisi, tetapi tidak mendalam. Pendidikan lain yaitu sekolah yang didirikan oleh pemerintah pada tingkat rendah serta sekolah administrasi pemerintah. Pada tahun 1899 ia menjadi pegawai kantor pemerintah, sehingga ia dapat saja dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain di Pulau Jawa, yang pada tahun 1907 ia meninggalkan kepegawaiannya.

Serikat Islam yang lahir pada tahun 1912 dengan cepat meluaskan sayap organisasinya di seluruh Nusantara sampai akhir tahun 1913 di daerah Jambi belum ada bentuk organisasi yang jelas kecuali baru organisasi-organisasi sosial seperti, perkumpulan pencak silat yang diiringi dengan bunyi-bunyi gamelan (tawak), perkumpulan kesenian daerah dan pengajian-pengajian.

Baru pada tahun 1914 sesudah Serikat Islam secara resmi berdiri di daerah Jambi,²⁾ maka dalam waktu yang singkat Serikat Islam dapat menyebar di kota Jambi dan sekitarnya, akan tetapi perkembangan Serikat Islam ini tidak banyak mem-

punyai tindakan yang menonjol. Pada mulanya organisasi ini hanya merupakan wadah persatuan umat Islam, yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat Kota Jambi. Hal ini karena pada waktu kedatangan Serikat Islam di Jambi sedang mengalami kekacauan, di mana putra daerah di bawah pimpinan ulama-ulama yang baru datang dari Kota Mekkah ingin melawan Belanda dengan menyadarkan masyarakat melalui pendidikan. Mereka berusaha mendirikan tempat-tempat pendidikan yang sesuai dengan ideologi mereka yaitu mengikuti paham Ahlussunnah Waljama'ah yang fanatik dan anti penjajah Belanda yang dianggap kafir.

Keadaan Serikat Islam yang agresif dan modern selalu mendapat kecurigaan dari para ulama di Kota Jambi, karena mereka khawatir jika Serikat Islam menganut aliran wahabi. Selain itu dari pihak Belanda juga sangat mengkhawatirkan jika para ulama tersebut bergabung dengan Serikat Islam, tentu akan menjadi suatu kekuatan yang membahayakan bagi kedudukan Pemerintah Belanda. Karena itu Belanda selalu berusaha memisahkan antara Serikat Islam dengan para ulama dengan cara menggunakan seorang perantara yang dapat menjembatani hubungan Belanda dengan para ulama, yaitu dengan perantara seorang keturunan Arab yang bernama Sayid Al-Musawa.

Pada mulanya dia adalah seorang kontraktor bangunan Belanda. Sebagai seorang muslim tentu saja ia berkeinginan untuk memajukan agama Islam, maka dengan usahanya beberapa madrasah di seberang kota yang didirikan para ulama tersebut mendapat bantuan dari Belanda, dengan melalui Sayid Abdurrahman Al-Musawa.³)

Lebih dari itu suatu hal yang cukup menarik pula adalah peraturan yang menetapkan bahwa setiap guru/ulama agama yang datang ke Jambi, harus diteliti lebih dahulu oleh *hoofd* penghulu, sebelum diizinkan mengajar. Untuk mengimbangi dan menghancurkan pengaruh Serikat Islam, maka Pemerintah Belanda menghimpun semua guru agama dan ulama ke dalam suatu wadah yang bernama, "Samaratul Insan", dan guna

mengawasi organisasi ini ditugaskan Controleur de Graaf, seorang ahli bahasa Arab dan agama Islam, sehingga organisasi Samaratul Insan benar-benar bersih dari pengaruh-pengaruh yang berbau perjuangan nasional.

Dengan demikian maka dalam masalah politik secara halus Belanda menundukan para ulama, agar tetap jauh dengan Serikat Islam. Apalagi dengan dinyatakannya Serikat Islam yang di huluan sudah menjadi Serikat Abang yang beridentitas komunis yang berasal dari Silungkang Sumatra Barat. Oleh karena itu Serikat Islam kurang mendapatkan tempat di Kota Jambi.

4.2 *Organisasi Pendidikan*

Pada garis besarnya pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi, mencerdaskan serta meningkatkan kemampuan seseorang, sehingga dengan demikian usaha pendidikan merupakan usaha yang sadar dari orang yang dewasa kepada orang yang belum dewasa, dengan tujuan untuk mendewasakan anak. Karena pendidikan itu pada dasarnya tidak terikat oleh waktu, maka dia dapat berlangsung di dalam suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau diluar lingkungan lembaga pendidikan.

Dilihat dari bentuk-bentuk pendidikan, banyak para ahli mengemukakan, diantaranya seperti apa yang pernah dikemukakan Ivan Illich, yaitu pendidikan formal. Pendidikan informal dan pendidikan subsisten.⁴)

Pendidikan formal, adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Maka untuk menyelenggarakan pendidikan formal ini masyarakat telah mempercayakan kepada sekolah, agar dapat mendidik dan mengajar anak-anaknya, sekolah merupakan lembaga utama yang bertugas untuk:

- a) Mengembangkan dan membentuk pribadi siswa,
- b) Mentransmisikan kultural,

- c) Integrasi sosial,
- d) Inovasi, dan
- e) Pra seleksi dan pra lokasi tenaga kerja.⁵)

Dengan demikian pendidikan diartikan sebagai sarana untuk menyiapkan anak didik sebagai calon warga negara dan sebagai manusia berkepribadian. Untuk itu pendidikan di samping menjadi tanggung jawab pemerintah, juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Maka tidak mengherankan jika sejak zaman penjajahan maupun setelah kemerdekaan sekolah-sekolah lalu tumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia, pendidikan formal baru ditumbuhkan oleh Pemerintah Belanda disekitar abad ke 20. Demikian pula halnya keadaan pendidikan di Jambi pada tahun 1914–1916 masih sangat sederhana sekali. Tingkat pendidikan yang ada baru Sekolah Menengah Pertama (*Government*), dan Sekolah Dasar (*Vervolkschool*), kesemuanya masih dalam jumlah yang terbatas dan dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

4.3 Pendidikan Agama

Diakui pula bahwa hampir di setiap daerah pedesaan pendidikan formal yang mula-mula tumbuh adalah pendidikan agama, hal ini mempunyai latar belakang sejarah yang berkaitan dengan sikap dan pola pendidikan yang dikelola oleh penjajah Belanda saat itu. Namun setelah kemerdekaan dicapai, maka kepentingan akan arti pendidikan umum dirasakan keperluannya sehingga dengan demikian bermunculan pula sekolah-sekolah umum, yang diawali dengan tumbuhnya pendidikan umum tingkat bawah seperti Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar, kemudian berkembang menjadi Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas.

Keadaan seperti ini dapat dilihat dari beberapa madrasah yang pertama kali didirikan seperti: Rumah Kutab atau Madrasah Buluh Bambu yang terletak di Kampung Ulu Gedong, ber-

diri tahun 1913 dengan gurunya H. Ibrahim bin Haji Abdul Majid.

Pada tahun 1915 dalam waktu yang hampir bersamaan didirikan empat buah madrasah, yaitu:

1. Madrasah Nurul Iman terletak di Kampung Ulu Gedong.
2. Madrasah Nurul Islam terletak di Tanjung Pasir.
3. Madrasah Sa'adutuddarein terletak di Tahtul Yaman dan
4. Madrasah Jauharein di Tanjung Johor.⁶⁾

Pada masa kejayaannya madrasah-madrasah ini, yaitu antara tahun 1925 sampai dengan 1942 murid-muridnya tidak kurang dari 1000 orang murid. Di samping itu mereka mendatangkan tenaga pengajar/guru-guru yang berasal dari luar negeri antara lain dari Serawak, Bukharo, Malaysia, dan dari Mekkah, Saudi Arabia.⁷⁾

Berbeda dengan pendidikan umum yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, masyarakat tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap pendidikan tersebut. Dengan demikian sedikit sekali murid yang masuk sekolah umum sehingga untuk mengisi sekolah tersebut kepada para pejabat desa dan kecamatan dibebankan untuk mencari murid. Mereka tidak mau sekolah umum karena beranggapan bahwa sekolah umum adalah sekolah yang didirikan oleh orang kafir, sehingga mereka takut kalau sudah selesai belajar akan menjadi orang kafir dan takut kalau nantinya akan dijadikan anak buah Belanda saja. Sebab dalam kenyataannya yang bersekolah pada waktu itu adalah anak para pejabat-pejabat Pemerintah Kolonial Belanda, baik yang berkebangsaan Belanda ataupun bangsa Indonesia yang diangkat menjadi aparat pemerintah. Selain itu mereka juga membedakan kesempatan bagi anak pejabat dan anak orang biasa, anak pejabat dapat melanjutkan sampai ke *Government* sedangkan anak orang biasa meskipun ia mampu, paling tinggi hanya bisa sampai ke *Vervolkschool*. Akan tetapi, masa kejayaan madrasah-madrasah ini terhenti pada zaman penjajahan Jepang ± 3½ tahun lamanya. Selama itu pula segala kegiatan pem-

bangunan baik fisik materiil maupun mental terhenti, karena rakyat dipaksa untuk memikirkan kebutuhan hidup bangsa Jepang. Keadaan demikian sangat mempengaruhi kepada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia khususnya daerah Jambi, hal ini berlangsung sampai pada zaman kemerdekaan.

Setelah rakyat merasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan tahun 1945, baru mulai mengatur langkah dan menyusun kembali kekuatan untuk bergerak dan berjuang membenahi diri di segala bidang. Di antaranya dalam bidang pendidikan yang tadinya macet selama penjajahan Jepang maka mulai tahun 1945 lembaga-lembaga pendidikan masih mencari modus yang baru dan metoda yang baik untuk memajukan pendidikan guna mengejar ketinggalan. Ini terbukti mulai tahun 1950 banyak madrasah-madrasah yang berdiri dan dikelola oleh marga, yang dananya diambilkan dari hasil cukai karet, yaitu setiap kuintal karet ditarik Rp.50,- untuk digunakan bagi kepentingan pendidikan dan dari sinilah marga dapat membayar gaji para guru madrasah.

Namun sejak tahun 1960, keadaan madrasah ini mulai menurun kembali. walaupun secara fisik kelihatan madrasah ini masih baik, popularitas madrasah mulai berkurang, animo masyarakat menyerahkan anaknya ke madrasah mulai berkurang, di antara beberapa penyebab kemunduran ini dapat dilihat bahwa :

- a. Dihapuskannya cukai karet, sehingga madrasah kehilangan sumber dananya.
- b. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap madrasah, sehingga madrasah tidak mempunyai sumber dana lagi, sebagai pelanjut kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh madrasah tersebut.
- c. Terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap madrasah seperti :
 - prospektif pendidikan agama;

- lingkungan pendidikan, di mana pada bagian ini terlihat adanya klasifikasi pandangan masyarakat terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum, yang menilai bahwa kelompok yang berpendidikan agama adalah dinilai sebagai kelompok yang statis dan tradisional, sedang mereka yang berpendidikan umum, adalah mereka yang berpandangan dinamis dan modern; dan
- lapangan pekerjaan, orang yang berpendidikan agama dinilai akan mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, sedang mereka yang berpendidikan umum relatif lebih mudah.

Namun kebangkitan kembali madrasah-madrasah ini terlihat pula sejak tahun 1972, yaitu dengan berkembangnya madrasah-madrasah negeri, sehingga hal ini kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama, di samping itu juga terlihat bahwa dengan status negerinya madrasah itu, maka kesangsian akan kemungkinan mendapat pekerjaan makin berkurang.

Beberapa data tentang sekolah-sekolah agama dapat dilihat dalam tabel terlampir. Suatu kenyataan yang dapat dilihat bahwa beberapa sumbangan yang berarti dari lembaga pendidikan agama ini adalah, bahwa lembaga ini telah banyak menarik masyarakat dan menciptakan beberapa pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama hal ini terjadi pada masa penjajahan Belanda, yaitu karena terlalu sulitnya bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan yang diselenggarakan Belanda pada saat itu. Di samping itu tidak diperlukan persyaratan yang berat bagi setiap orang untuk memasuki lembaga pendidikan agama. Hal ini juga didasarkan bahwa menyelenggarakan pendidikan agama, adalah merupakan ibadah bagi penganut agama tersebut, sedangkan bagi para ulama, adanya tuntutan untuk menyampaikan pengetahuannya, kepada setiap orang dan adanya sifat kekeluargaan yang besar yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan agama. Tetapi akibat yang dirasakan dari bentuk pendidikan

yang demikian, yaitu kurang terjamin kualitas pendidikan, disiplin, yang sangat diperlukan dalam pembentukan individu sebagai tujuan akhir dalam suatu pendidikan.

Setelah lembaga-lembaga pendidikan agama ini mengalami masa kemundurannya, kemudian di awal tahun tujuh puluhan lembaga-lembaga pendidikan agama ini kembali mendapat tempat dalam hati masyarakat, karena makin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan ini yang dinegerikan, sehingga hal ini telah dapat memberikan kepercayaan kembali bagi masyarakat akan arti suatu pendidikan agama, di samping itu kemungkinan akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dengan status negeri itu, berarti antara lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum mempunyai kesempatan yang sama.

Hal ini dipertegas lagi melalui surat keputusan bersama tiga menteri telah diadakan penyesuaian dengan kurikulum-kurikulum sekolah umum. Pada tahap ini terlihat bahwa sekolah-sekolah agama telah menjurus kepada suatu arah yang sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya, yaitu terujudnya suatu kesatuan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.⁸) sehingga dengan demikian sikap isolatif pendidikan agama telah dapat terjembatani dengan terujudnya surat keputusan bersama tiga menteri ini.

4.4 *Pendidikan Umum*

Dari segi sekolah umum, perkembangan sektor pendidikan telah cukup menggembirakan sebab hampir seluruh jenis tingkatan pendidikan telah ada di daerah Jambi. Adapun jenis-jenis sekolah di daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Taman Kanak-kanak/Pra Sekolah

Sampai dengan akhir tahun 1974 jumlah Taman Kanak-kanak yang terdapat di daerah ini sebanyak 59 buah yang kesemuanya berstatus swasta, dengan jumlah murid \pm 4112 anak. Taman Kanak-kanak ini sebagian besar berlokasi di ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/kotamadya, sedangkan di tingkat kecamatan perkembangannya belum begitu menonjol.

b) Sekolah Dasar

Secara keseluruhan jumlah sekolah dasar yang ada di Jambi sebanyak 1065 buah yang terdiri atas 954 buah SD Negeri/SD Inpres dan 111 buah Sekolah Dasar Swasta. Sedang jumlah murid yang dapat ditampung \pm 115.186 anak, sedangkan anak usia sekolah (7-12) berjumlah 180.372 orang.

Pada akhir Pelita II, jumlah murid sekolah dasar yang dapat ditampung di sekolah dasar berjumlah sebanyak 169.176 orang. Hal ini berarti terjadi peningkatan daya tampung di tingkat Sekolah Dasar dari 115.186 orang menjadi 169.146 orang.

Peningkatan daya tampung seperti ini menunjukkan adanya suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, hal ini terutama erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program Inpres Sekolah Dasar sebagai sarana dalam memperluas kesempatan belajar serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan.

c) Sekolah Lanjutan Pertama

Pada tingkat Sekolah Lanjutan Pertama di daerah Jambi tersedia fasilitas pendidikan berupa 81 buah SMP yang terdiri atas 37 buah SMP Negeri/Filial dan 44 buah SMP Swasta, SMEP Negeri 8 buah ST 5 buah masing-masing 4 buah ST Negeri dan sebuah ST Swasta, dan SKKP dua buah. Sejalan dengan garis kebijaksanaan menteri P & K mengenai pengintegrasian SMEP, ST dan SKKP, maka sampai dengan akhir tahun 1978 sebagian dari sekolah-sekolah tersebut telah digabungkan menjadi SMP Integrasi yaitu 11 buah.

Secara keseluruhan jumlah murid SLP pada tahun 1974/1975 adalah 11.292 orang dengan anak usia sekolah 75.506 orang. Pada tahun 1978/1979 jumlah murid SLP yang dapat ditampung adalah sebanyak 88.992.

d) Sekolah Lanjutan Atas.

Dari jenis Sekolah Lanjutan Atas ini dapat diklasifikasikan atas :

- 1) SMA/SMPP sebanyak 16 buah yang masing-masing terdiri dari 9 buah SMA Negeri, sebuah SMPP Negeri dan 6 buah SMA Swasta. Jumlah Murid SMA pada tahun 1974/1975 adalah 1.706 orang dan pada tahun 1978/1979 adalah 3.951.
- 2) STM sebanyak 4 buah masing-masing; 2 buah STM Negeri dan 2 buah STM Swasta. Dengan jumlah murid pada tahun 1974/1975 adalah 691 orang dan pada tahun 1978/1979 sebanyak 1.349 orang.
- 3) SMEA, jumlah SMEA seluruhnya 6 buah masing-masing 3 SMEA Negeri/Pembina, 3 SMEA Swasta. Jumlah murid pada tahun 1974/1975 adalah 901 orang dan pada tahun 1978/1979 sebanyak 1.657 orang.
- 4) SPG/KPG
Jumlah SPG/KPG yang ada adalah 9 buah masing-masing 3 SPG Negeri sebuah KPG Negeri dan 5 buah SPG/KPG Swasta. Jumlah murid SPG (tidak termasuk KPG) pada tahun 1974/1975 adalah 674 orang dan pada tahun 1978/1979 sebanyak 2.282 orang. Adanya kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya animo masyarakat (murid) untuk memasuki SPG sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah dalam hal perbaikan dan peningkatan penghargaan terhadap status sosial ekonomi guru dan terbukanya kesempatan yang luas untuk diangkat menjadi pegawai negeri dalam rangka memenuhi tenaga guru.

5) SKKA/SMKK

Jenis sekolahan ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti di Jambi hanya terdapat sebuah SMKK Negeri dan sebuah SMKK Swasta dengan jumlah murid pada tahun 1974/1975 sebanyak 163 orang dan pada tahun 1978/1979 adalah 181 orang. Di samping jenis-jenis Sekolah Lanjutan Atas seperti tersebut di atas, masih terdapat pula KPA/KPAA Negeri sebanyak dua buah dan KPA/KPAA Swasta sebuah. Di luar lingkungan Departemen P & K juga terdapat SPMA yang diasuh oleh Pemda (cq. Dinas Pertanian), PGA Negeri/Swasta sebanyak 17 buah dan Madrasah dalam berbagai tingkatan sebanyak 423 buah (Negeri dan Swasta).

e) Perguruan Tinggi

Di Daerah Jambi telah tersedia pula fasilitas pendidikan tingkat universitas/akademi sebanyak 5 buah, yang terdiri dari sebuah Universitas Negeri Jambi (UNJA) yang dibangun sejak tahun 1963, sebuah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang dibangun sejak tahun 1967, sebuah Akademi Kedinasan (APDN), sebuah Akademi dengan status terdaftar (AAN) dan sebuah Sekolah Tinggi (STKIP) dengan status terdaftar pada Kopertis.

Universitas Negeri Jambi memiliki 5 buah fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP). Sedangkan Institut Agama Islam Negeri memiliki 3 fakultas yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah (Jurusan Pendidikan Agama dan Tadris IPS - IPA).

Suatu kemajuan yang menggembirakan di bidang pendidikan tinggi adalah bahwa sejak beberapa tahun yang lalu telah dapat dihasilkan sarjana muda dan sarjana lengkap dari berbagai perguruan tinggi/akademi dengan demikian bagi putra daerah dan warga masyarakat studi di daerah Jambi telah terbuka ke-

sempatan luas untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya di lingkungan perguruan tinggi.

Menyadari akan fungsi dan peranan yang dimainkan perguruan tinggi dalam kegiatan pembangunan daerah Jambi khususnya, maka dalam rangka menunjang kegiatan akademis di lingkungan perguruan tinggi yang ada, pemerintah daerah selalu memberikan perhatian khusus dengan memberikan dana APBD dalam yang setiap tahunnya semakin meningkat untuk kemajuan pengembangan pendidikan tinggi. Dengan demikian diharapkan bahwa perguruan tinggi yang ada di daerah Jambi pada suatu waktu akan mampu mengikuti perkembangan seperti yang telah dicapai di daerah.

f) Keadaan Guru

Sampai dengan tahun 1978 jumlah guru SD Negeri dan Swasta tercatat sebanyak 6.130 orang (tidak termasuk guru Agama). Sedang jumlah guru SMP Negeri dan Swasta sebanyak 957 orang, SMEP Negeri sebanyak 29 orang serta ST 77 orang, jumlah guru SMEA Negeri dan Swasta sebanyak 93 orang, STM 81 orang, SKKA Negeri dan Swasta 26 orang, SPG 160 orang dan jumlah guru pada SMA Negeri dan Swasta sebanyak 218 orang.

Dari jumlah guru-guru yang ada, maka daerah Jambi masih kekurangan tenaga-tenaga guru. Di tingkat Sekolah Dasar kekurangan tenaga guru ini terutama sekali di daerah-daerah luar kota/pedesaan. Sedangkan untuk SLTP dan SLTA kekurangan tenaga guru amat dirasakan untuk bidang studi Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pendidikan informal, dipergunakan terutama bagi anak-anak putus sekolah, agar dapat memiliki ketrampilan kerja, dengan melalui pendidikan di luar sekolah atau "*Out of School*". Pendidikan ini dilaksanakan diluar sekolah oleh badan-badan pemerintah ataupun swasta, secara teratur dalam waktu yang relatif singkat, yang lebih menekankan kepada kecakapan dan ketrampilan tertentu, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ketat dan tetap seperti pendidikan formal.

Walaupun pendidikan informal ini dilaksanakan di luar sekolah, namun tidaklah berarti bahwa pendidikan itu dapat dilaksanakan semuanya, karena pendidikan ini lebih spesifik, maka dia dapat dilaksanakan pada lingkungan yang sesuai, dengan berbagai persyaratan seperti:

- a) Pendidikan informal harus jelas tujuannya dan harus pula jelas harapkan, serta kegunaannya bagi masyarakat;
- b) Program pendidikan informal harus menarik, baik hasil yang ingin dicapai, maupun cara pelaksanaannya; dan
- c) Program pendidikan informal ini, harus pula sejalan dengan program-program pembangunan dalam masyarakat.

Dalam kenyataan lapangan, kegiatan pendidikan informal ini tidak banyak ditemui pada tahun 1950 s.d. 1962, baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan dan desa, kecuali hanya kegiatan kepemudaan melalui kependuan, di mana kependuan ini banyak dilaksanakan oleh organisasi-organisasi sosial dan politik, seperti adanya Pandu Islam yang diadakan oleh Masyumi, Hizbul Wathan oleh Muhammadiyah dan Pandu Nasional oleh PNI dan Pandu Ansor oleh NU.

Setelah tahun 1962 sampai dengan tahun 1969, nampak bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan informal ini, lebih banyak diwarnai oleh berbagai-bagai kepentingan politik, apakah sebagai alat konsolidasi, maupun sebagai counter dari suatu aktifitas politik lainnya. Walaupun jalur yang digunakan adalah jalur pemuda, wanita, atau bidang-bidang profesi lainnya, seperti petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya.

Kegiatan pendidikan informal ini mulai terlihat di daerah pedesaan, yaitu sekitar tahun 1971, dengan terbentuknya berbagai wadah kegiatan seperti Panti Ketrampilan Wanita (PKW), Pembinaan Kegiatan Keluarga Berencana dan Anak (PK3A) dan Karang Taruna.

Hampir dari keseluruhan desa penelitian telah terlihat adanya kegiatan-kegiatan pendidikan informal ini, seperti Panti

Ketrampilan Wanita, bertujuan untuk membantu mendidik masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga, agar dapat mengatur dan meningkatkan tata kehidupan keluarganya. Di antara kegiatan-kegiatannya adalah PKK kursus menjahit terutama bagi anak-anak gadis, merajut dan lain sebagainya. Kegiatan PKW ini lebih intensif sejak tahun 1979. Begitu pula dengan PK3A, mempunyai kaitan kerja dengan Dinas Sosial propinsi maupun kabupaten dan juga dengan BKKBN, yang lebih menjujurkan kegiatannya kepada pembinaan Keluarga Berencana. Sedangkan Karang Taruna, suatu wadah yang dipergunakan oleh pemerintah untuk membina dan mengembangkan bakat dan ketrampilan kaum remaja, juga baru nampak aktifitasnya di daerah-daerah pedesaan dari ketiga lokasi penelitian ini, yaitu sekitar tahun 1975. Kegiatan utama dari Karang Taruna ini diarahkan kepada kegiatan yang bersifat positif dan edukatif, seperti mengembangkan ketrampilan dan bakat melalui olah raga, kesenian, membantu pemerintah dalam peringatan-peringatan hari besar. Namun kegiatan pembinaan ketrampilan kerja bagi pemuda putus sekolah, belum berkembang dikalangan mereka.

Selain dari pendidikan formal dan informal, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka suatu bentuk pendidikan lainnya disebut pula dengan pendidikan subsisten atau *subsistence education* suatu istilah yang belum begitu populer di kalangan masyarakat, walaupun sebenarnya bentuk pendidikan itu telah ada namun bentuk pendidikan demikian lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Non Formal. Perkataan subsisten ini lebih banyak dikenal dalam lingkungan pertanian yang berasal dari kata-kata *subsist* dan berarti hidup. Mubyarto mengatakan bahwa pertanian yang subsisten, diartikan sebagai suatu sistem bertani, di mana tujuan utama dari sipetani adalah untuk memenuhi keperluannya dan keluarganya. Sedangkan di kalangan pendidikan istilah ini digunakan, untuk membedakan bentuk pendidikan yang diberikan oleh orang tua atau orang dewasa

lainnya, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan lainnya, tanpa adanya pungutan biaya.

Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, atau dapat pula dipergunakan untuk mencari nafkah, seperti kecakapan memasak, menjahit, membangun rumah, mengemudikan mobil, mencangkul sawah dan memelihara ternak, ataupun bentuk-bentuk kecakapan lainnya adalah merupakan kecakapan yang dapat dipergunakan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk pendidikan ini sebenarnya lebih banyak berkembang di daerah pedesaan atau di tempat-tempat lain yang tingkat pendapatannya lebih rendah, karena makin rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, maka akan tinggi tingkat pendidikan subsisten yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan. Makin tinggi kesaran masyarakat akan tingkat kebutuhan, makin tinggi pula tingkat kegiatan pendidikan subsisten dalam masyarakat. Maka sebagai hasil yang nampak, di daerah pedesaan kegiatan pendidikan subsisten relatif lebih tinggi, bila dibandingkan dengan kedua daerah lainnya. Sebagai ukuran kegiatan itu diambil beberapa patokan seperti :

- a) Tingkat pendapatan rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- b) Jumlah anak yang bersekolah dan jumlah kebutuhan dalam pendidikan;
- c) Bentuk-bentuk kegiatan anak usia sekolah dalam rumah tangga;
- d) Tingkat kesadaran masyarakat akan arti kebutuhan pokok dalam rumah tangga; dan
- e) Bentuk-bentuk kegiatan anggota rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

4.5 *Kebudayaan*

Dalam bidang kebudayaan telah dirintis usaha membina serta menghidupkan kebudayaan di daerah Jambi. Pemerintah

telah menempuh berbagai kebijaksanaan berupa dorongan atas penciptaan kreasi baru, pemeliharaan hasil-hasil budaya yang sudah ada. Juga pemugaran dan pemeliharaan bangunan-bangunan tempat-tempat bersejarah. Maka dalam menyelamatkan warisan budaya nasional, sejak tahun 1976 telah dilakukan upaya pemugaran candi-candi peninggalan sejarah/purbakala yang berlokasi di Muara Jambi, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Batanghari, kurang lebih 20 km dari Kota Jambi. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa buah candi sebagai bukti peninggalan sejarah seperti:

1) Candi Astano

Candi ini pada semula sudah tidak kelihatan lagi sebab tertimbun tanah yang ditumbuhi rerumputan dan pohon-pohon kayu. Setelah diadakan penggalian, ternyata disekitar Candi Astano ini juga dijumpai peninggalan sejarah purbakala lainnya seperti pecahan-pecahan patung, tangan patung, kaki sebelah kanan, guci, keramik dan batu bata berukuran bunga.

2) Candi Tinggi

Candi ini terletak di sebelah barat candi Astano, kira-kira 1 km dalam jarak lurus. Jalan yang menghubungkan antara kedua candi ini telah dibuat oleh Proyek P.4.J. yang masih bersifat darurat. Di sebelah barat dari candi tinggi terdapat reruntuhan sebuah gapura (pintu gerbang) dan di sekitarnya terdapat pula bekas reruntuhan pagar berparit, dan bahan batu bata yang mengelilingi seluruh lokasi candi.

3) Candi Gumpung

Lokasi candi ini terletak kira-kira 100 meter di sebelah barat Candi Tinggi. Seperti juga Candi Tinggi, seluruh lokasi Candi Gumpung ini dibatasi oleh pagar berparit, dan di sekeliling pagar ditemukan pula benda-benda yang cukup menarik perhatian seperti; sebuah menara, dari batu alam, sebuah arca wanita yang bersikap semedi, dan beberapa buah stupa.

4) Candi-candi lainnya, selain candi-candi tersebut di atas juga dijumpai candi lain seperti: Candi Kembar Batu, Candi Telago Raji, Candi Gudang Garam, Candi Kandang Kerbau, Candi Kedaton dan Candi Koto Mahligai.

4.6 *Seni tari Daerah*

Di samping peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagaimana tersebut di atas, di daerah Jambi terdapat pula berbagai jenis budaya lainnya yang hidup dan terpelihara sebagai suatu tradisi masyarakat, hampir setiap kabupaten mempunyai jenis-jenis tari yang pada umumnya bersumber dari kehidupan bertani menangkap ikan, dan berburu. Dari sejumlah tari-tarian dapat disebutkan beberapa buah di antaranya:

- 1) Tari Serampit Delapan Tulang Bawang, tari ini sangat populer di seluruh kabupaten. Propinsi Jambi dan bahkan sering dipertunjukkan di arena nasional. Dalam penampilannya tari ini diiringi oleh lagu rakyat yang berjudul tumbuk tebing. Tari ini mengisahkan para remaja di mana sewaktu sang putri ditinggalkan kekasih yang pergi merantau, kemudian kembali ke desa untuk mempersuntingnya. Di samping itu tari ini mencerminkan kehidupan gotong royong pada malam hari di bulan purnama anak-anak remaja bersuka ria.
- 2) Tari Sekapur Sirih; merupakan tari adat di lingkungan kerajaan, dan dipergunakan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan.
- 3) Tari Kelik Elang; tari ini di samping untuk melakukan pengobatan, minta rezeki, juga mengisahkan tentang kemesraan sepasang burung elang yang terbang di angkasa sebagai lambang kemesraan pasangan remaja.
- 4) Tari Bersalih atau tari Burung Undan; tari ini merupakan tari dari masyarakat suku anak dalam/terasing yang melukiskan upacara pengobatan bila salah seorang anggota keluarga/suku mendapat sakit yang diakibatkan oleh gangguan roh jahat.

- 5) **Tari Nelayan; merupakan tari kreasi yang mengisahkan kegembiraan para nelayan pada musim menangkap ikan.**

Dari beberapa alat musik tradisional yang sampai sekarang masih terpakai di antaranya seperti: rebab, gambus, kecapi, kelintang, tawak/gong keromong, gendang dan terompet tangan.

CATATAN BAB IV

1. Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, LP3ES, Jakarta, 1979, hal. 317-318.
2. Departemen P & K, Kanwil Propinsi Jambi, *Menyeluk Daerah Jambi*, Team Survey/Perencanaan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum, Jambi, 1977-1978, hal. 38.
3. H.M.O. Bafadhal, Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *wawancara*, tanggal, 12 September 1983.
4. Evers, Hans Dieter, Hasil Seminar, 1979, hal. 18.
5. *I b i d.*
6. Team penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Jambi*, 1978/1979, hal. 16.
7. Baca, *Gerakan Ulama Jambi*, Laporan penelitian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin 1982/1983, hal. 86.
8. *Lihat Undang-undang Dasar dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.*

BAB V JARINGAN PEREKONOMIAN RAKYAT

5.1 *Sejarah Ringkas Perekonomian Rakyat*

5.1.1 *Sebelum Abad XX*

Pada mulanya perekonomian rakyat daerah Jambi masih tergantung pada usaha yang bersifat tradisional. Sifat ketradisionalannya tersebut di samping dari segi teknis, juga dari segi jenis usaha yang dilakukannya. Dari segi teknis, terletak pada peralatan yang dipergunakan dan cara-cara mengolahnya. Adapun jenis usaha rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha yang terletak di daerah daratan dan usaha yang terletak di sungai/laut.

Usaha di daerah daratan adalah bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengambil kekayaan alam yang ada di hutan. Hasil yang diperoleh dari hutan yaitu getah-getahan. Seperti getah jeruang, getah balam, getah manau, juga hasil damar, rotan serta binatang buruan dengan gading gajah yang sangat mahal harganya. Hasil yang diperoleh dari hutan itu di samping untuk keperluan sendiri, banyak juga diimport ke luar negeri. Daerah Jambi hampir ke seluruh pelosok terdapat aliran sungai dengan Batang Hari sebagai sungai yang terbesar dan sepanjang sungai-sungai tersebut di samping dipergunakan sebagai sarana transportasi dan untuk memenuhi kebutuhan hi-

dup sehari-hari akan air, juga mengandung ikan yang sangat besar. Penangkapan ikan yang dilakukan rakyat masih mempergunakan alat yang sederhana sekali, yaitu pancing atau jaring. Namun setidaknya-tidaknya usaha ini dapat membantu perekonomian mereka.

Dari bentuk usaha rakyat yang dilakukan di darat maupun di sungai atau laut, maka timbullah hukum adat Jambi yang berbunyi: "Ke laut berbunga pasir, kedarat berbunga kayu".¹⁾

5.1.2 *Permulaan Abad XX Sampai Penjajahan Jepang*

Pada masa ini mulai dikenal tanaman karet, di mana bibitnya dibawa oleh para pedagang dari Malaysia dan Singapura.²⁾ Adanya usaha baru di bidang perkaretan ini membawa pengaruh membaiknya perekonomian rakyat, karena harganya cukup baik. Pemerintah Kolonial Belanda sangat berkepentingan dalam perkebunan karet ini sehingga pada mulanya agresif sekali untuk mengembangkan penanaman karet.

Untuk memberikan rangsangan kepada rakyat petani karet, Pemerintah Belanda membagi-bagi kupon untuk ditukar beras. Karena nilai tukar kupon dengan beras itu cukup tinggi, yang kadang-kadang melebihi hasil sadapan karet yang sebenarnya, lagi pula tidak ada keharusan bagi para petani untuk mengolah kebun karetnya dengan baik, maka akibatnya banyak kebun karet yang terlantar, karena mereka sudah merasa cukup dengan jaminan kupon tersebut. Hal ini yang dianggap sebagai faktor bagi rakyat Jambi bersifat pemalas.³⁾ Kondisi ekonomi rakyat pada masa ini sangat baik, sehingga timbul istilah zaman emas.

5.1.3 *Masa Penjajahan Jepang*

Pada masa penjajahan Jepang adalah masa yang terburuk bagi rakyat Jambi. Keadaan ini bertolak belakang dengan masa sebelumnya. Kupon yang diberikan oleh Pemerintah Belanda kepada rakyat pemilik kebun karet sudah tidak ada lagi, bahkan

Pemerintah Militer Jepang melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan rakyat demi kepentingannya sendiri, yaitu:

- 1) Penebangan pohon-pohon karet sekitar kota Jambi untuk dijadikan kebun ubi
- 2) Mengerahkan rakyat berkebun ubi, siapa yang tidak bekerja, tidak boleh makan
- 3) Perintah menjadi Romusya (kerja bakti) ke Palembang dan mengerjakan jalan antara Sarolangun Rawas – Sarolangun Jambi
- 4) Pemuda-pemuda dianjurkan memasuki Heiko (tentara sukarela) dan Giu Gun
- 5) Kinrohasi - kerja bakti dalam daerah
- 6) Pengumpulan padi, beras dalam daerah Jambi yaitu beras dari Tungkak dan Muara Sabak ⁴)

Rakyat pada masa ini diproses demi kepentingan Pemerintah Militer Jepang yang sedang menghadapi perang dengan tentara sekutu. Kondisi ekonomi rakyat benar-benar sangat menyedihkan. Kebutuhan hidup yang vital yakni makan dan sandang tidak dapat tercukupi. Menurut riwayat Bapak H.M. Saman Samsuddin pada zaman penjajahan Jepang banyak rakyat yang sampai menjual pakaian, perabot rumah tangga, sampai atap rumahpun dibuka sekedar untuk makan.⁵)

5.1.4 *Zaman Kemerdekaan*

Pada permulaan masa kemerdekaan yang disebut dengan zaman revolusi, penguasa militer beserta rakyat Jambi masih mencurahkan perhatiannya dalam mempertahankan kemerdekaan, melawan tentara sekutu, di mana pihak Belanda ingin menjajah kembali setelah beberapa tahun dikuasai oleh Pemerintah Militer Jepang.

Pada masa perang kemerdekaan ini Jambi mempunyai peranan yang penting dalam bidang keuangan RI, karena penguasa-

sa militer di Jambi dipercayakan untuk mencetak uang Urips. Menteri Keuangan PDRI. Mr. Lukman Hakim pada tanggal 18 Maret 1949 mengeluarkan instruksi No. 273/PDRI kepada pemerintah militer di Jambi untuk mencetak uang Urips dalam pecahan Rp. 5,- dan Rp. 10,- di mana uang tersebut Instruksi Menteri Keuangan No. 360/KU/PDRI tanggal 4-4-1949 berlaku untuk seluruh Sumatra. Untuk melaksanakan instruksi menteri keuangan itu dewan pertahanan daerah Jambi membentuk suatu badan yang bertugas membangun percetakan dan bertanggung jawab atas pencetakan uang tersebut. Badan itu dipimpin oleh A. Bastari, sedangkan sebagai kepala percetakannya ditunjuk Kapten Udara Surjono. Tempat kedudukan pencetakan uang tersebut selalu berpindah-pindah karena faktor keamanan. Pertama kali terletak di Muara Tebo, kemudian pindah ke Teluk Pandak 10 km dari Muara Bungo, kemudian ke Tebing Tinggi. Kecamatan Tanah Tumbuh dan terakhir di Rantau Ikil di Muara Jujuhan 25 km pedalaman Tanah Tumbuh, di mana tempat yang terakhir ini pelaksanaan pencetakan uang Urip berjalan dengan aman sampai adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 28 Desember 1949.⁶⁾

Setelah penjajahan kembali dari Pemerintah Kolonial Belanda berakhir, keadaan ekonomi rakyat membaik kembali. Hal ini karena faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Komoditi karet berjalan dengan lancar dan harganya cukup tinggi.
- 2) Arus perdagangan Jambi-Singapura membaik kembali, dimana barang-barang produksi luar negeri dapat masuk ke Jambi dengan harga yang relatif murah dan hasil-hasil kekayaan alam dapat diekspor ke luar negeri. Perubahan yang langsung dirasakan rakyat banyak adalah setelah jatuhnya harga karet, dimana mayoritas penduduk Jambi (lebih dari 60%),⁷⁾ kehidupannya tergantung dari karet.

5.2 *Jenis-jenis usaha rakyat*

5.2.1 *Pertanian*⁸⁾

Bagi rakyat Jambi, mata pencaharian utamanya adalah bertani, di mana pertanian padi merupakan usaha yang penting, karena makanan pokok rakyatnya adalah beras.⁹⁾ Mengingat daerah Jambi terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi, maka usaha tanaman padi dikerjakan di tanah basah/persawahan dan tanah kering.

Daerah tanah basah/persawahan ini meliputi :

- a. Sawah payo, yaitu persawahan yang dilaksanakan di daerah-daerah dataran rendah basah atau daerah diantara tanah yang berbukit-bukit sehingga membentuk payo. Sawah ini biasanya tidak memerlukan adanya pengairan yang teratur, karena tanahnya selalu terendam air.
- b. Sawah tebat, yaitu persawahan yang telah dikotak-kotak, biasanya terletak di daerah dataran rendah kering dan juga daerah pegunungan. Sawah ini memerlukan pengairan yang teratur, yaitu air-air yang didapat dari daerah pegunungan dialirkan ke sawah-sawah melalui parit-parit yang dibuat untuk itu.
- c. Sawah kincir, yaitu sawah yang diairi dengan air yang berasal dari sungai-sungai yang dinaikkan ke sawah melalui kincir-kincir air.

Jenis tanaman padi yang diusahakan di tanah kering yaitu dengan perladangan dengan jenis padi gogo merupakan bagian yang terbesar, jenis ini umumnya dikerjakan pada daerah baru, yaitu dengan membuka hutan di mana tanahnya masih sangat subur serta belum tumbuh rumput.

Untuk daerah Kotamadya Jambi dalam hal pertanian padi ini hanya terdapat jenis padi yang ditanam di tanah kering dan di tanah payo.¹⁰⁾

Dalam bidang pertanian selain tanaman padi, ditanam pula tanaman muda yang dikerjakan di tanah perladangan. Tanaman tersebut merupakan tanaman palawija yang meliputi jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang kedele, sayur mayur dan buah-buahan, Jenis ini terdapat di seluruh daerah kabupaten tingkat dua termasuk Kotamadya Jambi.

Apabila diilustrasikan antara luas areal tanah dan hasil produksi dari tanaman padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan selama Repelita II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 Keadaan Perkembangan Luas Panen Dan Produksi Padi Dalam Propinsi Jambi Selama Repelita II

Tahun	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produksi rata-rata (ton/ha)
1974/1975	133 712	352 837	26.39
1975/1976	142 680	385 838	27.64
1976/1977	136 414	360 924	25.72
1977/1978	151 512	414 646	27.37
1978/1979	147 336	403 105	27.27

Sumber Data: Jambi yang menanti jamahan.

Tabel 7. Perkembangan Luas Panen Dan Produksi Tanaman Palawija Sayur-sayuran Dan Hortikultura Selama Pelita II Di Propinsi Jambi

Tahun	Palawija		Sayur-sayuran		Hortikultura	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas panen (ha)	Produksi (ton)
1974	8.972	56.443	13.042	11.328	6.801	16.781
1975	8.895	56.926	3.109	13.478	7.676	22.091
1976	10.599	66.011	3.328	14.833	11.094	33.742
1977	10.862	65.533	3.369	13.126	12.528	36.058
1978	10.694	64.557	3.700	14.800	13.000	39.000

Sumber: Jambi yang menanti jamahan.

5.2.2 Perkebunan

Perkebunan merupakan jenis tanaman keras di luar tanaman buah-buahan yang meliputi: karet, kopi, teh, kelapa, kulit kayu manis (*Coscinervia*), cengkih, pala, kelapa sawit, kapuk randu dan lain-lainnya, dan juga tanaman muda yang semusim seperti tembakau, jahe dan yang sejenisnya.

Jenis perkebunan tanaman keras di daerah Jambi yang paling besar adalah tanaman karet. Sejak tahun 1904 Pemerintah Kolonial Belanda mewajibkan kepada penduduk pribumi untuk menanam yang pelaksanaannya langsung diawasi oleh para demang, asisten demang, para *ambtenar* dan lain-lain. Untuk memperoleh bibit karet, para petani pribumi diwajibkan membeli kepada pemerintah kolonial dengan harga f. 1 per batang.

Untuk mencapai tujuan perluasan penanaman karet di Jambi, Pemerintah Kolonial Belanda melarang ekspor bahan makanan ke luar daerah dan menutup jalan perdagangan darat ke

Sumatra Barat. Dengan usaha ini maka kegiatan dalam bahan makanan dapat dimonopoli dan berhasil melaksanakan kerja paksa (rodi) bagi masyarakat terutama pada *onderneming-onderneming* Belanda.

Politik Pemerintah Kolonial Belanda itu ternyata dapat berhasil baik, karena tertutupnya ekspor ke luar daerah dari hasil bahan makanan itu berakibat jatuhnya harga bahan makanan di daerah Jambi. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengalihkan usaha pertanian mereka kepada usaha perkebunan karet, sehingga sawah-sawah pertanian mereka jadi terlantar. Namun hal ini kemudian mempunyai efek yang buruk bagi masyarakat, yaitu mereka kekurangan bahan makanan. Untuk memenuhi kekurangan bahan makanan ini kemudian pihak Belanda mendatangkan beras dari Singapura. Hal ini sebenarnya memang sudah direncanakan oleh Belanda, agar masyarakat kehidupannya merasa tergantung dari Pemerintah Kolonial Belanda sehingga mereka mudah untuk diajak berunding sesuai yang diinginkan pihak Belanda sendiri.

Di samping faktor politik Belanda dalam menguasai bahan makanan itu, maka menanjaknya harga karet, menyebabkan perkebunan karet berkembang dengan pesat. Pada tahun 1912 harga karet di Singapura telah mencapai 5.200,00 perton.^{1 1)} Dalam hal perkembangan populasi tanaman karet ini pada tahun 1907 mencapai 5.796 batang, tahun 1912 mencapai 2 juta batang dan tahun 1914 di Muara Tembesi saja mencapai 4 juta batang serta di Jambi (*onderafdeeling*) lebih dari 2 juta batang.^{1 2)}

5.2.3 Perikanan

Usaha dalam bidang perikanan masih bersifat tradisional baik penangkapan ikan yang dilakukan di sungai atau danau (perikanan darat) maupun yang dilakukan di laut (perikanan laut).

Dalam hal perikanan darat mayoritas masih bersifat alamiah, karena sekitar 70% sasaran mereka adalah sungai lepas,

danau dan rawa. Sedangkan selebihnya sekitar 30% berupa perairan kultur, yaitu pemeliharaan ikan di kolam.^{1 3)}

Hasil usaha rakyat dalam bidang perikanan di samping untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat setempat ternyata menambah sumber pendapatan devisa negara, karena hasil penangkapan ikan di samping yang bersifat konsumsi juga terdapat ikan hias yang banyak digemari di luar negeri.

Hasil produksi perikanan di daerah Jambi mulai meningkat setelah adanya bantuan dari pihak pemerintah baik dengan penyuluhan-penyuluhan, bantuan bibit, maupun peralatan seperti kapal motor dan lain-lain.

Perkembangan produksi ikan di daerah Tingkat I Jambi selama Pelita II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. PRODUKSI IKAN LAUT, DARAT DAN IKAN HIAS SELAMA PELITA II DI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Tahun	Ikan Laut (ton)	Ikan Darat (ton)	Jumlah (ton)	Ikan Hias (000 ekor)
1974	15.083	7.326	22.445	2.285
1975	8.105	6.582	14.687	1.075
1976	7.932	6.545	14.477	3.592
1977	10.732	5.879	16.611	3.495,2
1978	11.139	5.771	16.910	10.112,7

Sumber: Jambi yang menanti jamahan.

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil produksi ikan laut dan ikan hias semakin meningkat, terkecuali untuk ikan laut bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 1974. Sedangkan perikanan darat terjadi penurunan sampai tahun 1978. Hal ini disebabkan oleh pengaruh musim yang masih sangat menentukan berhasil tidaknya usaha penangkapan ikan di perairan umum di mana peralatannya masih sangat sederhana.

5.2.4 Hasil hutan

Usaha ini merupakan pemanfa'atan kekayaan alam yang tumbuh dengan bebas di alam terbuka. Daerah Jambi sebagian besar terdiri daerah hutan, di mana pada tahun 1975 berkisar 82%. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau daerah ini terkenal dengan hasil hutannya. Hasil hutan-hasil hutan yang diusahakan rakyat meliputi:

- 1) Kayu
Bermacam-macam jenis kayu yang terdapat di hutan yang dipergunakan sebagai bahan bangunan, seperti: kayu bulian, kayu tembesu, kayu meranti, kayu balam dan lain-lain. Kayu bulian merupakan jenis kayu yang terbaik, tahan air, harganya pun mahal.
- 2) Rotan
- 3) Getah-getahan: yaitu; getah jeruang, jelutung, balam, sundih dan getah manau
- 4) Damar

Di samping hasil-hasil hutan tersebut di atas, hutan di Jambi menghasilkan pula berbagai macam keuntungan yaitu gading gajah, kulit harimau, madu lebah dan daging binatang-binatang buruan yaitu: rusa, kijang, kancil, babi dan lain-lain.

Mayoritas dari hasil hutan merupakan barang ekspor yang sangat tinggi nilainya, yang menentukan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan ekspor dalam bidang perkayuan baru dimulai sejak adanya Pelita. Pada awal Pelita I tahun 1969 nilai ekspor kayu baru 0,04%, tetapi pada akhir Pelita I telah mencapai 25,96%. Perkembangan ekspor tersebut terus meningkat pada Pelita II seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8 PERKEMBANGAN EKSPOR KAYU BULAT (LOG) DAN KAYU GERGAJIAN PROPINSI JAMBI TAHUN 1974-1978

Tahun	Kayu bulat (log) (volume ton)	Nilai US\$	Kayu gergajian volume (ton)	Nilai US\$
1974	365.865,2	19.772.604,30	2.542,4	198.252,34
1975	350.331,4	16.102.504,45	4.981,9	414.836,83
1976	468.630,1	25.446.417,80	25.832,9	1.379.818,21
1977	500.131,2	30.931.923,48	37.767,5	2.84.908,60
1978	620.846,7	40.251.230,24	51.838,9	3.561.746,91

Sumber: Kanwil Perdagangan Propinsi Jambi.

Dari tabel tersebut di atas terlihat peningkatan yang pesat sekali. Namun penebangan hutan yang secara besar-besaran itu akan menimbulkan dampak yang negatif apabila tidak diimbangi dengan penanaman kembali hutan yang telah ditebang, sehingga bencana erosi, banjir, susah untuk dikendalikan. Apalagi penebangan kayu tersebut berjalan terus, sedangkan penanaman kembali sampai tumbuhnya menjadi kayu besar memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun.

5.2.5 *Industri*

Jenis industri di daerah Jambi sebagian besar terdiri atas kerajinan rakyat. Hal ini mengingat besarnya volume bahan baku dari hasil pertanian/perkebunan maupun hasil hutan rakyat sendiri, seperti industri penggergajian kayu, industri karet, industri minyak kelapa dan lain-lain. Berbagai jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga pemerintah melalui program BIPIK berusaha untuk mengembangkannya. Usaha-usaha tersebut dilakukan baik melalui kursus-kursus untuk meningkatkan ketrampilan mereka maupun melalui perkoperasian untuk menanggulangi masalah permodalan dan pemasaran hasil produksi.

Jenis kerajinan perabot rumah tangga akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, terutama jenis ukiran Jepara yang dapat diperoleh di mana saja.

5.2.6 Perburuhan

Sistem perburuhan bermula dari pekerja-pekerja pada *onderneming-onderneming* Belanda. Dalam hal ini tenaga kerja kasar biasanya diambilkan dari orang-orang pribumi dan orang-orang Cina, sedangkan orang-orang Eropa bertugas sebagai pemegang administrasi.¹⁴⁾

Dalam sistem upahan, terjadi perbedaan yang menyolok antara tenaga kerja pribumi dan non pribumi. Tenaga kerja pada *onderneming* Belanda tersebut, orang-orang pribumi mendapat upah antara 0m80 s.d. 1. per hari, sedangkan orang-orang Cina mendapat upah antara 2. s.d. 2,50 per hari.¹⁵⁾

Dalam masa sesudah kemerdekaan, terutama sesudah berkembangnya industri perkayuan dengan berdirinya *saw mill*, *saw plant* dan sejenisnya merupakan daya serap yang besar pada tenaga kerja manusia, bangsa dari negara lain, terutama orang-orang Cina. Setelah masuknya kolonial Belanda ke daerah Jambi pada tahun 1615 yang dipimpin oleh Abraham Streck, maka setahun kemudian (tahun 1616) Abraham Streck telah mendapat izin dari Sultan Abdul Kahar untuk mendirikan kantor dagang VOC di Muara Kumpeh, namun karena sulitnya memperoleh hasil hutan dan lada dari penduduk, kantor tersebut pada tahun 1625 ditutup. Belanda membuka kembali kantor dagang di Jambi pada tahun 1636 di mana pada waktu itu terjadi perselisihan antara sultan Jambi dengan sultan Johor yang menuntut penyerahan Negeri Tungkal. Rupanya pihak Belanda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya.¹⁶⁾

Kegiatan perdagangan rakyat Jambi pada mulanya bersifat tradisional, karena barang dagangan yang diperdagangkan merupakan barang konsumsi dan hasil hutan yang bersifat alamiah. Keadaan ini berlangsung sampai awal abad XX di mana pihak

kolonial Belanda dengan politik ekonominya mengakibatkan meluasnya tanaman komersial karet dan tanaman-tanaman komersial lainnya seperti kapuk, pinang dan lain-lain yang mendapat pasaran baik di Singapura. Pusat kegiatan perdagangan yang ramai di Jambi sejak semula berada di daerah Jambi kota, Muara Sabak dan Kuala Tungkal karena daerah-daerah tersebut kurang baik untuk penanaman karet, termasuk daerah pelabuhan. Kuala Tungkal dan Muara Sabak merupakan pintu gerbang masuknya barang dari luar ke Jambi, apalagi pada waktu belum dibukanya hubungan jalan darat dari Jambi ke kota lain. Daerah Jambi kota merupakan pusat pemerintahan, baik pada masa kesultanan, masa sebelum dan sesudahnya. Di samping sebagai pusat pemerintahan Jambi kota dipisahkan oleh Sungai Batang Hari sehingga membuat daerah ini strategis untuk pelabuhan dagang, di mana di samping pelabuhan tersebut terletak pasar induk dan pusat-pusat pertokoan.

5.3 *Sistem Mekanisme Ekonomi*

Sesuai dengan ketradisionilan bentuk usaha rakyat Jambi sebelum masuknya karet, ekonomi rakyat bersifat konsumtif dan alamiah, yaitu usaha dalam bidang pertanian, perikanan dan pemanfaatan kekayaan hasil hutan yang tumbuh dengan sendirinya dengan peralatan yang sederhana dan tenaga kerja manusia sebagai modal utama. Dalam bidang ekonomi, rakyat Jambi bertindak sebagai produsen, karena merekalah yang secara langsung mengolah tanah pertanian, mengambil hasil hutan, menangkap ikan dan lain-lain.

Dalam bidang perdagangan yang bertindak sebagai pedagang perantara antara produsen dan konsumen, umumnya berdiri dari orang-orang luar, yaitu orang-orang Cina dan orang-orang Palembang. Sedangkan perdagangan di pasar Jambi yang didirikan oleh pemerintah kota (*gemeente*) untuk keperluan hidup sehari-hari seperti bahan makanan, garam, sayur-sayuran, ikan dan lain-lain, umumnya dilakukan oleh orang-orang Cina

dan orang-orang Melayu. Perdagangan beras yang menyangkut ekspor impor dilakukan oleh orang-orang Cina dan Eropah.^{1 7)}

Apabila ditinjau dari awal sejarah Jambi hingga sekarang, terdapat perkembangan sistem perekonomian rakyat yaitu:

5.3.1 *Sebelum Abad XX*

Pada masa ini kondisi ekonomi rakyat masih sangat sederhana dengan ciri-ciri:

- 1) Pertanian swasembada pangan
Usaha pertanian rakyat adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan, bahkan terdapat surplus dari hasil tanaman padi sehingga sampai di ekspor ke luar daerah seperti ke Sumatra Barat.
- 2) Perdagangan dengan dunia luar merupakan ekspor hasil hutan atau rempah-rempah yang diusahakan dari kekayaan alam/hasil hutan yang tumbuh secara alamiah.

5.3.2 *Menginjak Abad XX*

Masa ini terjadi perkembangan dalam bidang ekonomi yaitu:

- 1) Pertanian rakyat mulai beralih dari tanaman pangan (padi) kepada usaha perkebunan yang bersifat komersial terutama karet. Karena mayoritas rakyat mengalihkan bidang usahanya dari pertanian tanaman pangan ke perkebunan karet, maka terjadi kekurangan bahan makanan. Untuk menutupi kebutuhan tersebut didatangkan dari luar, yaitu dari Singapura.
- 2) Perdagangan dengan dunia luar di samping ekspor hasil hutan atau rempah-rempah seperti pada masa sebelumnya, diramaikan dengan perdagangan karet.

5.3.3 *Masa Pelita*

Dengan program pembangunan lima tahun yang dimulai tahun 1969 mulai dicanangkan pengembangan pembangunan di-

segala bidang, terutama dalam sektor pertanian menuju swasembada pangan. Hal ini bukan berarti kembali pada sistem tradisional yang terjadi pada masa pertama, tetapi meningkatkan usaha pertanian pangan yang merosot pada masa kedua, di samping mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor lain termasuk juga karet.

Dalam bidang perdagangan menunjukkan kemajuan yang berarti, terutama ekspor hasil hutan kayu yang hampir belum dikenal pada masa sebelumnya. Pada tahun 1967 ekspor kayu belum ada, dan baru tercatat tahun 1971 sebesar 1,60% dari keseluruhan ekspor daerah Jambi, tetapi pada tahun 1976 telah meningkat menjadi 57,75%.¹⁸⁾

Apabila ditinjau dari segi perubahan usaha rakyat yang terjadi pada abad ke 20, tepatnya sesudah pemerintah kolonial Belanda mewajibkan kepada rakyat untuk menanam karet pada sebagian tanahnya, yang kemudian berkembang dengan pesat pada tahun-tahun berikutnya, terjadilah perubahan sistem ekonomi rakyat Jambi. Pada masa sebelumnya ekonomi rakyat bersifat regional atau subsistensif. Adanya penanaman karet secara besar-besaran mengakibatkan banyaknya para pendatang sebagai tenaga buruh. Para tenaga buruh ini lebih mengandalkan pada kemampuan bekerja/keahlian bekerja pada perkebunan-perkebunan karet. Walaupun mereka tidak mempunyai tanah perkebunan/tanah pertanian sendiri, ternyata mereka cepat menjadi orang yang kaya. Sistem ekonomi yang demikianlah yang diistilahkan sebagai revolusi pertanian.¹⁹⁾

Dari perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan sistem ekonomi rakyat, namun masih ditentukan oleh faktor alam.

5.4 *Jaringan Komunikasi Ekonomi*

Untuk memperlancar jalannya arus barang maupun jasa dalam bidang ekonomi, vital memerlukan adanya jaringan-jaringan ekonomi sebagai transit yang menghubungkan antara produsen

dan konsumen. Jaringan-jaringan ekonomi tersebut selalu terdapat di tempat-tempat yang strategis mudan mencapainya. Terdapat beberapa jaringan ekonomi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi di Jambi yaitu:

5.4.1 *Pasar*

Di Kota Jambi terdapat pasar induk sebagai pusat perbelanjaan segala keperluan hidup. Pasar tersebut pada mulanya terdiri atas los-los dan kedai yang didirikan oleh gemeente (pemerintah kota). Pada waktu sekarang pasar tersebut telah mengalami perkembangan, di mana telah dibangun toko-toko yang menjual barang-barang kelontong, barang-barang elektronik dan lain-lain buatan luar negeri terutama dari Singapura.

Secara geografis kota Jambi dipisahkan oleh Sungai Batang Hari menjai dua, yaitu daerah seberang di mana terletak perkampungan penduduk baik orang-orang Melayu Jambi maupun orang-orang Arab dan seberangnya lagi terletak pasar induk dan pusat pemerintahan. Oleh karena itu sampai sekarang Kota Jambi dikenal dengan daerah pasar dan daerah seberang kota.

5.4.2 *Bank*

Bank merupakan tuntutan dalam bidang perekonomian modern yang melayani arus lalu lintas keuangan. Sejak tahun 1910 di Jambi telah berdiri *Djambi Schevolks Bank* dengan modal pertamanya f 200.000.²⁰) Bank bukan sekedar tempat mendepositokan uang saja, tetapi mempunyai fungsi yang komplek, terutama bagi para petani ekonomi lemah, mereka dapat memperoleh tambahan modal untuk mengerjakan perkebunan mereka melalui kredit.

Sampai saat sekarang perkembangan perbankan telah berkembang dengan pesat, sehingga kalau pada tahun 1910 baru terdapat satu bank, sekarang telah terdapat berbagai bank, baik bank pemerintah maupun swasta yaitu: Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Ekspor Impor, Bank Rakyat Indonesia, Bank Pembangunan Daerah

dan Bank Danamond.²¹⁾ Dari bank-bank yang ada itu, satu bank swasta yaitu Bank Danamond, satu bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Pemerintah Daerah dan lainnya milik pemerintah RI pusat.

5.4.3 *Pelabuhan Dagang*

Terdapat tiga pelabuhan dagang di daerah Jambi, yaitu Pelabuhan Tungkal di Kuala Tungkal, Pelabuhan Sabak di Muara Sabak dan Pelabuhan Jambi yang terletak di pusat Kota Jambi. Pelabuhan Tungkal dan Pelabuhan Sabak merupakan dua pelabuhan sebagai pintu masuk ke daerah Jambi melalui Sungai Batang Hari. Di Pelabuhan Tungkal dan Sabak ini banyak barang-barang luks, barang-barang elektronik yang datang dari Singapura, karena dekatnya daerah tersebut tetapi juga karena kurang ketatnya pengawasan arus barang masuk yang datang dari luar negeri.

Pelabuhan Jambi yang terletak di pusat kota merupakan unsur vital bagi perekonomian daerah Jambi, semua arus ekspor ke luar negeri diangkut dengan kapal melalui pelabuhan ini, bahkan barang ke luar daerah di dalam negeri pun sebagian besar melalui kapal lewat pelabuhan ini.

5.5 *Hubungan Dagang*

Tiap-tiap daerah mempunyai ciri-ciri spesifik tertentu dalam bidang perekonomian dengan hasil-hasil daerah yang bersangkutan. Karena kebutuhan hidup manusia serba kompleks, maka hampir tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu dari hasil produksinya sendiri. Hal ini di samping kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan dalam bidang pengembangan mekanisme kehidupannya. Untuk mengatasi masalah ini, maka ditempuhlah kontak dagang dengan daerah lain.

Hubungan dagang daerah Jambi sejak zaman kerajaan telah meluas tidak hanya di daerah Nusantara saja, tetapi telah sampai ke luar Nusantara. Faktor penyebabnya yang paling

utama adalah karena secara geografis daerah ini dekat dengan negara lain yaitu Singapura dan mempunyai hasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga para pedagang yang datang ke daerah ini tidak hanya para pedagang dari daerah sekitar seperti dari Palembang, Sumatra Barat dan lain-lain, tetapi juga bangsa-bangsa lain terutama orang-orang Cina dan orang-orang Eropa.

Nilai perdagangan di Jambi yang terjadi pada tahun 1913 seharga f 1.077.803, dan pada tahun 1914 seharga f 871.563. Penurunan nilai perdagangan ini akibat pengaruh perang dunia pertama dan pengurangan pemasukan barang-barang baja, benang, pakaian, barang makanan dan minuman.

Nilai ekspor pada saat yang sama yaitu tahun 1912 : f 2.057.344, pada tahun 1913 : f 1.640.950 dan pada tahun 1914 seharga f 1.386.632. Perincian ekspor tersebut yang tercatat pada tahun 1914 adalah *caount chanc (hevea)* seharga f 330.500 getah perca, daun-daunan dan hasil hutan f 76.000, tetah jelutung f 264.537, rotan f 574.940, ikan asin f 55.670 dan damar seharga f 24.200.²²⁾

Mekanisme perdagangan dari Jambi mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi dan situasi daerah ini serta pengaruh dunia. Volume barang yang diperdagangkanpun mengalami perubahan juga terutama mengenai barang ekspor, di mana sebelum adanya ekspor kayu, karet merupakan ekspor yang paling besar, dan pada saat sekarang ekspor keduanya hampir berimbang.

Hubungan dagang daerah Jambi saat ini di samping yang dilakukan dengan daerah-daerah lain di dalam negeri seperti dengan Palembang, Sumatra Barat, Jakarta dan lain-lain, juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, juga negara-negara Timur Tengah. Barang-barang ekspor dari Jambi terutama karet dan kayu, sedangkan impor ke Jambi umumnya barang-barang kebutuhan hidup seperti pakaian, gula, garam, juga mesin-mesin dan lain-lain.

CATATAN

1. Wawancara dengan A. Mukti Nashruddin, tanggal, 16-10-1983, di rumah kediamannya.
2. Team Survey/Perencanaan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Jambi, Menyeluk Daerah Propinsi Jambi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1977/1978. hal. 57.
3. Drs. Fauzi M.O. Bafadhal. Madrasah Al-Khairiyah dan Gerakan Hisbullah di Kota Jambi, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN STS Jambi, 1981/1982. haal. 11.
4. Team Penyusun, Monografi Daerah Jambi, Jilid I, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan, tahun 1976, hal. 25-26.
5. H.M. Saman Samsuddin, wawancara, tanggal, 17-10-1983. di rumah kediamannya.
6. Team Penyusun, Op cit, hal. 27.
7. Team Survey/Perencanaan, Op cit, hal. 56.
8. Dimaksudkan dengan pertanian di sini adalah usaha dalam bidang pertanian terbatas dalam tanaman muda, baik yang diusahakan di tanah kering maupun di tanah basah, untuk tanaman keras dimasukkan ke bagian perkebunan.

9. Zevende Jaargang, Tijdschrifts voor sconomische geographie, Sgravenhage – Mouton co, tahun 1916, hal. 502.
10. Team Penyusun, Op cit, hal. 36.
11. Lihat J.A. Mutholib, Suatu tinjauan mengenai beberapa gerakan sosial di Jambi pada perempatan pertama abad 20 dalam Prisma, Agustus, 1980, tahun IX, hal. 29.
12. Ibid, lihat juga Encyclopaedia van Nederlandsch Indie, Jilid I, Geravenhage Matrinus Nijhaff, 1977, hal. 608.
13. Team Survey/Perencanaan, Op cit, hal. 60. Bandingkan dengan Tijdschrift voor Economische geographie hal. 503. lihat pula pengaruh imigrasi penduduk terhadap perkembangan kebudayaan daerah Jambi, hal. 106.
14. Imran, Tokoh masyarakat Rangking yang pernah bertindak sebagai penyalur barang dagangan Belanda pada tahun 1912 s/d. 1916, wawancara, di rumah kediamannya pada tanggal, 12 Oktober 1983, Bandingkan dengan Adatrecht bundel XXX, 1932, hal. 308-310.
15. Ibid.
16. Drs. R. Zainuddin, Sejarah Daerah Jambi (zaman kerajaan Melayu dan kesultanan Jambi), STKIP Jambi tahun 1982, hal. 11, lihat pula Tijdschrift voor Economische geographie, hal. 504.
17. Zevende Jaargang, Op cit, hal. 503.
18. Pengaruh Migrasi Penduduk terhadap perkembangan kebudayaan daerah Jambi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 145.
19. B. Schriehe, Indonesia Sociological Studies, hal. 1, The Hegue W, van Hoeve, 1955, hal. 108-110.
20. Encyclopaedia van Nederlandsch Indie, Jilid I, Geravenhage Matrinus Nijhaff, 1977, hal. 614.
21. Djamaluddin Tambunan, Jambi yang menanti jamahan, Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, 1979, hal. 181.
22. Zevende Jaargang, Op cit, hal. 504.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, ed. : *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, LP 3 ES, Jakarta, 1977.
- Burger, d.h. : *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Bharata, Jakarta, 1977.
- Djoko Surjo : *Aspek Sejarah Sosial Dalam Penelitian Sejarah Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984.
- Departemen Pendidikan : *Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Jambi*, t.t.
- : *Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Propinsi Jambi*, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981/1982.

- : *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1979/1980.
- : *Menyeluk Daerah Propinsi Jambi*, Team Survey/Perencanaan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Jambi, 1977/1978.
- Hassan Shadily : *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Cetakan ketujuh, Pembangunan, 1980.
- Ismail Muhammad, RH. : *Sulthan Thaha Saifuddin sebagai Raja dan Pejuang Islam*, hasil Seminar tanggal, 13-14 Juni 1978.
- Jambi, Team Penelitian : *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Mengenai Pembagian Harta Waris dan Harta Pusaka dalam kehidupan sosial Masyarakat Jambi*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN STS Jambi, 1980/1981.
- Jambi, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I : *Informasi Pokok tentang Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk. II dalam Propinsi Daerah Tk. I Jambi*, Biro Organisasi dan Tata Laksana, 1983.
- Jambi, Pemerintah Daerah: *Penataran Desa Dataran Rendah (Kabupaten Bungo Tebo) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi*, Laporan Hasil Survey, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 1979.

- : *Penataan Desa Pantai (Kabupaten Tanjung Jabung) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi*, Laporan Hasil Survey, Badan Perencanaan (Bappeda), 1979.
- : *Penataan Desa Dataran Tinggi (Kabupaten Kerinci) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi*, Laporan Hasil Survey, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 1979.
- : *Inventarisasi Peninggalan Sejarah Purbakala dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jambi*, Laporan Hasil Survey, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 1980/1981.
- : *Pendidikan Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jambi*, Laporan Hasil Survey, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 1979/1980.
- : *Pendidikan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi*, Laporan Hasil Survey, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 1979.
- Jambi, Team Penyusun : *Monografi Daerah Jambi*, Jilid 1-2
Monografi Daerah : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Jakarta, 1976.
- Koentjaraningrat : *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.

- : *Methode-methode Antropologi dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, t.t.
- Kuntowijoyo : *Beberapa Model Penulisan Sejarah Sosial*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983, 1984.
- Leur, J.C. van : *Indonesia Trade and Society*, Second addition, Sumur, Bandung, 1960.
- Naskah : *Oendang-oendang Aturan Raja-raja Mantri-mantri dan Segala Hukum di dalam Negeri Jambi*, Naskah t.t. TP.
- Republik Indonesia, Kementerian Penerangan : *Bulletin Nomor 11 tentang Sumatra Tengah*, Jakarta, 1954.
- Sjahboeddin, Raden : *Sejarah Jambi*, Naskah catatan Pribadi, t.t.
- Taufik Abdullah : *Beberapa Aspek Penelitian Sejarah Local*, (Prasarana Seminar Sejarah Nasional ke III di Jakarta tanggal, 10-13 Nopember 1981), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Seminar Sejarah Nasional ke III, 1981.
- : *Ke arah Penulisan Sejarah Sosial Daerah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Seja-

rah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984.

- : *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 1979.
- Tideman, J. : *Djambi, Uitgegeven Met Steun van Het Kononklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en van het Zuid Sumatra Institut Druk*, De Bussy Amsterdam, 1938.
- Usman Pelly, Dr. : *Beberapa Pendekatan dan Pengalaman Study Sejarah Sosial Perkotaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984.
- Vredembregt, J. : *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.

Lampiran 1

Tabel 9 TREND PENDUDUK PROPINSI JAMBI MENURUT DAERAH TINGKAT II TAHUN 1961-1976

NO.	KABUPATEN/KODYA	TAHUN 1961	TAHUN 1971	TAHUN 1975	TAHUN 1976	RATA-RATA TAMBAHAN PERTAHUN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanjung Jabung	117.340	215.496	243.907	273.034	7,28 %
2.	Batanghari	134.110	160.076	180.632	183.723	1,87 %
3.	Sarolangun Bangko	111.667	143.357	167.700	172.745	2,62 %
4.	Bungo-Tebo	111.443	141.981	161.201	167.329	2,36 %
5.	Kerinci	155.874	186.615	210.527	216.760	1,95 %
6.	Kotamadya Jambi	111.080	158.559	182.411	139.568	3,86 %
	Propinsi Jambi	743.514	1.006.084	1.146.378	1.207.159	3,32 %

Lampiran 2

Tabel 10 SUSUNAN PENDUDUK PROPINSI JAMBI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1975

NOMOR	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0 – 4 tahun	97.623	16,55	108.294	19,46	205.917	17,96
2.	5 – 19 tahun	227.016	38,49	210.913	37,91	437.929	38,21
3.	20 – 54 tahun	226.190	38,35	206.827	37,17	433.017	37,78
4.	55 -----	39.038	6,62	30.341	5,45	69.379	6,05
	J U M L A H	589.867	100 %	556.375	100 %	1.146.242	100 %

Lampiran 3

Tabel 11 JUMLAH WARGA NEGARA ASING DALAM PORPINSI JAMBI MENURUT NEGARA ASAL TAHUN: 1973–1975

No.	NEGARA ASAL	1973			1974			1975		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cina	8.733	8.228	16.961	8.745	8.222	16.967	8.775	8.160	16.935
2.	India	345	210	556	346	210	556	345	210	555
3.	Korea Selatan	50	—	50	49	—	49	126	5	131
4.	Malaysia	249	8	302	287	8	295	416	7	152
5.	Philipina	104	1	105	104	1	105	145	1	146
6.	Singapura	102	75	177	104	75	179	106	74	180
Jumlah		9.629	8.522	18.151	9.635	8.516	18.151	9.913	8.457	18.370

Sumber: Kantor Dit.Jen. Imigrasi Jambi.

Lampiran 4

Tabel 12 MADRASAH NEGERI/SWASTA, PGAN DAN PONDOK PESANTREN PROPINSI JAMBI

No.	Kabupaten/Kodya	Min&Mis		MTSN&MTSS		MAN&MAS		PGAN		PONDOK P ke		
		N/S	Sek	Murid	Sek	Murid	Sek	Murid	Sek	Murid	Sek	Murid
1.	Kodya Jambi	N	1	144	23	1.063	11	226	1	213	5	-
		S	48	6.991	9	694	4	154	-	-	5	2.146
2.	Batang Hari	N	-	-	2	432	1	134	-	-	4	2.901
		S	107	11.943	11	609	1	13	-	-	15	2.908
3.	Bungo Tebo	N	1	297	2	276	1	204	-	-	9	2.919
		S	177	17.771	9	424	-	-	-	-	-	-
4.	Sarko	N	3	892	4	1.410	2	440	1	295	-	-
		S	127	13.092	11	735	-	-	-	-	-	-
5.	Kerinci	N	-	-	2	424	1	81	-	-	-	-
		S	92	9.062	9	720	1	80	-	-	7	1.335
6.	Tanjab	N	5	1.315	13	4.056	6	1.085	2	508	-	-
		S	140	16.484	13	617	1	47	-	-	6	1.701
Jumlah :			691	75.34,	62	3.799	19	2.464	4	1.016	42	11.910

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jambi 1983.

Sei. Kabid. Pembinaan Perguruan Agama Islam Negeri/Swasta.

Lampiran 5

Tabel 13 LUAS PANEN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN PADI DI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN 1970–1975

No.	Lokasi/Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton Gabah Kering)	Produksi Rata-rata KW/HA	Kebutuhan (Ton Gabah Kering)	Plus/Minus (Ton Gabah Kering)
1	2	3	4	5	6	7
	Propinsi Jambi					
1.	1971	118.142	332.875	28,18	323.971	+ 8.904
2.	1972	110.369	287.967	26,09	330.153	- 42.186
3.	1973	131.102	348.332	26,57	344.409	+ 3.843
4.	1974	133.712	352.8,7	26,39	355.308	- 2.471
5.	1975	142.680	385.839	306.75	- 19.086

Sumber: Dinas Pertanian Daerah Tk. I Jambi.

Keterangan: Tidak diperoleh Data

Lampiran 6

Tabel 14

LUAS SAWAH MENURUT SISTEM PENGAIRANNYA DI DAERAH JAMBI 1971-1975

(Dalam Ha)

No.	Jenis Pengairan	1971	1972	1973	1974	1975
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengairan teknis	470	615	615	615	615
2.	Setengah teknis	12.749	13.251	13.459	13.423	13.429
3.	Sederhana	12.706	12.342	13.852	15.617	16.493
4.	Payo/Rawa	27.706	27.732	28.394	28.404	28.039
5.	Pasang surut	61.700	61.850	65.810	66.262	71.415
6.	Tadah hujan	3.701	3.881	5.421	4.666	4.155
Jumlah		119.032	120.651	127.551	128.993	134.146
Ladang		24.826	23.770	24.106	26.036	25.590
Total		143.858	144.421	151.657	155.029	159.736

Sumber: Dinas Pertanian Daerah Tk. I Propinsi Jambi

Lampiran 7

Tabel 15. LUAS PERKEBUNAN RAKYAT PROPINSI JAMBI TAHUN 1972 – 1975

No.	Jenis Tanaman	1972	1973	1974	1975
		Luas / Ha.	Luas / Ha.	Luas / Ha.	Luas / Ha.
1.	Karet	287.618	295.810	298.819	303.463
2.	Kelapa	59.732	64.599	65.312	65.948
3.	Cassia Vera	31.028	39.184,6	43.952,5	45.220
4.	Kopi	14.694	14.777	16.794	16.927
5.	Cengkeh	2.405	2.664	2.887	3.672
6.	Tembakau	1.100	1.879	1.843	1.821
7.	Teh	—	—	—	50
8.	Tebu	1.016	811,2	816	903
9.	Kapuk	163	169	177	182
10.	Lada	—	26	29	29
11.	Pala	—	78,5	78	14
12.	Kapas	—	—	—	28,59
13.	Jarak	—	—	—	14
14.	Coklat	—	—	—	1
15.	Serai Wangi	—	81,5	57	60
16.	Pinang	—	4.413	4.413	—
17.	Kemiri	—	43	—	1

Sumber: Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Jambi.

Lampiran 8

Tabel 16 PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT PROPINSI JAMBI TAHUN 1973 – 1975

No.	Jenis Tanaman	1973	1974	1975
		Produksi / Ton	Produksi / Ton	Produksi / Ton
1.	Karet	88.434	88.554	81.565
2.	Kelapa	20.256,06	22.152	22.287,5
3.	Cassia Vera	3.900	4.100	4.000
4.	Kopi	13.278	14.070	14.216,4
5.	Cengkeh	59,9	75,8	91,5
6.	Tembakau	365,5	1.175	374
7.	Teh	—	—	2
8.	Tebu	737,7	705	462
9.	Kapuk	6,8	7,2	11,5
10.	Lada	10	10	11,5
11.	Pala	—	—	14
12.	Kapas	—	—	—
13.	Jarak	—	—	—
14.	Coklat	—	—	—
15.	Serat Wangi	0,15	—	—
16.	Pinang	—	—	—
17.	Kemri	—	—	—
Jumlah		127.048,1	130.849	123.042,4

Sumber: Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Jambi

Lampiran 9

Tabel 17/ LUAS AREAL PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KOMPOSISI TANAMAN PADA TIAP DAERAH TK. II
DALAM PROPINSI JAMBI TAHUN 1975 (Dalam Ha)

No.	Jenis Tanaman	Kerinci	Sarko	Bu – Te	Bt. Hari	T. Jabung	Kodya Jambi	Prop. Jambi
1.	Karet	400.	98.450	90.418	85.590	29.300	305	303.463
2.	Kelapa	160	31.800	23.182	17.318	9.000	105	65.948
3.	Kopi	16.100	312	75	103	335	2	16.927
4.	T e h	10	–	–	–	–	–	50
5.	Kapuk	30	30	62	56	3	1	182
6.	Lada	–	0,25	–	26	–	0,34	28,59
7.	Pala	–	10	3,5	–	–	0,5	14
8.	Cassia Vera	42.500	835	1.880	5	0,5	0,2	45.220,7
9.	Coklat	–	–	–	–	1,2	–	1,2
10.	Cengkeh	3.000	311	143	187,5	25	5,5	3.672
11.	Tebu	700	69	18	35	80	0,5	903
12.	Tembakau	1.800	11	6	–	4	–	1.821
13.	Serai Wangi	–	22	33	–	5	–	60
	J u m l a h	64.740	131.850,25	115.820,5	103.320,5	38.753,7	420,04	438.333,79

Sumber: Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Jambi

Lampiran 10

Tabel 18 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT LOKASI DAERAH TK. II
DALAM PROPINSI JAMBI TAHUN 1975 (Dalam Ton)

No.	Jenis Tanaman	Kerinci	Sarko	Bu. Tebo	Bt. Hari	T. Jabung	Kodya Jambi	Prop. Jambi
1.	Karet	160	31.800	23.183	17.318	9.000	105	81.565
2.	Kelapa	40	—	93	107,5	22.000	47	22.287,5
3.	Kopi	14.000	9,4	28,3	58,5	120	0,2	14.216,4
4.	Teh	2	—	—	—	—	—	2
5.	Kapuk	2	—	3	4,5	2	—	11,5
6.	Lada	—	—	—	11,5	@	—	11,5
7.	Pala	—	10	3,5	—	—	0,5	14
8.	Cassia Vera	4.000	—	—	—	—	—	4.000
9.	Coklat	—	—	—	—	—	—	—
10.	Cengkeh	80	3,6	2,1	5,7	—	—	91,5
11.	Tebu	400	—	12	20	30	—	462
12.	Tembakau	370	—	2	—	2	—	374
13.	Serai Wangi	—	—	—	—	—	—	—
Jumlah		19.054	31.823	23.325,5	17.525,7	31.154	152,7	123.034,2

Sumber: Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Jambi

Lampiran 11

Tabel 19 JUMLAH PRODUKSI KAYU DALAM PROPINSI JAMBI TAHUN 1975

No.	Masa Produksi	Kabu Bulat (logs) (m3)	Kayu Gergajian (m3)
1.	Januari	26.784,16	—
2.	Februari	22.718,93	—
3.	Maret	32.572,21	1.219,39
4.	April	41.280,53	243,17
5.	Mei	54.740,70	742,71
6.	Juni	80.797,20	468,73
7.	Juli	104.286,40	895,42
8.	Agustus	49.851,98	790,36
9.	September	70.050,75	319,81
10.	Oktober	71.333,33	880,90
11.	Nopember	61.001,22	976,17
12.	Desember	90.098,33	1.234,71
Jumlah		705.455,74	7.771,37

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

Tabel 20 JENIS DAN JUMLAH HASIL HUTAN NON - KAYU DALAM DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI
(dalam ribuan)

No.	Jenis produksi	Jumlah Produksi		Keterangan
1.	R o t a n	506,4	batang	di ekspor
2.	Getah Jernang	27.597	ton	sda.
3.	Getah Balam	4	ton	sda.
4.	Getah Damar	0,6	ton	sda.
5.	Getah Jelutung	209,3	ton	sda.
6.	Sarang Burung	0,616	ton	non ekspor
7.	Bambu	3,112	batang	non ekspor
8.	Atap sirap	2.772,5	lembar	non ekspor
9.	Belahan bulian	102,224	m ³	non ekspor

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

Tabel 21

KEADAAN JALAN RAYA DALAM PROPINSI JAMBI TAHUN 1974 – 1975

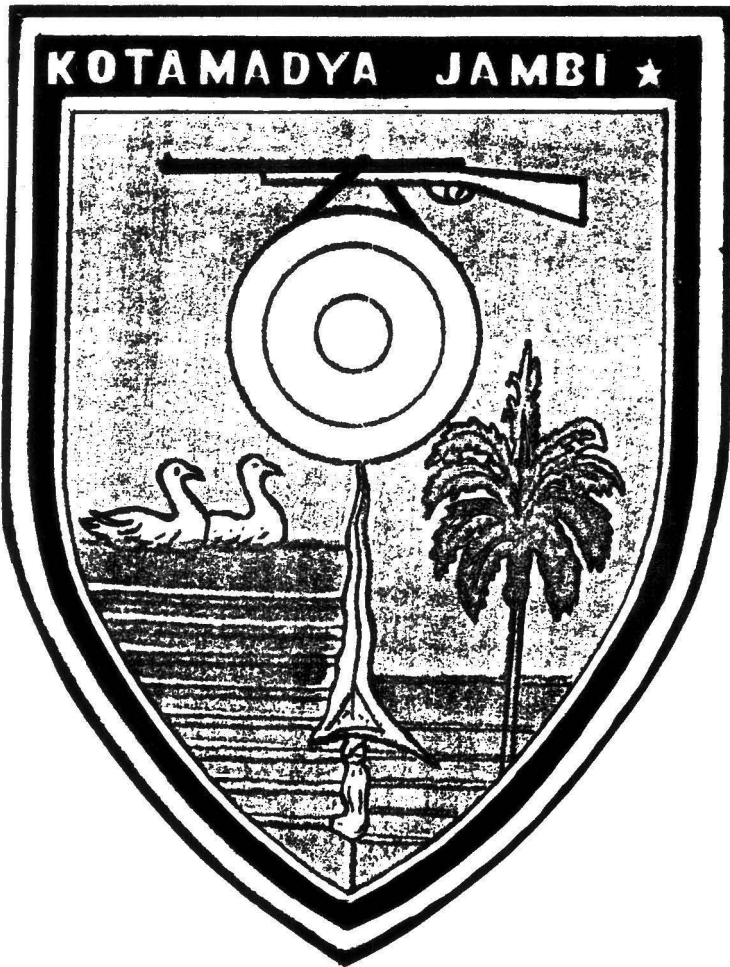
No.	Uraian	Panjang Jalan/Km.	1974		1975		Kelas - Jalan		
			Kerikil	Aspal	Kerikil	Aspal	III	III A	IV
1.	Negara	433	410,5	22,5	353,0	47,5	–	433	–
2.	Propinsi	914	874	40	874	40	39	659	162
3.	Kabupaten	1.387	1.011	376	–	37	1.387

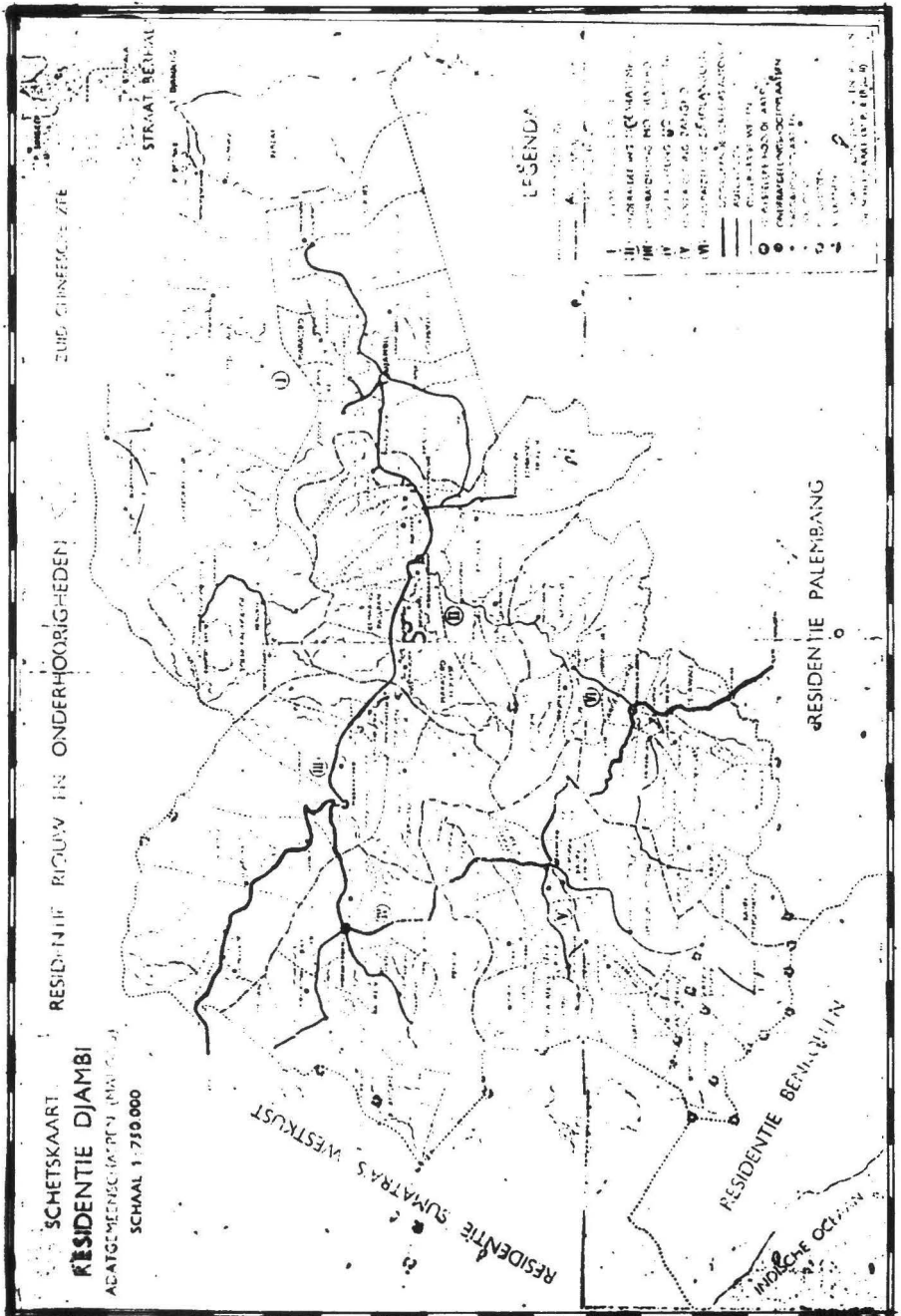
Sumber: Dinas PU Propinsi Jambi

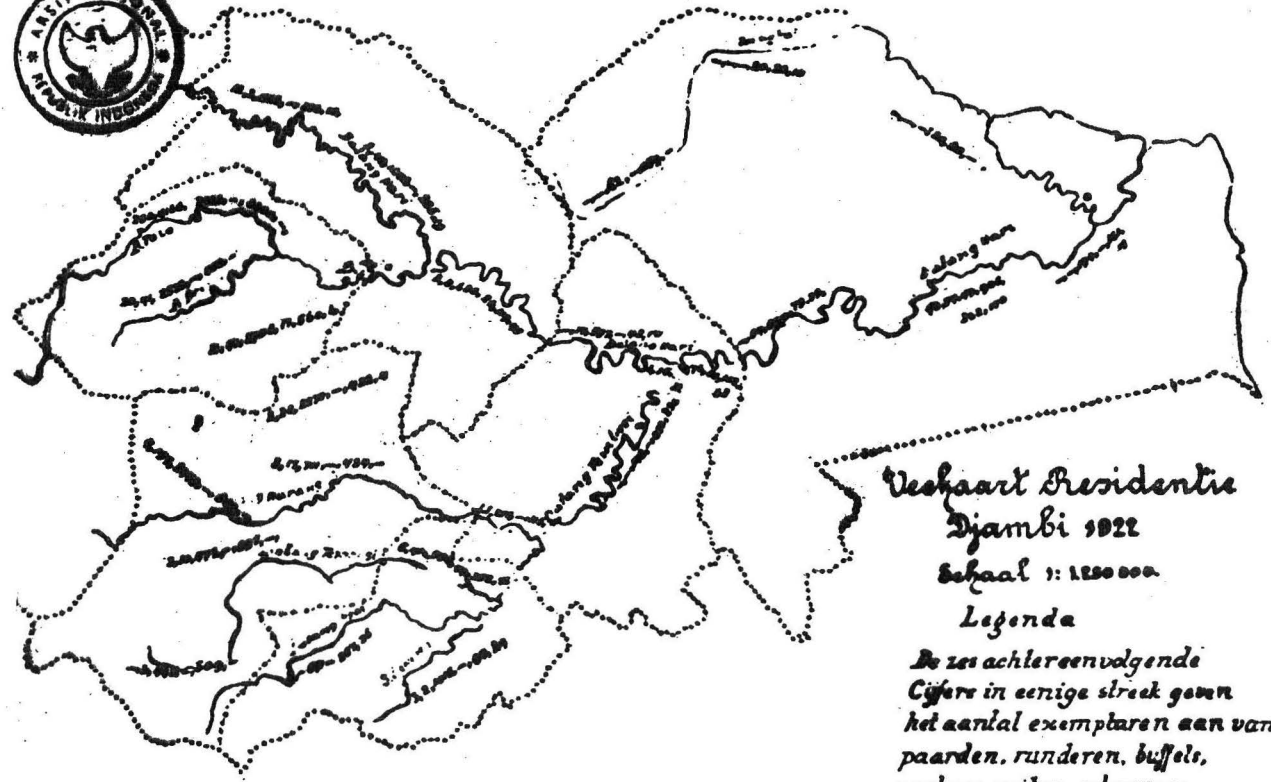
..... : Tidak diperoleh Data

Lampiran 14

LAMBANG KOTAMADYA JAMBI





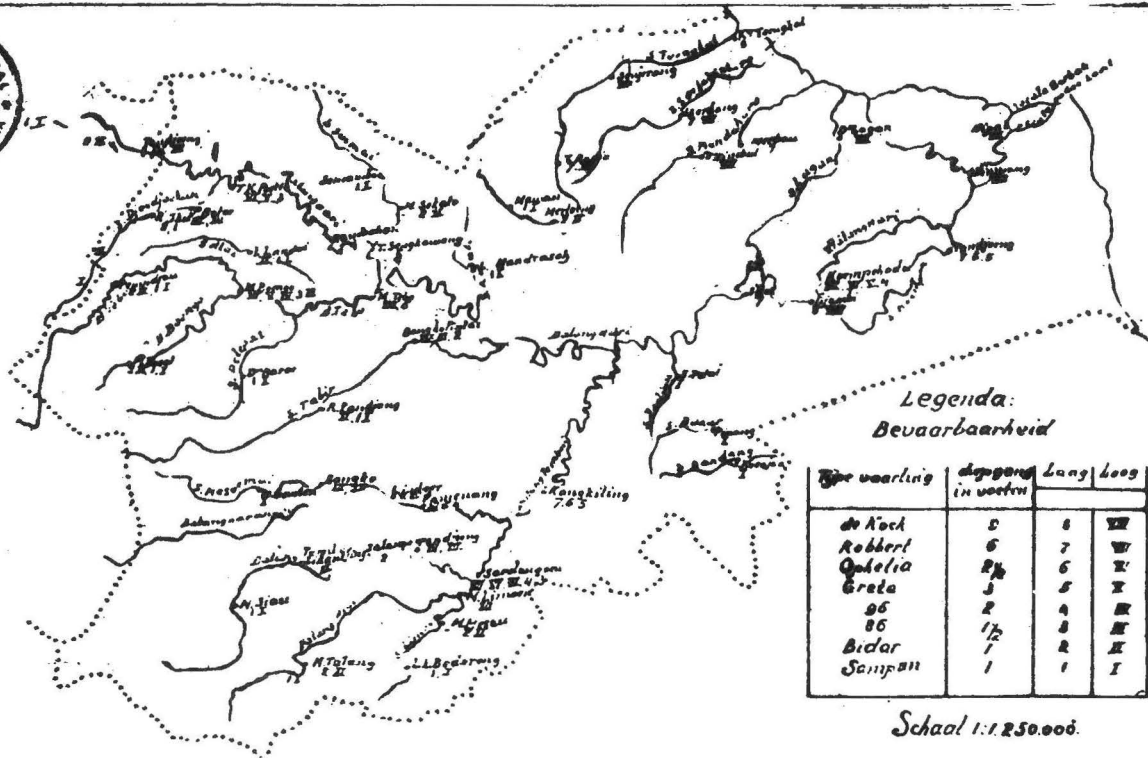


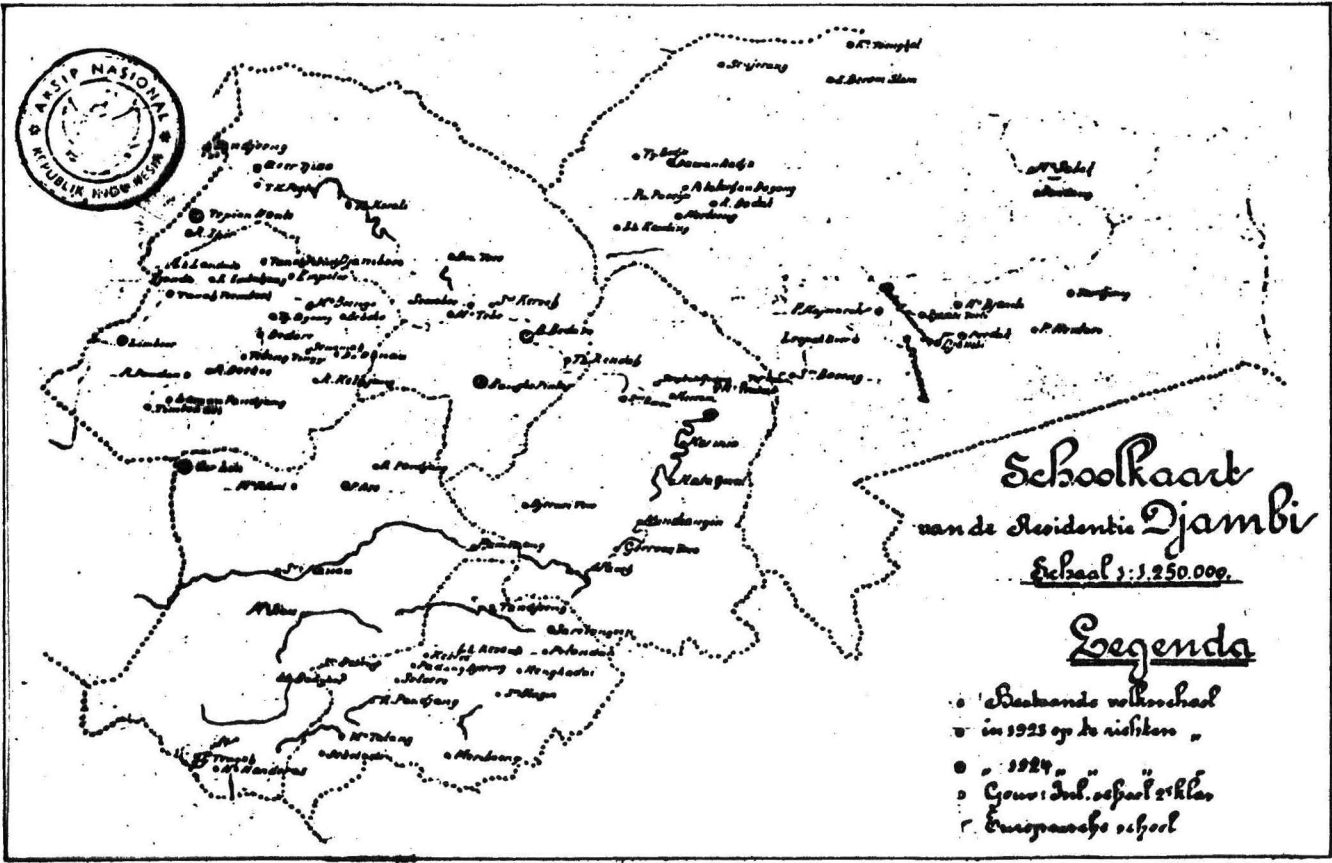
*Verhaart Presidentie
Djambi 1922*

Schaal 1: 1250 000.

Legenda

*De zes achtereenvolgende
Cijfers in eenige streek geven
het aantal exemplaren aan van
paarden, runderen, buffels,
varkens, geiten, schappen.*





Schoolkaart
van de Residentie Djambi
Schaal 1:250.000

Legenda

- Bestaande volksschool
- in 1925 op de te richten "
- " 1924 "
- Gouw: Ind. school school
- Europeasche school



2

14